

Editor:

Dr. Miko Andi Wardana, S.T., M.Si.

INFES MEDIA

AKUNTANSI INTERMEDIATE



Penulis:

Asrini A. Saeni, S.E., CFP., M.Sc.

Fahrul Imam Santoso, M.Ak., Ak., CA.

Regina Beatrix Takakobi, S.E., M.A.

Nur Jannah Abdi Aziz, S.E., M.Ak.

Harfiahani Indah Rakhma Ningtyas, S.ST., M.SA.

Dr. Angela Merici Minggu, S.E., M.Si.

Gebriany Pirade Wenur, S.E., M.S.A.

Dr. Dewi Sarifah Tullah, M.SI., AK., CA.

Alfriadi Dwi Atmoko, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA

Widiyanti Kurnianingsih, S.E., M.Akt., Ak., CA., CRA

Yopie Chandra, S.E., M.Akt.

Yola Andesta Valenty, S.E., M.Ak.

AKUNTANSI INTERMEDIATE

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

AKUNTANSI INTERMEDIATE

Asrini A. Saeni, S.E., CIFP., M.Sc.
Fahrul Imam Santoso, M.Ak., Ak., CA.
Regina Beatrix Takakobi, S.E., M.A.
Nur Jannah Abdi Aziz, S.E., M.Ak.
Harfiahani Indah Rakhma Ningtyas, S.ST., M.SA.
Dr. Angela Merici Minggu, S.E., M.Si.
Gebriany Pirade Wenur, S.E., M.S.A.
Dr. Dewi Sarifah Tullah, M.SI., AK., CA.
Alfriadi Dwi Atmoko, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA
Widiyanti Kurnianingsih, S.E., M.Akt., Ak., CA., CRA
Yopie Chandra, S.E., M.Akt.
Yola Andesta Valenty, S.E., M.Ak.

Editor:

Dr. Miko Andi Wardana, S.T., M.Si.

Penerbit:



CV. Intelektual Manifes Media
Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8
Kabupaten Badung, Bali
www.infesmedia.co.id

Anggota IKAPI
No. 034/BAI/2022

AKUNTANSI INTERMEDIATE

Asrini A. Saeni, S.E., CIFP., M.Sc.
Fahrul Imam Santoso, M.Ak., Ak., CA.
Regina Beatrix Takakobi, S.E., M.A.
Nur Jannah Abdi Aziz, S.E., M.Ak.
Harfiahani Indah Rakhma Ningtyas, S.ST., M.SA.
Dr. Angela Merici Minggu, S.E., M.Si.
Gebriany Pirade Wenur, S.E., M.S.A.
Dr. Dewi Sarifah Tullah, M.SI., AK., CA.
Alfriadi Dwi Atmoko, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA
Widiyanti Kurnianingsih, S.E., M.Akt., Ak., CA., CRA
Yopie Chandra, S.E., M.Akt.
Yola Andesta Valenty, S.E., M.Ak.

Editor:

Dr. Miko Andi Wardana, S.T., M.Si.

Tata Letak:

Erma Yuliani

Desain Cover:

Erma Yuliani

Ukuran:

Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

XII, 211

ISBN:

978-623-8528-42-4

Terbit Pada:

Mei, 2024

Hak Cipta 2024 @ Intelektual Manifes Media dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis

PENERBIT INTELEKTUAL MANIFES MEDIA

(CV. Intelektual Manifes Media)

Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8

Kabupaten Badung, Bali

www.infesmedia.co.id

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah buku dengan judul Akuntansi Intermediate dapat selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Akuntansi Intermediate ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Ilmu Akuntansi.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam dua belas bab yang memuat tentang pengantar akuntansi intermediate, aset lancar dan investasi jangka pendek, pendapatan, penerimaan yang belum diterima, dan penerimaan dimuka, aset tetap dan investasi jangka panjang, liabilitas dan kewajiban yang tidak lancar, ekuitas pemegang saham, arus kas, pendapatan, akuntansi untuk leasing, akuntansi untuk pajak penghasilan, akuntansi untuk instrumen keuangan derivatif, dan analisis laporan keuangan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penuh dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kami sampaikan kepada Intelektual Manifes Media (Infes Media) sebagai inisiator buku ini. Buku ini tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Mei, 2024
Editor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI INTERMEDIATE.....	1
Akuntansi Keuangan dan Standar Keuangan di Indonesia	1
Kerangka Kerja Konseptual Akuntansi	4
Isu-isu dalam Akuntansi Keuangan	11
BAB 2 ASET LANCAR DAN INVESTASI JANGKA PENDEK	17
Pendahuluan.....	17
Definisi Aset Lancar	18
Jenis-Jenis Aset Lancar	19
Pengertian Investasi Jangka Pendek	29
BAB 3 PENDAPATAN, PENERIMAAN YANG BELUM DITERIMA, DAN PENERIMAAN DIMUKA	33
Pendahuluan.....	33
Pendapatan	34
Konsep Penandingan.....	35
Metode Pencatatan Pendapatan	36
Sifat Proses Penyesuaian	38
Penerimaan yang Belum Diterima.....	39
Penerimaan Dimuka	40
BAB 4 ASET TETAP DAN INVESTASI JANGKA PANJANG	45
Konsep Dasar Aset Tetap dan Investasi Jangka Panjang	45
Kerangka Regulasi Akuntansi	48
Prinsip-prinsip Dasar dalam Mengakui Aset Tetap dan Investasi Jangka Panjang.....	48
Penilaian Aset Tetap	50
Penyusutan Aset Tetap	52
Penilaian Investasi Jangka Panjang	53
BAB 5 LIABILITAS DAN KEWAJIBAN YANG TIDAK LANCAR	59
Pengantar Liabilitas Tidak lancar	59
Pengertian Liabilitas Tidak lancar	59
Jenis Liabilitas Tidak Lancar	65
Pengukuran Liabilitas Tidak Lancar	66
Dampak Terhadap Keputusan Investasi.....	67
BAB 6 EKUITAS PEMEGANG SAHAM	75
Posisi Penting Ekuitas Pemegang Saham.....	75
Perusahaan Berorientasi Laba	77

Pembentukan Perusahaan Perseroan	78
Struktur Modal Perseroan.....	78
Karakteristik Ekuitas Pemegang Saham	79
Ekuitas Pemegang Saham dalam Neraca.....	80
BAB 7 ARUS KAS.....	95
Pengertian Arus Kas	95
Tujuan Laporan Arus Kas	96
Jenis – Jenis Arus Kas	96
Metode Pelaporan Arus Kas	98
Pola Arus Kas.....	104
Penyusunan Laporan Arus Kas	106
BAB 8 PENDAPATAN.....	109
PengertianPendapatan	109
Pengukuran Pendapatan.....	109
Pengakuan Pendapatan.....	110
Beberapa Isu Lain Terkait Masalah Pengakuan Pendapatan	119
Penyajian dan Pengungkapan.....	127
Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi Jangka Panjang.....	128
BAB 9 AKUNTANSI UNTUK LEASING.....	139
Pengertian Leasing (Sewa)	139
Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Leasing	139
Peraturan Akuntansi Sewa.....	140
Identifikasi Sewa	141
Klasifikasi Sewa	142
Perlakuan Akuntansi	148
Ilustrasi Akuntansi Sewa Berdasarkan PSAK 73.....	150
BAB 10 AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN.....	159
Pengertian Akuntansi Perpajakan	159
Penghasilan Sebagai Objek Pajak.....	160
Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK 46.....	162
Beban Pajak Penghasilan.....	166
BAB 11 AKUNTANSI UNTUK INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF.....	177
Definisi Instrumen Derivatif.....	177
Karakteristik Instrumen Keuangan Derivatif.....	177
Fungsi Instrumen Derivatif.....	179
Manfaat Derivatif.....	179
Tipe <i>trader Derivatif Market</i>	180
Pengakuan dan Pengukuran Instrument Derivatif	181
Jenis-jenis Sekuritas Derivatif	182

BAB 12 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN199
 Analisis Laporan Keuangan 199
 Tujuan Analisis Laporan Keuangan..... 199
 Analisis Rasio Keuangan 200
 Contoh Kasus..... 204

BAB 1

PENGANTAR AKUNTANSI INTERMEDIATE

Asrini A. Saeni, S.E., CFP., M.Sc.

Politenik STIA LAN Makassar

Akuntansi Keuangan dan Standar Keuangan di Indonesia

Akuntansi didefinisikan sebagai pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan (Kieso et al., 2018). Farjaudon & Morales (2013) secara spesifik menjelaskan bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang menghasilkan klasifikasi dan penilaian terhadap sesuatu yang yang dapat dinilai ataupun tidak. Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang menghasilkan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan performa kinerja industri yang akan berguna saat prosedur keputusan ketetapan baik bagi internal maupun eksternal industri (Garrison et al., 2012). Dari tiga definisi ini, akuntansi digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengukur informasi keuangan sehingga berguna dalam pengambilan keputusan bagi penggunanya.

Akuntansi terdiri dari berbagai macam jenis. Buku ini membahas tentang akuntansi keuangan. Menurut Garrison et al. (2012), akuntansi keuangan lebih dispesifikkan pada informasi laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak eksternal, seperti pemegang saham, kreditor, dan regulator. Walaupun penggunaannya berbeda dengan Garrison dkk., Kieso et al. (2018) menyatakan bahwa

akuntansi keuangan berfokus pada laporan keuangan yang menyangkut perusahaan baik untuk internal maupun eksternal. (Hasransyah et al., 2017) menyatakan akuntansi keuangan adalah akuntansi yang spesifik berkait dengan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Menurut Martani et al. (2016), akuntansi keuangan adalah bahasa bisnis yang menghasilkan informasi keuangan yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, akuntansi keuangan lebih berfokus pada bagaimana informasi akuntansi digunakan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan berisi laporan tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu organisasi (Rankin et al., 2023). Kieso et al. (2018) menggambarkan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi utama informasi keuangan yang dibuat oleh manajemen kepada pihak eksternal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baridwan (2021) memberikan definisi tentang laporan keuangan dengan menambahkan jangka waktu, yaitu satu tahun buku.

Dalam pembuatan laporan keuangan, ada standar akuntansi yang mengikat. Di Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia mulai mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional pada tahun 1994. Konvergensi SAK ke *International Financial Reporting Standards* (IFRS) terjadi sebagai akibat butir kesepakatan

Anggota G-20 pada tahun 2009 (IAI, 2022). SAK terakhir yang berkorvangensi dengan IFRS efektif 1 Januari 2022.

Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI) disahkan oleh IAI pada tahun 2022 yang menjelaskan ada empat pilar SAK yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK Internasional. SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat/ SAK Indonesia untuk Entitias Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) (IAI, 2023).

Gambar 1.1.
Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia



Sumber: IAI (2023)

SAK Internasional adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang mengadopsi penuh IFRS yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board*. SAK Indonesia adalah PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI serta peraturan rgeulator pasar modal untuk entitas yang

berada di bawah pengawasannya, sepanjang peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi. SAK Indonesia untuk EP/ SAK Indonesia untuk ETAP adalah SAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang dapat digunakan oleh entitas privat/ entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan dimaksud. SAK Indonesia untuk EMKM adalah SAK yang diterbitkan DSAK IAI yang dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud.

Tabel 1.1.
Jenis Entitas dan Standar Akuntansi Keuangan

Jenis Entitas	SAK Internasional	SAK Indonesia	SAK Indonesia EP/ ETAP	SAK Indonesia untuk EMKM
Entitas dengan Akuntabilitas Publik	√	√	(izin regulator)	(izin regulator)
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik-Besar	-	√	√	-
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik-Mikro, Kecil, dan Menengah	-	√	√	√

Sumber: IAI (2023)

Kerangka Kerja Konseptual Akuntansi

Kerangka kerja konseptual akuntansi merupakan sistem yang mencakup tujuan dan konsep yang melandasi ditetapkan suatu Standar Akuntansi Keuangan. Menurut (Kieso et al., 2018), kebutuhan akan kerangka kerja konseptual itu dilandasi atas dua hal, (1) standar dan aturan harus koheren sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keyakinan pengguna, serta meningkatkan komparabilitas

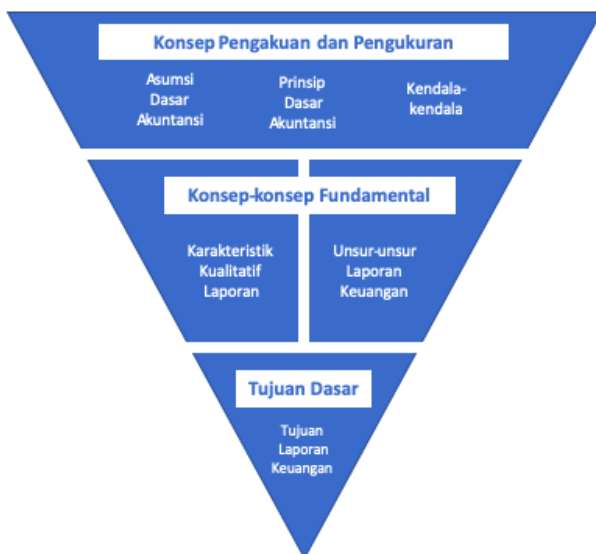
antarlaporan keuangan; (2) masalah praktis kontemporer dapat terselesaikan dengan cepat karena mengacu pada kerangka teori yang ada.

Kerangka kerja konseptual terbagi menjadi tiga tingkatan

1. Tingkatan pertama: tujuan laporan keuangan

Gambar 1.2.

Kerangka Kerja Konseptual Akuntansi



Tingkatan pertama adalah tujuan dan sasaran pelaporan keuangan dalam akuntansi keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang:

- Berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapatkan pemahaman yang memadai dalam pengambilan keputusan;
- Membantu bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat penilaian jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan; dan
- Menggambarkan sumber daya ekonomi.

Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan tidak memberikan informasi yang berorientasi masa depan. Fokus informasi yang diberikan dalam laporan keuangan adalah pada kinerja/posisi masa lalu, dan meskipun informasi tersebut dapat digunakan untuk membuat prediksi, informasi tersebut tidak berorientasi pada masa depan (Rankin et al., 2023).

2. Tingkatan kedua: konsep-konsep fundamental

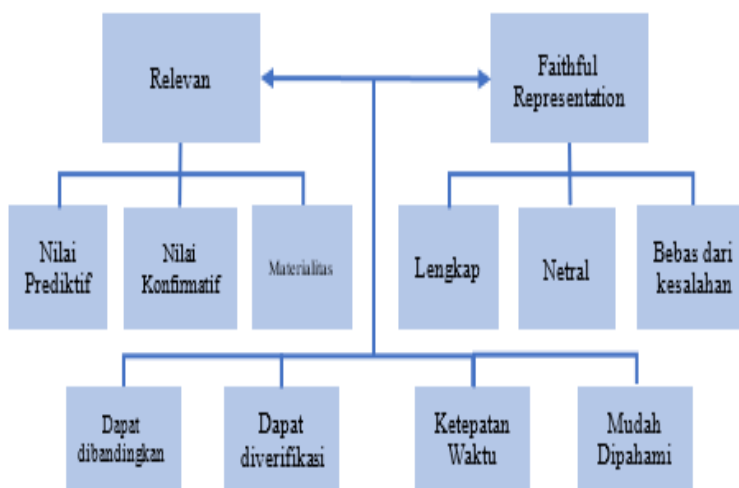
Tingkatan kedua berisi konsep-konsep fundamental yang terdiri dari karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan.

a. Karakteristik kualitatif

Karakteristik kualitatif merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh informasi akuntansi sehingga dapat lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi haruslah memiliki **kriteria utama**, yaitu relevan dan *faithful representation* (representasi yang tepat). Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan itu bisa membuat perbedaan dalam keputusan jika mengandung nilai prediktif, konfirmatori, dan material. Nilai prediktif termuat jika informasi dapat digunakan sebagai masukan untuk memprediksi kejadian di masa depan sedangkan konfirmatori berkaitan dengan

penyediaan umpan balik tentang evaluasi sebelumnya. Untuk nilai materialitas berkaitan dengan informasi keuangan jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum.

Gambar 1.3.
Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan



Sumber: (Kieso et al., 2018)

Representasi yang tepat dari informasi keuangan terjadi jika informasi tersebut merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka, harus merepresentasikan secara tepat substansi dari fenomena. Ada tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Karakteristik lengkap ditujukan agar informasi mencakup seluruh informasi yang diperlukan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Sebuah penggambaran yang netral dimaksudkan informasi tidak

mengandung bias (tidak diarahkan, dibobotkan, ditekankan, dibatalkan penekanannya, atau dimanipulasi) dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Informasi keuangan diharapkan bebas dari kesalahan, yaitu tidak terdapat kelalaian dalam menjelaskan fenomena dan memberikan informasi tanpa kesalahan dalam prosesnya.

Informasi keuangan dapat ditingkatkan kegunaannya jika memenuhi empat unsur yaitu dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, disajikan tepat waktu, dan mudah dipahami. Informasi yang dapat dibandingkan membuat penggunaannya memahami kesamaan atau perbedaan antarpos informasi sehingga dibutuhkan konsistensi dalam penggunaan metode akuntansi. Dalam karakter dapat diverifikasi, informasi dapat diobservasi sehingga dapat mencapai “konsensus” pemahaman. Ketepatan waktu informasi akuntansi mengindikasikan bahwa informasi tersedia pada waktu yang pemakai membutuhkannya dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi juga diharapkan mudah dipahami. Informasi menjadi mudah dipahami ketika informasi itu disusun secara jelas dan ringkas.

b. Unsur-unsur laporan keuangan

Laporan keuangan adalah salah satu produk dari akuntansi yang mengandung informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam kurun waktu satu periode. Laporan keuangan ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen utama laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan

laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan keuangan lengkap berdasarkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2014) terdiri dari:

- 1) laporan posisi keuangan pada akhir periode memiliki tiga bagian yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas;
- 2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode yang menunjukkan kinerja keuangan suatu entitas dengan cara yang berguna bagi banyak pengguna;
- 3) laporan perubahan ekuitas selama periode yang laporan yang menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, jumlah investasi, dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.;
- 4) laporan arus kas selama periode melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan;
- 5) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain dengan susunan yaitu (1) Umum yaitu gambaran umum mengenai profil perusahaan, (2) Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. (3) Penjelasan rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan secara sistematis.;

- 6) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK minimal 1 periode sebelumnya; dan
- 7) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

3. Tingkatan ketiga: konsep pengakuan dan pengukuran

Tingkatan ketiga terdiri dari asumsi dasar, prinsip dasar, dan kendala-kendala. Empat asumsi dasar yang melandasi akuntansi keuangan adalah (1) entitas ekonomi yang menyatakan bahwa aktivitas sebuah entitas dapat dipisahkan antara pemilik dan unit bisnis lain; (2) *going concern* (kelangsungan hidup) menegaskan bahwa entitas yang diangun diharapkan memiliki kelangsungan hidup yang panjang sehingga implikasinya berdampak pada prinsip biaya historisnya; (3) unit moneter mengasumsikan bahwa aktivitas dapat dinilai dalam satuan monete; (4) asumsi periodisitas mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi perusahaan dapat dipisahkan dalam periode waktu tertentu.

Prinsip dasar akuntansi keuangan juga terdiri dari empat prinsip, yaitu biaya historis, pengakuan pendapatan, penandingan, dan pengungkapan penuh. Biaya historis didasarkan pada aset dan liabilitas dilaporkan berdasarkan biaya historisnya. Pengakuan pendapatan mendeskripsikan tentang waktu dalam pendapatan

harus diakui dengan pilihan saat pendapatan itu terealisasi/ dapat direalisasikan atau saat pendapatan telah dihasilkan. Prinsip penandingan didasarkan pada pengakuan beban diakui saat jasa/ produk memberikan kontribusi aktual terhadap pendapatan. Pengungkapan penuh menyiratkan bahwa laporan menyediakan informasi yang memadai dan signifikan yang mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaporan akuntansi adalah perhatian terhadap biaya penyediaan informasi harus diukur terhadap manfaat yang didapatkan oleh penggunaannya. Selain itu, informasi haruslah berdampak terhadap operasi keuangan entitas secara keseluruhan. Informasi akuntansi juga diharuskan mengikuti praktik umum industri yang terkadang melanggar teori dasar. Ditambah lagi dengan prinsip konservatisme dimana pengakuan aset dan laba yang diarahkan lebih rendah jika terdapat keraguan di dalam pengakuannya.

Isu-isu dalam Akuntansi Keuangan

Terdapat beberapa isu dalam akuntansi keuangan. Penetapan standar akuntansi keuangan merupakan produk politis (Kieso et al., 2018). Penelitian Purba & Utami (2018) mengungkapkan pengaruh politik atas penetapan standar sebagai intervensi yang disengaja dalam proses penetapan standar oleh entitas ekonomi dengan tujuan memengaruhi hasil proses tersebut untuk meningkatkan nilai atau kekayaan ekonomi entitas atau mencapai beberapa tujuan yang mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, dewan-dewan standar mendapatkan banyak tekanan untuk mengubah/ membuat standar. Hoesada (2020) menuliskan dalam artikelnya bila makin banyak

kegagalan mekanisme alamiah pasar (*market failure*), makin besar kebutuhan regulasi & produksi informasi untuk menghapus kegagalan mekanisme pasar. Hal ini akan memperparah tekanan ke Dewan Standar Akuntansi.

Selain itu, isu konvergensi standar akuntansi internasional menjadi masalah yang penting. Dalam penelitian Itasari & Kristanto, (2019) disebutkan permasalahan konvergensi yang terjadi misalnya terkait kualitas informasi akuntansi dan meningkatnya asimetri informasi serta manajemen laba. Selain itu, konvergensi IFRS dapat menurunkan tingkat konservatisme akuntansi. Berkaitan dengan audit, konvergensi semakin memperpanjang audit delay, lamanya waktu terbit laporan keuangan serta meningkatnya fee audit. Keempat, adanya hasil yang tidak sesuai dengan tidak adanya perbedaan terhadap *Earnings Response Coefficient* antara setelah dan sebelum konvergensi IFRS.

Permasalahan etika dalam lingkungan akuntansi keuangan juga menjadi isu yang sejak lama terus berkembang. Dilema etis sering sekali terjadi akibat dari penekanan atas memaksimalkan laba dan fokus pada laba jangka pendek. Hal ini membuat akuntan terjebak dalam membuat keputusan sehingga terjerumus dalam konflik. Kondisi ini diperparah lagi dengan munculnya tekanan waktu, kerja, pribadi, dan tekanan lainnya.

Kondisi terbaru adalah bagaimana akuntansi menghadapi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat membantu akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Salah satu perkembangan adalah dengan melibatkan kecerdasan artifisial (AI) dalam sistem informasi

akuntansi keuangan. Pelibatan AI ini membantu mengurangi *human error* dalam secara efektif (Moşteanu, 2019). Akan tetapi, perkembangan ini menuntut kualitas informasi keuangan yang lebih tinggi. Keakuratan data menjadi sesuatu yang dituju. Selain itu, ata keuangan dan informasi sensitif lainnya rentan terhadap serangan siber. Untuk mencegah hal tersebut, akuntan harus menguasai konsep pengamanan data dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi klien dari ancaman siber (Kompasiana.com, 2023). Pembuat regulasi pun harus secara berkala memperbarui aturan dalam melindungi informasi keuangan.

- Baridwan, Z. (2021). *Intermediate Accounting* (9th ed.). UPP STIM YKPN.
- Farjaudon, A.-L., & Morales, J. (2013). In search of consensus: The role of accounting in the definition and reproduction of dominant interests. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(2), 154–171. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.09.010>
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2012). *Managerial Accounting* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Hasransyah, G., Asmapane, S., & Diyanti, F. (2017). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 14(1), 31–39.
- Hoesada, J. (2020, November 1). *Politik Standar Akuntansi*. <https://www.ksap.org/sap/politik-standar-akuntansi/>
- IAI. (2014). *PSAK Umum*. <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/7#gsc.tab=0>
- IAI. (2022). *Sejarah Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Sejarah%20Perkembangan#gsc.tab=0>
- IAI. (2023). *Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia*. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Kerangka%20Standar%20Pelaporan%20Keuangan%C2%A0Indonesia#gsc.tab=0>
- Itasari, R. N., & Kristanto, A. B. (2019). KERUGIAN KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA. *Modus*, 31(1), Article 1. <https://doi.org/10.24002/modus.v31i1.1915>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah: Intermediate Accounting*. Salemba Empat.
- Kompasiana.com. (2023, October 2). *Tantangan dan Peluang Akuntansi di Era Digital*. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/apriliaherlina/6519a48bae1f073d6b50c582/tantangan-dan-peluang-akuntansi-di-era-digital>
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. (2016). *Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK: Buku 1*. Salemba Empat. <https://lib.ui.ac.id>
- Moşteanu, N. R. (2019). International Financial Markets face to face with Artificial Intelligence and Digital Era. *Theoretical and Applied Economics*, XXVI(3(620), Autumn), 123–134.

[https://econpapers.repec.org/article/agrjournl/v_3axxvi_3ay_3a2019_3ai_3a3\(620\)_3ap_3a123-134.htm](https://econpapers.repec.org/article/agrjournl/v_3axxvi_3ay_3a2019_3ai_3a3(620)_3ap_3a123-134.htm)

- Purba, A. S., & Utami, E. R. D. (2018). Dampak proses politik terhadap pembentukan standar akuntansi studi literatur fokus kepada fasb. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.30872/jakt.v15i2.4645>
- Rankin, M., Stanton, P., McGowan, S., & Ferlauto, K. (2023). *Contemporary Issues in Accounting*. John Wiley & Sons. <https://research.monash.edu/en/publications/contemporary-issues-in-accounting-3>

Biodata Penulis

Asrini A. Saeni, S.E., CIFP., M.Sc.



Penulis menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Hasanuddin pada tahun 2011 di bidang Akuntansi. Beliau lalu melanjutkan studi pada bidang *Islamic Finance* pada INCEIF (International Centre for Education in Islamic Finance), Kuala Lumpur dan meraih gelar CIFP (Chartered Islamic Finance Professional) pada tahun 2013. Selanjutnya beliau juga mendapatkan gelar M.Sc dalam bidang akuntansi pada tahun 2016 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau sekarang menjadi Dosen pada Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Makassar Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik sejak tahun 2018.

Email Penulis: asrinisaeni@stialanmakassar.ac.id

BAB 2

ASET LANCAR DAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Fahrul Imam Santoso, M.Ak., Ak., CA.
Universitas Amikom Yogyakarta

Pendahuluan

Aset lancar, atau yang lebih dikenal dengan istilah "current assets" dalam bidang akuntansi, merupakan salah satu komponen yang penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Aset lancar merupakan jenis aset yang dapat dengan mudah diperdagangkan atau dikonversikan menjadi uang tunai dalam periode waktu yang relatif singkat, biasanya dalam satu tahun atau siklus operasional perusahaan. Aset lancar sangat penting dalam menilai likuiditas dan kesehatan keuangan suatu perusahaan, serta menjadi indikator keberhasilan dalam mengelola keuangan perusahaan.

Dalam akuntansi, aset lancar terdiri dari beberapa jenis aset yang memenuhi kriteria likuiditas, yaitu mudah dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Beberapa contoh aset lancar meliputi kas dan setara kas (cash and cash equivalents), piutang usaha, persediaan barang dagang, investasi jangka pendek, dan aset lancar lainnya. Aset lancar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan operasional perusahaan, mulai dari pembiayaan operasional sehari-hari hingga pemenuhan kewajiban-kewajiban jangka pendek.

Sebagai bagian dari laporan keuangan, aset lancar memiliki peran yang sangat signifikan dalam menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Aset lancar yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan lancar, sehingga menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola keuangan dan likuiditasnya. Sebaliknya, aset lancar yang rendah dapat menjadi indikator potensi masalah likuiditas yang dapat menghambat kelangsungan operasional perusahaan.

Pemahaman yang baik mengenai aset lancar dalam akuntansi sangatlah penting bagi para pemangku kepentingan perusahaan, mulai dari pemilik, manajemen, investor, hingga pihak eksternal seperti kreditur dan pemerintah. Dengan memahami peran dan fungsi aset lancar, para pemangku kepentingan dapat lebih memahami kondisi keuangan dan likuiditas perusahaan, serta dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya finansial perusahaan.

Dalam tulisan ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai berbagai aspek terkait aset lancar dalam akuntansi, mulai dari definisi, jenis-jenis, peran, hingga pentingnya dalam laporan keuangan perusahaan. Semua informasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aset lancar serta pentingnya peran aset lancar dalam mengelola keuangan perusahaan secara efektif

Definisi Aset Lancar

Dalam bidang akuntansi, Aset lancar merupakan bagian dari aset (harta) perusahaan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan (neraca). Aset lancar mengacu pada kas, bank, piutang, surat berharga,

persediaan, dan aktiva lancar lainnya yang digunakan selama satu periode akuntansi. Aset lancar adalah salah satu komponen dalam laporan posisi keuangan, selain aset tetap dan aset lainnya. Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dengan komponen aset (harta) di satu sisi dan pasiva (kewajiban dan modal) di sisi lainnya

Jenis-Jenis Aset Lancar

Beberapa jenis aset lancar yang umum terdapat dalam laporan keuangan antara lain:

1. Kas dan setara kas

Aset lancar yang paling likuid adalah kas dan setara kas. Kas mencakup uang tunai di tangan perusahaan serta deposito berjangka pendek dan tabungan yang mudah dicairkan dalam waktu yang singkat.

Kas, yang merupakan bagian aktiva lancar dalam akuntansi, terdiri dari uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk bilyet, giro, cek perjalanan, cek kasir, bank draf, dan *money order*. Dalam penggunaan kas perusahaan, pengendalian terbagi menjadi 2 bagian, yakni:

a. Kas Kecil (*Petty Cash*)

Kas kecil dalam akuntansi mengacu pada dana tunai yang disimpan secara fisik atau digital oleh suatu entitas untuk pengeluaran sehari-hari yang kecil dan rutin. Dana ini biasanya digunakan untuk membayar biaya operasional kecil, seperti pembelian perlengkapan kantor, ongkos transportasi, atau pembelian makanan ringan untuk karyawan. Kas kecil biasanya dikelola oleh departemen

keuangan atau bagian keuangan yang bertanggung jawab untuk melacak pengeluaran dan penerimaan dana tersebut. Peran kas kecil sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Penggunaan kas kecil juga membantu perusahaan dalam memantau arus kas harian dan mengontrol pengeluaran yang tidak direncanakan. Dengan memiliki dana tunai yang tersedia, perusahaan dapat dengan cepat menanggapi kebutuhan mendesak atau kesempatan operasional yang tidak terduga. Dalam akuntansi, kas kecil biasanya dicatat dalam jurnal kas kecil sebagai bagian dari neraca perusahaan. Penting untuk memisahkan kas kecil dari dana operasional utama perusahaan untuk mencegah kebingungan dan menghindari kesalahan dalam pelaporan keuangan.

1) Metode *Imprest Fund System*

Metode ini biasanya diterapkan pada perusahaan atau organisasi yang memiliki kebutuhan akan dana tunai dalam jumlah kecil namun frequent atau rutin. Dengan menggunakan metode *imprest fund system*, pencatatan kas kecil menjadi lebih teratur, efisien, dan transparan. Imprest fund system adalah suatu sistem di mana sejumlah dana kas kecil disediakan terlebih dahulu untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Dana tersebut biasanya diberikan kepada satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kas kecil tersebut. Kemudian, setelah digunakan, dana harus segera dilaporkan dan pertanggungjawabannya diaudit.

Langkah-langkah dalam menggunakan metode imprest fund system dalam pencatatan kas kecil:

a) Penetapan Besaran Dana

Pertama-tama, perlu dilakukan penetapan besaran dana kas kecil yang diperlukan untuk operasional sehari-hari. Besaran dana ini harus memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional tanpa terlalu besar atau terlalu kecil.

b) Penyerahan Dana

Setelah besaran dana ditentukan, dana tersebut diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kas kecil. Dana harus diserahkan dengan berita acara penyerahan dana yang mencantumkan besaran dana, tanggal penyerahan, dan tandatangan penerima dana.

c) Penggunaan Dana

Dana yang diserahkan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap pengeluaran harus didokumentasikan dengan rincian pengeluaran, tanggal pengeluaran, tujuan pengeluaran, dan tanda tangan penerima.

d) Pelaporan dan Audit

e) Setelah dana digunakan, pengelola kas kecil harus segera melaporkan penggunaan dana tersebut kepada pihak yang berwenang. Laporan harus disusun secara teratur dan akurat. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan dana harus

diaudit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

2) Metode Fluktuasi

Metode fluktuasi merupakan metode yang efektif terutama untuk perusahaan yang memiliki volume transaksi kecil dan terbatas. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencatat setiap transaksi kecil secara detail. Metode fluktuasi juga memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada transaksi-transaksi utama yang memiliki dampak besar terhadap keuangan perusahaan.

Meskipun metode fluktuasi dapat memberikan banyak keuntungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini. Pertama, perusahaan harus tetap memperhatikan pengeluaran kas kecil secara cermat dan berkala untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan atau penyalahgunaan dana yang terjadi. Kedua, perusahaan juga perlu membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan penggunaan kas kecil agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahan dalam pencatatan.

Dalam menggunakan metode fluktuasi, perusahaan juga perlu melakukan rekonsiliasi yang rutin antara saldo kas kecil yang sebenarnya dengan saldo kas kecil yang dicatat dalam buku kas kecil. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau perbedaan yang signifikan dalam pencatatan kas kecil.

Contoh Kasus Kas Kecil

PT. Sejahtera menggunakan dana kas kecil untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kecil. Pada awal bulan April 2023, dana kas kecil ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000. Selama bulan April 2023, terjadi transaksi-transaksi berikut:

2 April, membayar biaya pengiriman barang	Rp. 75.000
4 April, membeli perlengkapan kantor	Rp. 250.000
6 April, membayar biaya reparasi mesin	Rp. 400.000
8 April, membayar biaya iklan	Rp. 600.000
10 April, membayar biaya transportasi	Rp. 120.000
12 April, membeli perlengkapan kebersihan	Rp. 180.000
14 April, membayar biaya konsumsi rapat	Rp. 300.000
16 April, membayar biaya sewa gedung	Rp. 750.000
18 April, membeli perlengkapan komputer	Rp. 425.000
20 April, membayar biaya listrik dan air	Rp. 220.000
22 April, membayar biaya pemeliharaan kendaraan	Rp.175.000
24 April, membayar biaya fotokopi	Rp. 95.000
26 April, membayar biaya konsumsi karyawan	Rp. 150.000
28 April, membayar biaya pulsa telepon	Rp. 110.000
30 April, membayar biaya materai	Rp. 50.000

Diminta:

- 1) Buatlah jurnal untuk metode imprest fund system
- 2) Buatlah jurnal untuk metode fluktuasi

Jawab

Jurnal dengan metode Imprest Fund System

Pada awal periode, dibuat jurnal untuk mencatat pembentukan dana kas kecil:

Kas Kecil Rp. 3.000.000

 Kas Rp. 3.000.000

Pada akhir periode, dibuat jurnal untuk mencatat pengeluaran kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil:

Biaya Pengiriman Rp. 75.000

Perlengkapan Kantor Rp. 250.000

Biaya Reparasi Rp. 400.000

Biaya Iklan Rp. 600.000

Biaya Transportasi Rp. 120.000

Perlengkapan Kebersihan Rp. 180.000

Biaya Konsumsi Rapat Rp. 300.000

Biaya Sewa Gedung Rp. 750.000

Perlengkapan Komputer Rp. 425.000

Biaya Listrik dan Air Rp. 220.000

Biaya Pemeliharaan Rp. 175.000

Biaya Fotokopi Rp. 95.000

Biaya Konsumsi Rp. 150.000

Biaya Pulsa Telepon Rp. 110.000

Biaya Materai Rp. 50.000

 Kas Kecil Rp. 3.000.000

 Kas Rp. 900.000

Jurnal dengan metode Fluktuasi

Pada setiap transaksi pengeluaran kas kecil, dibuat jurnal:

2 April

Biaya Pengiriman Rp. 75.000

Kas Kecil	Rp. 75.000
4 April	
Perlengkapan Kantor	Rp. 250.000
Kas Kecil	Rp. 250.000
6 April	
Biaya Reparasi	Rp. 400.000
Kas Kecil	Rp. 400.000
... (jurnal untuk transaksi 8-15)	
30 April	
Biaya Materai	Rp. 50.000
Kas Kecil	Rp. 50.000

Pada akhir periode, jika saldo kas kecil kurang dari yang ditetapkan, dibuat jurnal pengisian kembali:

Kas Kecil	Rp. 900.000
Kas	Rp. 900.000

Atau jika saldo kas kecil lebih dari yang ditetapkan, dibuat jurnal pemindahbukuan kelebihan ke kas:

Kas	Rp. 900.000
Kas Kecil	Rp. 900.000

Laporan Perhitungan Fisik Kas Kecil

Tujuan laporan perhitungan fisik kas kecil adalah untuk memastikan keakuratan dan keabsahan dari transaksi keuangan yang dilakukan dalam bentuk tunai di perusahaan. Laporan ini juga bertujuan untuk memonitor dan mengendalikan pengeluaran kas kecil agar tetap sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui.

Berikut contoh laporan perhitungan fisik kas kecil sebagai berikut:

Nominal Pecahan	Jumlah Lembar	Jumlah Saldo
100.000	7	700.000
50.000	5	250.000
20.000	4	80.000
5.000	4	20.000
2.000	8	16.000
1.000	5	5.000
		1.071.000

Jika terjadi selisih kas kecil pada saat *Cash Opname* maka perlu dilakukan penjurnalan, dengan melihat dari sisi letak selisih kas tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Selisih Kas	xxx
Kas	xxx

b. Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan catatan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank. Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan perusahaan telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh bank.

Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya rekonsiliasi bank antara lain:

- 1) Adanya perbedaan antara transaksi yang tercatat dalam buku bank dengan transaksi yang tercatat dalam buku kas perusahaan.
- 2) Adanya perbedaan dalam periode pencatatan. Perbedaan dalam periode pencatatan dapat terjadi jika transaksi tercatat dalam buku bank tetapi belum tercatat dalam buku kas perusahaan karena perbedaan dalam waktu pencatatan.
- 3) Adanya kesalahan pencatatan baik dalam buku bank maupun buku kas perusahaan.

Contoh Kasus Rekonsiliasi Bank

PT. Makmur memiliki rekening giro di Bank Mandiri. Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo rekening giro menurut catatan perusahaan adalah Rp. 45.000.000, sedangkan rekening koran dari bank menunjukkan saldo Rp. 48.500.000. Setelah diselidiki, ternyata terdapat perbedaan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1) Setoran dari pelanggan pada tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp. 2.500.000 belum dicatat oleh bank.
- 2) Cek No. 201 untuk pembayaran utang usaha sebesar Rp. 800.000 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2023 belum dicatat oleh perusahaan.
- 3) Penerimaan pendapatan bunga dari bank sebesar Rp. 150.000 belum dicatat oleh perusahaan.
- 4) Biaya administrasi bank untuk bulan Maret 2023 sebesar Rp. 75.000 belum dicatat oleh perusahaan.

- 5) Cek No. 203 untuk pembayaran beban iklan sebesar Rp. 500.000 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2023 masih belum dicatat oleh bank.

Jawab:

Laporan Rekonsiliasi Bank PT Makmur Per 31 Maret 2023	
Saldo rekening giro menurut catatan bank: Rp 48.500.000	Saldo rekening giro menurut catatan perusahaan Rp 45.000.000
Ditambah:	Ditambah:
1) Setoran dari pelanggan belum dicatat bank Rp 2.500.000 2) Saldo rekening giro yang disesuaikan Rp 51.000.000	1) Penerimaan pendapatan bunga belum dicatat perusahaan Rp 150.000 2) Cek No. 203 belum dicatat bank Rp 500.000
Dikurangi:	
1) Cek No. 201 belum dicatat perusahaan (Rp 800.000)	
2) Biaya administrasi bank belum dicatat perusahaan (Rp 75.000)	
Saldo rekening giro yang disesuaikan Rp 50.125.000	Saldo rekening giro yang disesuaikan Rp 50.125.000

Dari laporan rekonsiliasi bank di atas, dapat dilihat bahwa saldo rekening giro yang disesuaikan baik menurut catatan bank maupun catatan perusahaan adalah sama, yaitu Rp. 50.125.000.

2. Piutang

Piutang merupakan tagihan yang harus diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Piutang biasanya memiliki jangka waktu pembayaran tertentu dan masih berada dalam proses pengumpulan.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar yang termasuk barang-barang yang masih berada di gudang dan belum terjual. Persediaan merupakan bagian penting dalam perusahaan manufaktur dan perdagangan karena mempengaruhi arus kas perusahaan.

4. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi dalam bentuk surat berharga yang akan dicairkan dalam jangka waktu satu tahun. Investasi ini dapat berupa saham, obligasi, atau deposito berjangka.

5. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka merupakan pembayaran yang telah dilakukan namun belum direalisasikan. Contohnya adalah biaya asuransi yang sudah dibayar untuk beberapa bulan kedepan atau biaya sewa yang telah dibayar di muka.

Pengertian Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merujuk kepada investasi yang memiliki periode waktu relatif singkat, biasanya kurang dari satu tahun. Tujuan dari investasi jangka pendek adalah untuk memperoleh keuntungan dalam waktu yang singkat tanpa harus mengikat dana untuk jangka waktu yang panjang. Investasi jangka pendek umumnya dilakukan dengan menggunakan aset lancar atau likuid, yang dapat dengan cepat

diubah menjadi uang tunai jika diperlukan. Contoh aset lancar yang sering digunakan dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka, obligasi jangka pendek, dan reksa dana pasar uang. Dengan menggunakan aset lancar, investor dapat memaksimalkan likuiditas dan fleksibilitas dalam mengelola investasinya dalam jangka waktu singkat. Investasi jangka pendek menggunakan aset lancar untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat tanpa mengikat dana untuk jangka waktu yang lama.

Syarat yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat dikategorikan sebagai aset lancar atau likuid dalam investasi jangka pendek antara lain:

1. Aset tersebut dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan tanpa kerugian signifikan.
2. Aset tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo yang relatif singkat, biasanya kurang dari satu tahun.
3. Aset tersebut memiliki risiko yang relatif rendah.
4. Aset tersebut memiliki potensi keuntungan yang stabil.

Surat berharga yang memenuhi syarat tersebut maka dapat digunakan sebagai instrumen investasi dalam jangka pendek. Surat-surat berharga yang dimiliki untuk tujuan investasi jangka pendek, meskipun jangka waktu kepemilikannya bisa singkat atau agak lama, tetap dikelompokkan sebagai aktiva lancar dalam neraca. Hal ini karena surat-surat berharga tersebut merupakan sumber uang yang segera dapat dikonversi menjadi kas.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Et Al (2023). Studi Literatur: Pengaruh Working Capital Terhadap Aset Dan Liabilitas Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati (JRAMM). Vol 12, No.13.
- Bagus, S. (2018). Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang.
- Karima, Z.A. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
- Muchtarom, R. (2018). PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP PT PANCA DUTA KARYA ABADI DI SURABAYA.
- Amroni, A., Hatta, M., & Tianah, A. (2017). PENGEMBANGAN SISTEM PENCATATAN PENGELUARAN DANA KAS KECIL METODE IMPREST FUND SYSTEM BERBASIS KOMPUTER DI STMIK CIC CIREBON.
- Pasaribu, P.A. (2022). Penerapan Petty Cash Dengan Metode Imprest Fund Pada STPK Matauli Tapanuli Tengah. Jurnal Manajemen Riset Inovasi.
- Piskatari, L. (2012) Pengelolaan Dana Kas Kecil Dengan Menggunakan Metode Fluktuasi Pada Cv. Prima Mitra Sejahtera.
- Apriliani, S. (2014). Perancangan Sistem Informasi Pengeluaran Kas Kecil Menggunakan Metode Fluktuasi Pada Mebeul Tiga Dara.
- Japminto, F. (2018). Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Pembukuan Dan Rekonsiliasi Bank Dengan Algoritma Forward Chaining (Studi Kasus: PT Jurnal Consulting Indonesia).
- Sudirman, B., & Trisianti, M. (2022). Sistem Informasi Pengendalian Kas Bank Dengan Metode Rekonsiliasi Pada CV. Lisa Pratama Berbasis Client-Server. MEANS (Media Informasi Analisa Dan Sistem).
- Hani, N. (2018). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJAKEUANGAN PERUSAHAAN RITEL YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA.
- Kristina, H. (2010). Pengaruh Komponen Pembentuk Modal Kerja Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2005-2008.

Biodata Penulis

Fahrul Imam Santoso, S.E., M.Ak., AK., CA., C.FR., C.FTax



Penulis tertarik terhadap ilmu Akuntansi sejak 2006. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Islam Indonesia pada Fakultas Ekonomi tahun 2006 dan diselesaikan pada tahun 2010. Pendidikan strata 2 penulis di kampus yang sama pada Pasca Sarjana Magister Akuntansi pada tahun 2011 dan diselesaikan pada tahun 2013. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja pada perusahaan swasta nasional PT. Tigaraksa Satria, Tbk sebagai Credit Analyst dari 2013 hingga 2015. Sejak 2016 penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi (Universitas Amikom Yogyakarta). Penulis juga aktif sebagai konsultan Manajemen dan Keuangan pada lembaga Arfa Consultant yang didirikannya. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi (Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan, Akuntansi Syariah, dan Akuntansi Keuangan). Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku sebagai upaya kontribusi keilmuan kepada bangsa dan negara.

Email Penulis: fahrulimamsantoso@gmail.com

BAB 3

PENDAPATAN, PENERIMAAN YANG BELUM DITERIMA, DAN PENERIMAAN DIMUKA

Regina Beatrix Takakobi, S.E., M.A.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra

Pendahuluan

Pendapatan dalam satu entitas atau organisasi bisa diperoleh dari berbagai sumber tergantung jenis perusahaan tersebut, seperti penjualan produk atau jasa, pendapatan bunga, dividen atau pendapatan lainnya yang mungkin terkait dengan operasi bisnisnya. Hal ini dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan bisa menjadi indikator penting bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengevaluasi kinerja bisnis.

Pendapatan sering kali dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Ada pendapatan operasional dan non operasional atau berdasarkan sumbernya, seperti pendapatan dari penjualan atau pendapatan dari investasi. Dengan melihat pendapatan mampu membantu manajemen bahkan investor untuk memahami komposisi dan tren pendapatan perusahaan, serta memperkirakan keuangan perusahaan dimasa depan.

Dalam akuntansi ada penerimaan yang belum diterima (*accrued revenue*), Penerimaan dimuka (Prepaid Revenue) dan Pendapatan (revenue). Untuk Penerimaan yang belum diterima dan Penerimaan

dimuka jenis akun ini perlu melakukan penyesuaian. Jika tahapan ini tidak dilakukan dalam satu periode waktu, maka akan berdampak pada akun lainya dalam laporan keuangan akan dicatat terlalu besar bahkan terlalu kecil, sehingga laporan keuangan yang disajikan kepada manajemen ataupun investor.

Pendapatan

Pendapatan ialah jumlah yang diterima atau diharapkan diterima oleh suatu entitas dalam satu periode akuntansi sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa. Berikut adalah definisi pendapatan menurut beberapa ahli terkemuka:

1. *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*
Arus kas atau pengurangan dalam kewajiban yang timbul dari aktivitas pemenuhan barang atau jasa dalam kegiatan utama perusahaan.
2. *Financial Accounting Standards Board (FASB)*
Peningkatan ekuitas perusahaan yang timbul dari aktivitas usaha yang berlanjut dari perusahaan, selain kontribusi pemilik.
3. *Internatiolan Accounting Standards Board (IASB)*
Sebagai kenaikan manfaat ekonomi yang timbul selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan asset atau pengurangan kewajiban yang mengarah pada peningkatan ekuitas, selain kontribusi pemilik.
4. *American Accounting Association (AAA)*
Pengakuan kenaikan kekayaan bersih yang terkait dengan aktivitas utama perusahaan, yang terjadi sebagai hasil dari penjualan barang, jasa atau penggunaan asset perusahaan lainnya.

Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan salah satu konsep fundamental dalam akuntansi yang menggambarkan aliran ekonomi dari aktivitas bisnis suatu entitas. Hal ini mencerminkan peningkatan kekayaan bersih perusahaan melalui penjualan barang, jasa atau penggunaan asset lainnya, dan merupakan faktor kunci dalam mengevaluasi kinerja keuangan sebuah perusahaan.

Konsep Penandingan

Pada saat menyajikan laporan keuangan, akuntan harus berasumsi bahwa umur bisnis dapat dikelompokkan kedalam berbagai periode waktu. Dengan menggunakan konsep periode akuntansi, akuntan harus menentukan dalam periode mana pendapatan dan beban yang terjadi akan dilaporkan. Pada akhir tiap periode perusahaan harus menyusun laporan keuangan. Periode akuntansi itu terhitung tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Hal ini sesuai dengan penentuan periode tahun fiskal (tahun pajak), sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penyesuaian terhadap laporan pajak nya. Namun perusahaan dapat membuat periode akuntansi yang berbeda dari itu. Penentuan periode akuntansi juga dapat ditentukan oleh manajemen sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Jika manajemen ingin segera mengetahui perkembangan perusahaan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, maka akuntan dapat menyusun laporan keuangan sebelum berakhirnya periode akuntansi, dapat disusun setiap akhir bulan atau setiap akhir kwartal (laporan keuangan interim). Penetapan periode akuntansi akan berpengaruh terhadap laba periodik. Pengaruh ini dapat terlihat dalam penerapan prinsip penandingan (*matching principal*).

Untuk melaporkan pendapatan dan beban perusahaan dapat menggunakan dasar kas (cash basis) atau dasar akrual (accrual basis) dalam akuntansi. Pada dasar kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode dimana kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pengakuan dan pencatatan dilakukan apabila pendapatan dan biaya benar-benar diterima atau dikeluarkan dalam bentuk uang tunai. Misalnya pendapatan jasa dicatat ketika kas diterima dari pelanggan atau beban upah dicatat ketika kas dibayarkan kepada karyawan. Dengan menggunakan dasar kas (cash basis), laba atau rugi bersih merupakan selisih antara penerimaan kas atau pendapatan dan pengeluaran kas atau beban.

Konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait dengan periode yang sama disebut konsep penandingan atau prinsip penandingan (*matching principle*). Dalam konsep ini laporan laba rugi akan dilaporkan laba atau rugi untuk periode tersebut. Prinsip dasar akuntansi Indonesia menghendaki agar perusahaan menggunakan dasar akrual, hal ini juga sesuai dengan aturan aturan perpajakan, berarti bahwa pendapatan harus diakui pada saat pendapatan diperoleh dan biaya diakui pada saat biaya itu terjadi. Menggunakan dasar akrual akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap, sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan untuk menilai kesehatan keuangan dalam dasar akrual adalah periode akuntansi, prinsip pendapatan dan prinsip mempertandingan.

Metode Pencatatan Pendapatan

Ada dua metode yang dipakai untuk mencatat pendapatan yakni metode akrual (*Accrual Basic*) dan Metode kas (*Cash Basic*).

1. **Metode Akrual**

Metode ini yang lebih sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) dan *International Financial Reported Standard* (IFRS), mengakui pendapatan ketika transaksi terjadi atau pendapatan diperoleh, tanpa memandang kapan uang kas atau setara kas diteirima. Dengan kata lain, pendapatan diakui pada saat perusahaan menyampaikan barang atau jasa kepada pelanggan, bahkan jika pembayaran belum diterima. Ini mencerminkan kinerja keuangan perusahaan lebih akurat, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pendapatan dan beban selama periode tertentu.

2. **Metode Kas**

Dalam metode kas pengakuan pendapatan hanya ketika uang tunai diterima dari pelanggan, tanpa memandang kapan barang atau jasa sebenarnya disampaikan. Pendekatan ini lebih sederhana dan lebih mudah dikelola, terutam untuk bisnis kecil dan menengah atau individu yang tidak memiliki transaksi kompleks. Namun, metode ini mungkin tidak selalu memberikan gambaran akurat tentang kinerja keuangan perusahaan, karena pendapatan ataupun beban mungkin tidak dicatat dalam periode yang sama dengan kegiatan ekonomi yang sebenarnya terjadi.

Ada beberapa kriteria pengakuan pendapatan berdasarkan PABU dan IFRS yakni pendapatan harus memenuhi kriteria berikut sebelum dapat di akui:

1. *Pengiriman telah terjadi atau layanan telah diberikan:* Entitas telah menyelesaikan sebagian besar atau semua kewajiban yang diharapkan dalam perjanjian dengan pembeli

2. *Kemungkinan manfaat ekonomi*: hal ini berkaitan dengan transaksi yang terjadi dari konsumen ke perusahaan, ada pembayaran tunai atau secara kas
3. *Pendapatan dapat diukur dengan andal*: Jumlah pendapatan yang dihasilkan dari transaksi dapat diukur dengan andal
4. *Biaya dapat diukur dengan andal*: Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal.

Pemilihan metode pencatatan pendapatan tergantung pada kebijakan akuntansi perusahaan, jenis industri, dan persyaratan pelaporan keuangan yang berlaku. Namun metode akrual umumnya lebih banyak dipakai karena lebih mampu memberikan gambaran keuangan yang lebih lengkap dan akurat.

Sifat Proses Penyesuaian

Ketika periode akuntansi berakhir, maka saldo buku besar dapat dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa perubahan. Misalnya saldo akun kas, jumlah yang biasanya dilaporkan dalam neraca adalah langsung jumlah yang terdapat pada buku besar kas. Namun terdapat beberapa perkiraan atau akun buku besar yang perlu penyesuaian.

Ada empat jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu:

1. Beban Dibayar Dimuka
2. Pendapatan diterima dimuka
3. Pendapatan yang masih akan diterima
4. Beban yang masih harus dibayar

Beban dibayar di muka beban dibayar dimuka (*Prepaid Expenses*) adalah beban yang akan datang yang awalnya dicatat sebagai asset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya belum diterima. Asset ini kemudian berubah menjadi beban seiring dengan berlalunya waktu atau melalui kegiatan normal usaha.

Beban yang masih harus dibayar (*accured Expenses*) adalah beban yang telah terjadi, tetapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Upah yang sudah waktunya dibayar kepada karyawan pada akhir periode, tetapi belum dibayarkan kepada karyawan pada akhir periode, tetapi belum dibayarkan adalah beban yang masih harus dibayar.

Dalam bab ini untuk pendapatan yang masih akan diterima atau penerimaan yang belum diterima dan pendapatan diterima dimuka atau penerimaan dimuka akan dijelaskan secara rinci dan terpisah beserta dengan contoh transaksi pada sub bab berikut. Dikarenakan pada bab ini lebih fokus membahas terkait pendapatan.

Penerimaan yang Belum Diterima

Pendapatan yang belum diterima (*accured revenues*) adalah pendapatan yang telah dihasilkan, tetapi kas belum diterima. Biaya untuk jasa pengacara atau jasa dokter yang telah diberikan namun ditagihkan disebut sebagai pendapatan yang belum diterima.

Sebagai ilustrasinya adalah sebagai berikut: PT. ABC memiliki pelanggan sebut saja Amir, pada tanggal 15 Desember menandatangani perjanjian dengan Budi dimana PT.ABC akan menagih Budi setiap bulan untuk jasa yang diberikan dengan harga Rp.20.000,- per jam. Sejak tanggal 16 sampai 31 Desember, Amir memberikan 25 jam layanan kepada Amir. Meskipun pendapatan sejumlah Rp.500.000,-

(25 Jam x Rp. 20.000,-) telah terjadi dan berhak diperoleh, pendapatan ini tidak akan ditagih sampai 15 Januari. Demikian pula dengan kas, kas tidak akan diperoleh sampai Budi membayar tagihan. Dengan demikian, uang sejumlah Rp.500.000,- masuk ke penerimaan yang belum diterima dan pendapatan jasa senilai Rp.500.000,- harus dicatat pada jurnal penyesuaian pada 31 Desember.

Contoh lain dari penerimaan yang belum diterima adalah piutang bunga atas wesel tagih dan piutang sewa atas bangunan yang disewakan kepada orang lain. Berikut ringkasan karakteristik penerimaan yang belum diterima.

Tabel 3.1.
Ringkasan Penerimaan yang belum diterima

Transaksi	Pendapatan telah diterima tapi belum dicatat
Analisis:	Pendapatan telah diterima tapi penerimaan belum dicatat atau belum ada kas yang diterima. Belum ada jurnal uang dicatat walaupun pendapatan telah diterima.
Ayat Jurnal	Tidak ada
Dampak	Tidak ada
Penyesuaian	Pada Akhir Periode, penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang masih akan diterima. Jurnalnya: (Debit) Piutang Usaha, (Kredit) Pendapatan Jasa

Penerimaan Dimuka

Penerimaan dimuka atau pendapatan diterima dimuka (Unearned Revenues) ialah penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas atau kewajiban ketika kas diterima. Penerimaan dimuka ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha.

Sebagai ilustrasi, transaksi dari PT.ABC pada tanggal 1 Desember menerima Rp. 360.000,- dari pelanggan atas sewa bangunan untuk tiga bulan. Untuk pendapatan sewa diterima di muka senilai Rp. 24.000.000,-. Pada akhir Desember, hanya Rp.6.000.000,- dari Pendapatan sewa diterima dimuka yang dicatat sebagai pendapatan sewa, menggunakan jurnal penyesuaian. Sisa pendapatan sewa diterima di muka, Rp.18.000.000,- akan menjadi pendapatan di tahun berikutnya. Dengan demikian Rp.6.000.000,- adalah pendapatan bulan Desember dan harus dicatat di jurnal penyesuaian.

Contoh lain adalah uang kuliah yang diterima dimuka oleh kampus, biaya pelayanan tahunan yang diterima oleh pengacara, premi yang diterima di muka oleh asuransi, dan uang berlangganan majalah yang diterima di muka oleh penerbit majalah. Berikut di tabel 3.2 ada ringkasan karakteristik penerimaan dimuka.

Tabel 3.2.
Ringkasan Penerimaan yang belum diterima

Transaksi	Kas diterima sebagai pendapatan diterima dimuka
Analisis:	Penerimaan dimuka untuk suatu pendapatan yang akan diberikan di catat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Transaksi ini dicatat sebagai debit akun kas dan kredit akun pendapatan diterima dimuka.
Ayat Jurnal	Kas (Debit), Pendapatan diterima dimuka (Kredit)
Dampak	Aset (kas) Bertambah dan Ekuitas pemilik (Pendapatan dibayar dimuka) bertambah
Penyesuaian	Pada suatu akhir periode, penyesuaian diperlukan untuk memperbaharui akun pendapatan diterima dimuka
Analisis	Akun pendapatan diterima dimuka (Debit) sejumlah yang menjadi pendapatan atau jasanya telah diberikan akan akun pendapatan terkait meningkat (Kredit)
Ayat Jurnal penyesuaian	Pendapatan diterima dimuka (Debit), Pendapatan (Kredit)

DAFTAR PUSTAKA

- Fenty, F (2020) Pengantar Dasar Akuntansi: Teknik dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan. Buku 1. Muhamadiyah Univeristy Press. Surakarta
- Garyanti, S (2022) Akuntansi Menengah. Edisi. PT. REfika Aditma. Bandung
- Martani, D. Sireger, S. & Wardhani. R (2021). Akuntansi keuangan Memengah Berbasis PSAK. Jillid 2. Salemba Empat. Yogyakarta
- Tjandrakirana.R, Ernadiani & Budiman, A.I (2021) Pengantar Akuntansi 1. CV. Amanah. Palembag

Biodata Penulis

Regina Beatrix Takakbi, S.E., M.A.



Penulis tertarik dengan akuntansi sejak dari tahun 2006 berlanjut sampai saat ini. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Klabat Airmadidi Minahasa Utara pada Fakultas ekonomi jurusan akuntansi mulai tahun 2006 dan menyelesaikan studi S1 pada tahun 2010. Pendidikan strata 2 penulis di universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2015 serta menyelesaikan studi pada tahun 2017. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja ±4 tahun di beberapa perusahaan swasta yang ada di Manado Sulawesi utara. Namun saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra). Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi (Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan dan Perpajakan). Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi pembaca serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: reginatakakobi@stiepetrabitung.ac.id

BAB 4

ASET TETAP DAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Nur Jannah Abdi Aziz, S.E., M.Ak.
Universitas Siliwangi

Konsep Dasar Aset Tetap dan Investasi Jangka Panjang

Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen seperti tanah, bangunan, gedung, dan peralatan. Aset tetap digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi, baik itu barang atau jasa. Tujuan dari mempunyai aktiva tetap adalah bukan untuk dijual lagi, namun digunakan untuk operasional perusahaan. Aset tetap bisa dijual oleh perusahaan apabila masa ataupun umur manfaat dari aset itu sudah mulai habis, rusak, dan bermasalah. Adapun Karakteristik dari aset tetap antara lain:

1. Masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun. Aset tetap digunakan dalam operasional bisnis untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu yang lebih lama.
2. Tidak likuid. Aset tetap tidak diharapkan untuk dijual atau dikonsumsi dalam periode waktu yang singkat.
3. Nilai ekonomi yang signifikan. Aset tetap memiliki nilai yang cukup besar dan memberikan kontribusi dalam menciptakan nilai bagi perusahaan.

4. Dapat disusutkan. Aset tetap biasanya mengalami penyusutan nilai seiring berjalannya waktu, yang mencerminkan penggunaannya dalam operasional bisnis.

Investasi jangka panjang merupakan investasi dimana daya yang digunakan akan dijalankan terus menerus dan baru bisa dicairkan. Investasi jangka panjang dapat dikatakan seperti menanam kekayaan atau modal dari seseorang atau sebuah perusahaan guna mendapat penghasilan tetap. Karakteristik dari investasi jangka panjang antara lain:

1. Masa penanaman modal yang lebih lama. Investasi jangka panjang memiliki jangka waktu penanaman modal yang lebih lama dibandingkan dengan investasi jangka pendek.
2. Tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi jangka panjang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dalam jangka waktu yang lebih lama.
3. Risiko dan imbal hasil yang lebih tinggi. Investasi jangka panjang umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi jangka pendek, namun juga memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi.
4. Diversifikasi portofolio. Investasi jangka panjang seringkali melibatkan diversifikasi portofolio, yaitu penyebaran investasi dalam berbagai instrumen keuangan untuk mengurangi risiko.

Investasi jangka panjang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi, seperti:

1. Pinjaman yang disalurkan
2. Penyertaan modal
3. Investasi dalam saham

4. Investasi dalam surat utang

Berikut ini tabel perbedaan antara aset tetap dan investasi jangka Panjang:

Perbedaan	Aset Tetap	Aset Investasi Jangka Panjang
Tujuan Penggunaan	Digunakan dalam operasi bisnis untuk produksi barang atau layanan.	Dimiliki sebagai bagian dari portofolio investasi untuk mendapatkan keuntungan.
Umur Manfaat	Umumnya memiliki umur manfaat yang panjang, digunakan selama beberapa tahun hingga dekade.	Umur manfaat bervariasi tergantung pada jenis investasi, dapat dipegang selama beberapa tahun hingga dekade.
Sifat Penilaian	Penilaian biasanya didasarkan pada biaya perolehan dan metode penyusutan.	Penilaian mungkin melibatkan nilai pasar atau nilai wajar, tergantung pada jenis investasi.
Penggunaan	Digunakan langsung dalam operasi bisnis untuk menghasilkan pendapatan.	Tidak digunakan dalam operasi bisnis, dimiliki untuk tujuan investasi jangka panjang.
Contoh	Tanah, gedung, peralatan, mesin.	Saham, obligasi, kepemilikan dalam asosiasi.

Dalam setiap langkah bisnis, keputusan yang diambil oleh manajemen sangat bergantung pada informasi keuangan yang akurat dan relevan. Di tengah kompleksitas dunia bisnis, penilaian yang tepat dan pengakuan yang akurat atas aset dan kewajiban perusahaan menjadi krusial dalam menyediakan dasar yang kokoh bagi laporan keuangan yang dapat dipercaya. Penilaian yang akurat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga

mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pentingnya penilaian dan pengakuan yang tepat dalam akuntansi menjadi landasan yang esensial bagi kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan.

Kerangka Regulasi Akuntansi

Standar pertama yang menjadi patokan dari pengelolaan keuangan adalah PSAK-IFRS. Ini merupakan prosedur akuntansi untuk kemudian perusahaan gunakan pada berbagai kegiatan bisnisnya. Untuk lebih memahaminya, berikut penjelasan selengkapnya.

PSAK-IFRS merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (International Reporting Standards). Ini adalah dasar pengelolaan yang terbit dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2012 melalui sebuah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Penggunaan dari standar ini mempunyai alasan karena Indonesia merupakan negara yang masuk ke dalam anggota IFAC (International Federation Accountants). Sejumlah manfaat dari pedoman itu antara lain, meningkatkan daya banding serta memberikan informasi berkualitas pada pasar modal.

Prinsip-prinsip Dasar dalam Mengakui Aset Tetap dan Investasi Jangka Panjang

Prinsip-prinsip dasar dalam mengakui aset tetap dan investasi jangka panjang meliputi beberapa konsep kunci yang penting untuk dipahami dalam konteks akuntansi:

1. Pengakuan: Prinsip ini mengarah pada proses mengidentifikasi dan mencatat aset tetap dan investasi jangka panjang dalam laporan keuangan perusahaan. Pengakuan terjadi ketika aset

- tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK dan IFRS.
2. Pengukuran: Prinsip ini menentukan nilai yang digunakan untuk mencatat aset tetap dan investasi jangka panjang dalam laporan keuangan. Pengukuran dapat dilakukan berdasarkan biaya perolehan, nilai wajar, atau nilai tercatat, tergantung pada konteks transaksi atau kebutuhan informasi manajemen.
 3. Penyusutan: Aset tetap cenderung mengalami penurunan nilai seiring waktu karena penggunaannya dalam operasi bisnis. Prinsip penyusutan memandu bagaimana perusahaan mengalokasikan biaya aset tetap tersebut ke dalam periode akuntansi yang relevan, dengan menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 4. Pengujian Penurunan Nilai: Ketika nilai aset tetap atau investasi jangka panjang dianggap tidak lagi dapat dipulihkan, prinsip ini memerlukan pengujian untuk menentukan apakah ada penurunan nilai yang perlu dicatat dalam laporan keuangan. Hal ini memastikan bahwa nilai aset tersebut tercermin dengan benar dalam neraca perusahaan.
 5. Pengungkapan: Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi terkait dengan aset tetap dan investasi jangka panjang. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dengan baik posisi keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat.

Penilaian Aset Tetap

Metode penilaian aset tetap merupakan landasan yang penting dalam akuntansi untuk menentukan nilai aset yang dimiliki perusahaan. Tiga metode penilaian yang umum digunakan adalah biaya historis, biaya perolehan, dan nilai wajar.

1. **Biaya Historis:** Metode ini mencatat nilai aset berdasarkan biaya yang terjadi pada saat aset tersebut diperoleh. Nilai yang dicatat adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk membeli, mengirim, dan memasang aset tersebut. Meskipun mudah dipahami dan diterapkan, metode ini mungkin tidak mencerminkan nilai aktual aset saat ini karena tidak memperhitungkan perubahan nilai seiring waktu.
2. **Biaya Perolehan:** Metode ini mencatat nilai aset berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Biaya perolehan mencakup biaya pembelian aset, biaya pengiriman, pajak, dan biaya lainnya yang terkait dengan persiapan aset untuk digunakan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang investasi yang dikeluarkan untuk aset tetap.
3. **Nilai Wajar:** Metode ini menilai nilai aset berdasarkan harga yang mungkin diperoleh dalam transaksi pasar normal di antara pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa adanya tekanan untuk menjual atau membeli. Penilaian nilai wajar dapat melibatkan penilaian pasar, penilaian independen, atau menggunakan model penilaian tertentu. Meskipun memberikan gambaran nilai aktual yang lebih realistis, nilai wajar mungkin sulit untuk ditentukan dengan akurat.

Contoh Kasus:

Perusahaan ABC membeli mesin produksi baru untuk digunakan dalam lini produksinya. Mesin tersebut memiliki harga pembelian sebesar Rp 500 juta dan biaya pengiriman sebesar Rp 20 juta. Setelah tiba di lokasi perusahaan, mesin tersebut memerlukan biaya pemasangan sebesar Rp 15 juta. Perusahaan ABC memperkirakan umur manfaat mesin tersebut adalah 5 tahun.

Solusi:

1. Penggunaan Metode Biaya Historis

Jika perusahaan ABC menggunakan metode biaya historis untuk menilai mesin produksi. Maka nilai aset tersebut dalam catatan akuntansi adalah Rp 535 juta (Rp 500 juta pembelian + Rp 20 juta biaya pengiriman + Rp 15 juta biaya pemasangan).

2. Penggunaan Metode Biaya Perolehan

Jika perusahaan ABC memilih untuk menggunakan metode biaya perolehan, nilai asetnya juga akan dicatat sebesar Rp 535 juta, karena biaya perolehan mesin tersebut adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

3. Penggunaan Metode Nilai Wajar

Jika perusahaan ABC menilai mesin produksi berdasarkan nilai wajarnya, mereka mungkin akan melakukan penilaian pasar atau meminta penilaian independen untuk menentukan nilai mesin tersebut dalam kondisi saat ini. Misalnya, jika nilai wajar mesin tersebut ditentukan menjadi Rp 510 juta, maka nilai asetnya akan dicatat sebesar jumlah tersebut.

Dalam kasus ini, perusahaan ABC memiliki pilihan untuk menggunakan salah satu dari tiga metode penilaian yang berbeda

tergantung pada kebutuhan dan preferensi mereka. Meskipun nilai yang dicatat dalam catatan akuntansi mungkin berbeda berdasarkan metode yang digunakan, tujuan utamanya adalah untuk mencerminkan nilai aset secara akurat dan konsisten dalam laporan keuangan perusahaan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah proses mengalokasikan biaya aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Terdapat beberapa metode penyusutan yang umum digunakan, antara lain metode garis lurus dan metode penurunan nilai.

1. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling sederhana. Dalam metode ini, biaya aset tetap dibagi dengan masa manfaatnya untuk mendapatkan jumlah penyusutan tahunan yang konstan. Misalnya, jika sebuah mesin memiliki biaya Rp 100.000.000 dan masa manfaat 5 tahun, maka penyusutan tahunan mesin tersebut adalah Rp 20.000.000 ($\text{Rp } 100.000.000 / 5 \text{ tahun}$).
2. Metode penurunan nilai adalah metode penyusutan yang mengakui bahwa nilai aset tetap akan menurun seiring berjalannya waktu. Dalam metode ini, penyusutan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai aset yang tersisa setiap tahun. Misalnya, jika sebuah kendaraan memiliki biaya awal Rp 200.000.000 dan tingkat penyusutan tahunan sebesar 20%, maka penyusutan tahunan pada tahun pertama adalah Rp 40.000.000 ($20\% \times \text{Rp } 200.000.000$), dan pada tahun kedua akan dihitung berdasarkan nilai aset yang tersisa setelah penyusutan tahun pertama.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lebih lama, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang stabil dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Beberapa jenis investasi jangka panjang yang umum adalah saham, obligasi, investasi dalam asosiasi, dan investasi dalam anak perusahaan.

1. Saham.

Saham adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian perusahaan tersebut. Keuntungan dari investasi saham dapat diperoleh melalui pembagian dividen dan kenaikan harga saham. Namun, nilai saham juga dapat turun jika kinerja perusahaan menurun.

2. Obligasi

Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Dalam investasi obligasi, investor meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan akan menerima pembayaran bunga secara teratur. Obligasi umumnya dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham, karena pembayaran bunga dan pokok obligasi umumnya lebih stabil.

3. Investasi dalam Asosiasi

Investasi dalam asosiasi adalah investasi yang dilakukan dengan menjadi anggota atau mitra dari suatu asosiasi atau organisasi. Keuntungan dari investasi ini dapat berasal dari kegiatan bersama dengan anggota lain, seperti keuntungan dari usaha bersama atau kegiatan promosi bersama.

4. Investasi dalam Anak Perusahaan

Investasi dalam anak perusahaan adalah investasi yang dilakukan dengan membeli saham atau memiliki sebagian kepemilikan dalam perusahaan anak yang terafiliasi dengan perusahaan utama. Keuntungan dari investasi ini dapat diperoleh melalui dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak atau kenaikan nilai saham perusahaan anak.

Perusahaan melakukan investasi jangka panjang, tentunya berdasarkan tujuan tertentu, yang mungkin berbeda dengan perusahaan lain. Biasanya tujuan berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan, namun beberapa perusahaan mungkin memiliki tujuan utama lain selain menghasilkan keuntungan. Tujuan investasi yang lain adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pendapatan tetap pada setiap periode, termasuk bunga, royalti, dividen atau sewa, dll.
2. Membentuk dana khusus, misalnya dana yang diciptakan untuk ekspansi, manfaat sosial.
3. Mengendalikan atau mendikte perusahaan lain/mengambil bagian saham perusahaan.
4. Menjamin ketersediaan bahan mentah dan memperoleh pasar atas produk manufaktur.
5. Mengurangi persaingan antar jenis usaha sejenis.
6. Menjaga hubungan antar usaha.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode biaya

Ketika menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar

bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investas.

2. Metode ekuitas

Ketika menggunakan metode ekuitas, investasi dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad Faizal, dkk. (2022). Akuntansi Keuangan Menengah 1: Berbasis PSAK. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2020). Akuntansi Keuangan Menengah sesuai PSAK dan IFRS. Jakarta: Grasindo
- Kieso, Donald E. dkk. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah (Edisi IFRS). Yogyakarta: Salemba Empat

Biodata Penulis

Nur Jannah Abdi Aziz, S.E., M.Ak



Penulis tertarik terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 2012. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Jenderal Soedirman pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2012 dan diselesaikan pada tahun 2016. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Jenderal Soedirman pada Pasca Sarjana Magister Akuntansi pada tahun 2016 dan diselesaikan pada tahun 2019. Sekarang, berprofesi menjadi dosen tetap di Universitas Siliwangi Tasikmalaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan mengambil konsentrasi Akuntansi. Selain itu, juga praktisi di bidang perpajakan dan kewirausahaan.

Email Penulis: jannahaziza@unsil.ac.id

BAB 5

LIABILITAS DAN KEWAJIBAN YANG TIDAK LANCAR

Harfiahani Indah Rakhma Ningtyas, S.ST., M.SA.
Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan

Pengantar Liabilitas Tidak lancar

Dalam dunia keuangan dan akuntansi pemahaman mendalam tentang struktur liabilitas suatu entitas adalah kunci untuk menginterpretasikan kesehatan finansial dan kemampuan entitas tersebut dalam memenuhi komitmennya di masa depan. Liabilitas, yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu liabilitas jangka pendek (lancar) dan liabilitas jangka panjang (tidak lancar). Peran penting dalam analisis tersebut. Bab ini akan menggali lebih dalam tentang liabilitas dan kewajiban yang tidak lancar termasuk definisi, jenis, pengukuran, dan dampaknya terhadap keputusan investasi.

Pengertian Liabilitas Tidak lancar

Liabilitas tidak lancar juga dikenal sebagai kewajiban jangka Panjang adalah kewajiban atau utang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun ke depan (Ruslin, 2023). Ini berarti bahwa entitas atau perusahaan tidak diharapkan untuk melunasi utang tersebut dalam waktu dekat (yaitu, dalam satu tahun keuangan). Liabilitas tidak lancar memiliki proses yang lebih kompleks karena sifatnya yang jangka panjang dan pengaruhnya terhadap kesehatan finansial Perusahaan (Hertina, 2024; Martani, 2024). Mengenai dasar dari liabilitas tidak lancar,

konsep ini berakar pada kebutuhan dasar entitas bisnis untuk mendanai operasi, investasi, dan ekspansi mereka dalam jangka waktu yang melebihi satu tahun. Liabilitas tidak lancar berfungsi sebagai mekanisme penting dalam manajemen keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang mendasari konsep liabilitas tidak lancar: tahapan utama, mulai dari pengakuan awal hingga pelunasannya.

1. Pendanaan Jangka Panjang

Pendanaan jangka panjang adalah proses di mana entitas mengakses sumber dana untuk proyek atau investasi yang memiliki horison waktu yang panjang. Proyek atau investasi semacam itu seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan aliran kas masuk yang cukup untuk menutupi biaya pengeluaran awal dan memberikan pengembalian investasi yang diharapkan. Liabilitas tidak lancar menjadi instrumen yang penting dalam pendanaan jangka panjang ini karena memberikan kemampuan kepada entitas untuk mendapatkan dana dalam jangka waktu yang lebih lama, yang sesuai dengan sifat proyek atau investasi yang mereka rancang. Ini berarti bahwa entitas dapat mengakses dana yang dibutuhkan tanpa harus mengalami tekanan untuk melunasi utang dalam waktu yang singkat.

Dengan demikian liabilitas tidak lancar memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan bagi entitas dalam merencanakan dan melaksanakan proyek atau investasi jangka panjang. Ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, karena tidak terikat oleh pembayaran utang

yang harus dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, liabilitas tidak lancar juga memberikan kesempatan kepada entitas untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang mungkin tidak akan tersedia jika mereka terbatas pada sumber pendanaan jangka pendek. Dengan demikian, liabilitas tidak lancar membantu entitas dalam mengoptimalkan struktur modal mereka, meningkatkan potensi pertumbuhan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

2. Pengelolaa Arus Kas

Pengelolaan arus kas merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Dengan memanfaatkan liabilitas tidak lancar, perusahaan dapat mengatur pembayaran utangnya dalam jangka waktu yang lebih panjang, yang memungkinkan mereka untuk menyebarkan beban pembayaran tersebut selama beberapa tahun ke depan. Penyebaran pembayaran utangnya dalam periode yang lebih panjang, perusahaan dapat mengelola arus kasnya dengan lebih efektif. Hal ini memberi mereka fleksibilitas yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keluaran dan masukan kas, serta memastikan bahwa mereka memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

Dengan kata lain, penggunaan liabilitas tidak lancar memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko likuiditas yang terkait dengan pembayaran utang jangka panjang. Ini memberi mereka ruang untuk bernapas dan mengatasi tantangan keuangan yang mungkin muncul, sambil tetap memenuhi kewajiban jangka panjang mereka dengan tepat waktu. Dengan

cara ini, pengelolaan arus kas yang efisien berkat pemanfaatan liabilitas tidak lancar membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan mereka, serta memastikan bahwa mereka dapat terus beroperasi secara lancar dan efektif dalam jangka waktu yang panjang.

3. Struktur Modal dan Biaya Modal

Liabilitas tidak lancar berperan penting dalam mengatur struktur modal perusahaan, yaitu perbandingan antara utang dan ekuitas dalam pendanaan operasionalnya. Dalam mengoptimalkan struktur modal, perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya modal yang terkait dengan sumber pendanaan yang dipilih. Dalam hal ini, liabilitas tidak lancar memungkinkan perusahaan untuk menyeimbangkan antara penggunaan utang jangka panjang dan ekuitas. Penggunaan utang jangka panjang seringkali menghasilkan biaya modal yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan melalui ekuitas. Ini karena bunga yang harus dibayarkan atas utang biasanya lebih rendah dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat mengurangi biaya modal secara keseluruhan dengan memanfaatkan utang jangka panjang.

Selain itu, adanya manfaat pajak dari bunga yang dapat dikurangkan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi biaya modal yang terkait dengan utang jangka panjang. Bunga yang dibayarkan atas utang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, yang mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan bersih yang tersedia bagi pemegang

saham. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, liabilitas tidak lancar membantu perusahaan dalam menciptakan struktur modal yang optimal, di mana penggunaan utang dan ekuitas seimbang untuk mengurangi biaya modal secara keseluruhan. Ini memberi perusahaan keuntungan kompetitif yang signifikan dengan meningkatkan efisiensi modal dan meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham

4. Risiko dan Imbal Hasil

Mengambil utang jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan leverage finansial, yaitu menggunakan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi imbal hasil bagi pemegang sahamnya. Dengan kata lain, dengan menggunakan sebagian dana dari pinjaman, perusahaan dapat menginvestasikan lebih banyak uang daripada yang mereka miliki secara langsung. Ini dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada jika mereka hanya menggunakan modal ekuitas mereka sendiri. Ketika perusahaan menggunakan leverage finansial, imbal hasil yang dihasilkan dari investasi dapat meningkat secara signifikan. Hal ini karena perusahaan dapat menggunakan dana tambahan dari pinjaman untuk memperluas operasi mereka, meningkatkan penjualan, menghasilkan lebih banyak laba, dan akhirnya memberikan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham.

Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan leverage finansial juga membawa risiko yang signifikan. Jika investasi yang didanai dengan utang tersebut tidak menghasilkan pengembalian yang diharapkan, perusahaan tetap berkewajiban untuk

membayar kembali utang tersebut, bersama dengan bunga yang terakumulasi. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, ini dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius, bahkan potensi kebangkrutan. Dengan demikian, meskipun leverage finansial dapat meningkatkan potensi imbal hasil bagi pemegang saham, risiko keuangan juga meningkat secara proporsional. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan leverage finansial dengan hati-hati, mempertimbangkan baik potensi keuntungan maupun risiko yang terkait, dan mengelola utang mereka dengan bijaksana untuk memastikan keberlanjutan dan kestabilan keuangan jangka panjang.

5. *Fkesibilitas Financial*
6. Liabilitas tidak lancar memberikan perusahaan kebebasan finansial untuk mengejar peluang pertumbuhan tanpa harus segera mencari modal tambahan. Dengan memiliki akses terhadap dana yang sudah tersedia dalam bentuk utang jangka panjang, perusahaan dapat merespons peluang pasar atau perubahan industri dengan lebih cepat dan efisien. Mereka dapat menggunakan fleksibilitas ini untuk mengembangkan proyek jangka panjang atau inisiatif pertumbuhan tanpa harus menunggu proses pengumpulan modal tambahan. Dengan tidak terikat pada kebutuhan untuk mengumpulkan modal secara cepat, perusahaan dapat melakukan manuver strategis yang tepat sesuai dengan kondisi pasar dan strategi bisnis mereka. Fleksibilitas finansial ini juga membantu perusahaan untuk meminimalkan dampak terhadap pemegang saham, karena tidak selalu perlu melakukan pengenceran kepemilikan dengan

penerbitan saham baru. Dengan demikian, liabilitas tidak lancar memainkan peran penting dalam memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Jenis Liabilitas Tidak Lancar

Jenis-jenis utang jangka panjang, atau liabilitas tidak lancar, dapat bervariasi tergantung pada sifatnya dan bagaimana mereka diakui dalam laporan keuangan Perusahaan (Suriyanti, 2024). Beberapa jenis umum dari liabilitas tidak lancar termasuk:

1. **Pinjaman Jangka Panjang:** Utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Ini bisa berupa pinjaman bank, pinjaman obligasi, atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.
2. **Obligasi:** Sekuritas utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada investor dengan janji pembayaran kembali pokok bersama dengan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu di masa depan.
3. **Sewa Pembiayaan (Lease):** Perjanjian sewa pembiayaan yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset, seperti peralatan atau properti, dengan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu, sering kali dengan opsi pembelian di akhir periode sewa.
4. **Manfaat Purnakarya (Pensiun):** Kewajiban yang timbul dari janji perusahaan untuk memberikan manfaat purnakarya kepada karyawan setelah pensiun, yang sering kali melibatkan pembayaran dalam jangka waktu yang panjang.

5. **Hutang Lancar yang Direstrukturisasi:** Utang jangka pendek yang diubah menjadi jangka panjang sebagai bagian dari proses restrukturisasi keuangan perusahaan.
6. **Hutang Lancar yang Diubah Menjadi Liabilitas Tidak Lancar:** Utang jangka pendek yang diperpanjang jangka waktunya dan dianggap sebagai liabilitas tidak lancar karena tidak akan dilunasi dalam satu tahun keuangan.

Pengukuran Liabilitas Tidak Lancar

Pengukuran liabilitas tidak lancar melibatkan proses menetapkan nilai yang tepat untuk kewajiban jangka panjang yang tercantum dalam laporan keuangan Perusahaan (Herawati, 2023). Proses ini sering kali kompleks dan melibatkan beberapa aspek:

1. **Penetapan Nilai:** Perusahaan harus menetapkan nilai kewajiban jangka panjang tersebut berdasarkan nilai sekarang dari pembayaran yang diharapkan di masa depan, yang mencakup pembayaran pokok dan bunga.
2. **Penggunaan Tingkat Diskonto:** Dalam banyak kasus, perusahaan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur nilai kewajiban masa depan dalam nilai sekarang. Tingkat diskonto ini mencerminkan biaya modal yang diperlukan untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk membayar kewajiban tersebut.
3. **Estimasi Pembayaran Bunga:** Jika kewajiban melibatkan pembayaran bunga, perusahaan harus memperkirakan jumlah bunga yang akan dibayarkan selama masa kewajiban tersebut.
4. **Penyesuaian untuk Risiko:** Dalam beberapa kasus, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut, seperti risiko tingkat bunga atau risiko

kredit, dan mencerminkan hal ini dalam pengukuran nilai kewajiban.

5. **Penilaian Ulang:** Selama periode pelaporan, perusahaan mungkin perlu meninjau dan menilai ulang nilai kewajiban jangka panjang mereka berdasarkan perubahan kondisi pasar atau perkiraan masa depan yang berubah.

Pengukuran liabilitas tidak lancar memainkan peran penting dalam menentukan posisi keuangan perusahaan dan memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan tentang kewajiban jangka panjang perusahaan serta dampaknya terhadap kesehatan finansial mereka. Dalam konteks pengukuran ini, transparansi dan akurasi informasi sangat penting untuk memastikan kepercayaan investor dan keandalan laporan keuangan perusahaan.

Dampak Terhadap Keputusan Investasi

Pengaruh liabilitas tidak lancar terhadap keputusan investasi dapat signifikan karena kewajiban jangka panjang mempengaruhi struktur modal perusahaan dan kemampuannya untuk mengambil risiko serta memanfaatkan peluang investasi (Martani, 2024) . Berikut adalah beberapa dampaknya:

1. **Biaya Modal**

Biaya modal mengacu pada biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, seperti pinjaman atau obligasi. Liabilitas tidak lancar, seperti pinjaman jangka panjang atau obligasi, membawa biaya modal dalam bentuk bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman atau pemegang obligasi. Pengelolaan kewajiban ini secara efisien sangat penting karena dapat memengaruhi biaya

modal perusahaan. Dengan mengelola liabilitas tidak lancar secara efisien, misalnya dengan mencari tingkat bunga yang lebih rendah atau menggunakan struktur modal yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya modalnya.

Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat meminimalkan jumlah bunga yang harus dibayarkan atas pinjaman atau obligasi mereka. Dengan tingkat bunga yang lebih rendah, biaya modal secara keseluruhan akan lebih rendah, yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan bersih perusahaan. Keuntungan dari biaya modal yang lebih rendah ini adalah bahwa perusahaan mungkin lebih mungkin untuk memilih proyek investasi yang membutuhkan modal tambahan. Proyek-proyek ini mungkin memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah atau lebih risiko, tetapi dengan biaya modal yang lebih rendah, tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek tersebut dapat melebihi biaya modalnya, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.

2. Leverage Finansial

Leverage finansial merujuk pada penggunaan dana pinjaman atau utang untuk meningkatkan pengembalian investasi bagi pemegang saham (Risa Wahyuni, 2023). Dalam konteks ini, liabilitas tidak lancar memberikan perusahaan kesempatan untuk memperoleh dana tambahan untuk digunakan dalam investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi pengembalian investasi bagi pemegang saham. Ini terjadi karena dengan menggunakan dana pinjaman, perusahaan dapat memperluas operasinya atau melakukan investasi lebih dari yang bisa mereka

lakukan hanya dengan modal ekuitas yang tersedia. Namun, leverage finansial juga membawa risiko keuangan yang signifikan.

Meskipun penggunaan utang dapat meningkatkan potensi pengembalian investasi perusahaan harus membayar kembali utangnya bersama dengan bunga yang terkait. Investasi yang didanai dengan utang tersebut tidak menghasilkan pengembalian yang diharapkan. Ini berarti bahwa leverage finansial meningkatkan risiko keuangan perusahaan, terutama jika pengembalian investasi tidak mencukupi untuk menutupi pembayaran utang dan bunga. Oleh karena itu, meskipun leverage finansial dapat meningkatkan potensi pengembalian bagi pemegang saham, perusahaan harus mempertimbangkan dengan hati-hati tingkat risiko yang terkait dengan penggunaan utang. Mereka harus mengevaluasi proyek investasi dengan cermat dan memastikan bahwa pengembalian investasi diharapkan melebihi biaya modalnya. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi kunci dalam penggunaan leverage finansial, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara potensi pengembalian dan risiko keuangan.

3. Ketersediaan Dana untuk Investasi:

Ketersediaan dana untuk investasi sangat vital bagi pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Liabilitas tidak lancar, seperti pinjaman jangka panjang atau obligasi, memberikan perusahaan akses tambahan ke sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk proyek investasi jangka panjang. Dengan memiliki akses ini, perusahaan menjadi lebih fleksibel dalam mengejar peluang

investasi yang mungkin muncul. Tanpa harus bergantung pada modal ekuitas internal atau kas yang sudah ada, perusahaan dapat menggunakan utang jangka panjang untuk mendukung inisiatif pertumbuhan baru atau proyek ekspansi. Ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang investasi tanpa harus mengorbankan likuiditas atau melakukan pengenceran kepemilikan dengan menerbitkan saham tambahan.

Dengan kata lain, liabilitas tidak lancar memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek investasi jangka panjang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada modal internal atau kas tunai yang terbatas. Hal ini menciptakan fleksibilitas finansial yang penting dalam menjawab perubahan pasar dan peluang bisnis yang mungkin muncul, serta memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ketersediaan dana melalui liabilitas tidak lancar memiliki peran kunci dalam mendukung strategi pertumbuhan dan pengembangan perusahaan.

4. Persepsi Risiko:

Keberadaan liabilitas tidak lancar dapat memberikan indikasi kepada investor dan kreditor tentang tingkat risiko keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang jangka panjang, semakin besar risiko keuangan yang terkait dengan perusahaan. Hal ini karena perusahaan harus membayar kembali utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan, bersama dengan pembayaran bunga yang terkait, terlepas dari kinerja keuangan mereka. Ketika investor dan kreditor mengevaluasi

perusahaan, mereka mempertimbangkan tingkat risiko yang terkait dengan investasi atau pemberian pinjaman kepada perusahaan tersebut. Jika perusahaan memiliki tingkat utang jangka panjang yang tinggi, hal ini dapat dianggap sebagai tanda risiko yang lebih tinggi karena mereka memiliki kewajiban keuangan yang lebih besar yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Persepsi risiko yang lebih tinggi dapat memengaruhi biaya modal perusahaan, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana dari sumber eksternal. Investor dan kreditor mungkin menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi atau bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko yang dianggap lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan biaya modal yang lebih tinggi bagi perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi profitabilitas dan ketersediaan dana untuk investasi. Selain itu, tingkat risiko yang tinggi juga dapat mempengaruhi akses perusahaan ke pasar modal. Investor dan kreditor mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan dana kepada perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi, dan perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh pinjaman atau menjual saham di pasar modal.

5. Pembatasan Finansial:

Kewajiban jangka panjang ini mengikat sebagian besar arus kas perusahaan di masa depan untuk melunasi utang tersebut, termasuk pembayaran pokok dan bunga yang terkait. Akibatnya, perusahaan memiliki keterbatasan dalam pengalokasian dana untuk inisiatif baru atau peluang investasi yang mungkin muncul.

Ketika sebagian besar arus kas di masa depan telah diikat oleh kewajiban jangka panjang, fleksibilitas keuangan perusahaan menjadi terbatas dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk riset dan pengembangan, ekspansi bisnis, investasi dalam teknologi baru, atau inisiatif pertumbuhan lainnya.

Pembatasan finansial ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk bereaksi terhadap perubahan pasar atau peluang investasi yang muncul secara cepat. Perusahaan mungkin tidak memiliki cukup fleksibilitas keuangan untuk mengambil risiko yang diperlukan atau memanfaatkan peluang investasi yang mungkin muncul, yang pada gilirannya dapat membatasi pertumbuhan dan inovasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen liabilitas tidak lancar menjadi kunci dalam memastikan bahwa perusahaan tidak terjebak dalam pembatasan finansial yang signifikan. Perusahaan harus memperhitungkan dengan hati-hati tingkat utang jangka panjang yang diambilnya dan memastikan bahwa struktur modalnya memungkinkan cukup fleksibilitas keuangan untuk merespons perubahan pasar dan memanfaatkan peluang investasi yang muncul. Ini menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

Dalam konteks keputusan investasi, manajemen liabilitas tidak lancar menjadi kunci karena dapat memengaruhi biaya modal, risiko, dan ketersediaan dana untuk investasi. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan hati-hati struktur modalnya dan dampaknya terhadap keputusan investasi jangka panjang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Herawati, T. D., N. N., & P. L. (2023). Akuntansi Keuangan Menengah. *Universitas Brawijaya Press*.
- Hertina, D., B. Y., R. W., P. G. K., A. F. Y., P. A., . . . & K. E. B. (2024). Buku Ajar Manajemen Keuangan 2. *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.
- Martani, D., S. S. V., W. R., F. A., T. E., & H. T. (2024). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2. *Penerbit Salemba*.
- Risa Wahyuni, E. D. T. (2023). LAPORAN KEUANGAN DAN ANALISIS KEUANGAN. In *MANAJEMEN KEUANGAN* (Vol. 21).
- Ruslin, R., N. W., A. L., S. E., & P. D. (2023). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*.
- Suriyanti, S. (2024). *Buku Referensi: Manajemen Keuangan*.

Biodata Penulis

Harfiahani indah Rakhma Ningtyas, S.ST., M.SA.



Harfiahani Indah Rakhma Ningtyas, SST., M.SA adalah Dosen Tetap di Institut Teknologi dan Bisnis Yadika - Pasuruan Program Studi Akuntansi. Penulis meraih gelar Magister Akuntansi di Universitas Brawijaya - Malang. Fokus utama pengajar dan penelitiannya terletak pada bidang Akuntansi Pemerintah, Manajemen strategi, dan Akuntansi keuangan. Saat ini sedang melanjutkan di Doktoral jurusan ilmu akuntansi di Unair pada tahun 2023. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: harfiahanityas@itbyadika.ac.id

BAB 6

EKUITAS PEMEGANG SAHAM

Dr. Angela Merici Minggu, S.E., M.Si.
Universitas Kristen Artha Wacana

Posisi Penting Ekuitas Pemegang Saham

Perusahaan mengumpulkan uang untuk mendanai operasi bisnisnya melalui pembiayaan hutang dan ekuitas. Jumlah nilai yang mewakili hutang menunjukkan kepentingan kreditur atas aset perusahaan. Sedangkan jumlah nilai ekuitas menunjukkan kepentingan pemegang saham. Perubahan yang terjadi pada nilai ekuitas dapat mengganggu kepentingan pemegang saham.

Korporasi lebih cocok untuk meningkatkan modal daripada kepemilikan perseorangan atau kemitraan. Semua perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan beroperasi untuk mendapatkan keuntungan atau dengan meminjam. Namun, menarik modal ekuitas lebih mudah bagi perusahaan. Korporasi dapat menjual kepemilikannya dalam bentuk saham, sehingga hak kepemilikan mudah dialihkan. Seorang investor dapat menjual kepemilikannya kapan saja dan tanpa memengaruhi perusahaan atau operasinya.

Perusahaan mampu menjalankan aktivitas operasi dengan baik apabila memiliki nilai ekuitas yang cukup. Secara umum ekuitas dikenal sebagai besaran nilai uang yang disetor oleh pemegang saham ke perusahaan. Ekuitas yang disetorkan ke perusahaan digambarkan dalam bentuk aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga,

cara mengenali ekuitas pemegang saham dapat dilakukan dengan melihat pada jumlah nilai aset bersih perusahaan. Aset bersih yang dimiliki perusahaan merupakan hasil dari selisih antara nilai total aset dan nilai total hutang perusahaan yang harus dibayar. Oleh karena itu, ekuitas pemegang saham dapat bernilai positif atau negatif tergantung pada selisih antara jumlah nilai total aset perusahaan dan nilai total hutang perusahaan. Apabila nilai total aset melebihi nilai total hutang maka ekuitas bernilai positif, sedangkan nilai total aset yang lebih rendah dari nilai total hutang menunjukkan bahwa ekuitas bernilai negatif.

Ekuitas pemegang saham menandakan bahwa terdapat hak kepemilikan pemilik atas perusahaan. Posisi pemegang saham sebagai pemilik memberikan implikasi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan ekuitas yang ada untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemilik perusahaan (pemegang saham) dapat menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan sesuai dengan persentase modal yang disetorkannya ke perusahaan. Bagian keuntungan yang harus dimiliki pemegang saham dapat ditentukan dengan benar apabila perusahaan menyajikan informasi akuntansi secara wajar dan objektif. Dengan demikian, ekuitas pemegang saham dapat menimbulkan berbagai konsekuensi seperti peningkatan pembiayaan aktivitas bisnis, penambahan kekayaan pemegang saham, dan konsekuensi pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik.

Ekuitas pemegang saham dapat bernilai negatif oleh karena berbagai faktor penyebab. Praktik manajemen laba merupakan salah satu faktor penyebab yang menghancurkan nilai ekuitas pemegang saham

(Chung, Sheu, dan Wang, 2009). Manajer perusahaan dapat memilih aktivitas manajemen laba yang menguntungkan bagi manajer, sedangkan konsekuensi negatif dari aktivitas tersebut ada pada hilangnya peluang peningkatan kekayaan pemegang saham (pemilik perusahaan). Kondisi dimaksud merupakan gambaran bahwa ekuitas pemegang saham tidak dipergunakan dengan tepat untuk menaikkan nilai kekayaan pemegang saham.

Pemegang saham sebagai pemberi modal untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan memberi perhatian pada nilai perusahaan. Pertimbangan nilai perusahaan dapat didasarkan pada data akuntansi yang dilaporkan perusahaan. Penting bagi pemegang saham untuk mempertimbangkan seberapa besar ekspektasi pertumbuhan perusahaan jika dinilai berdasarkan informasi keuangan yang mereka terima (Hao, Jin, dan Zhang, 2011). Pemegang saham memiliki kepentingan terkait pertumbuhan perusahaan karena mereka mengharapkan adanya penambahan kekayaan melalui modal yang disetor ke perusahaan.

Perusahaan Berorientasi Laba

Perusahaan berorientasi laba menerbitkan saham kepada pemegang saham dan beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerbitkan saham dapat mencakup perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup.

1. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sahamnya dapat dibeli oleh publik di bursa saham atau dijual bebas, sehingga saham tersebut dapat dimiliki secara luas oleh masyarakat umum. Perusahaan terbuka sering disebut dengan perusahaan publik.

2. Perusahaan tertutup adalah perusahaan yang tidak mengizinkan penjualan saham kepada masyarakat umum. Saham ini biasanya dipegang hanya oleh beberapa pemegang saham saja, sehingga perusahaan tertutup sering disebut dengan perusahaan privat.

Pembentukan Perusahaan Perseroan

Perseroan dalam arti sebenarnya merupakan kumpulan pemilik perorangan, namun secara hukum perseroan diperlakukan sebagai suatu entitas artifisial, terpisah dan independen dari individu-individu tersebut. Dengan demikian, kepemilikan perusahaan perseroan dapat dengan mudah dialihkan. Pemilik (pemegang saham) mempunyai tanggung jawab terbatas, artinya pemilik biasanya tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas hutang perusahaan dan hanya mengambil risiko atas investasi modal mereka. Selain itu, pemilik (pemegang saham) seringkali tidak aktif dalam pengelolaan perusahaan. Akibatnya, keberhasilan perusahaan umumnya bergantung pada kemampuannya menarik sejumlah besar modal (dari beragam pemegang saham, masing-masing dengan tanggung jawab yang terbatas pula) yang dikendalikan oleh kelompok manajemen profesional untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Struktur Modal Perseroan

Struktur modal dalam perusahaan korporasi meliputi modal saham dan hak pemegang saham. Modal saham mengacu pada saham yang diterbitkan oleh perusahaan dan dimiliki oleh pemegang sahamnya. Setiap pemegang saham mempunyai hak yang berbeda-beda. Adapun hak-hak pemegang saham dalam sebuah perusahaan korporasi adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan deviden pada saat diumumkan.

2. Hak untuk memilih direktur dan menetapkan kebijakan perusahaan.
3. Hak untuk mempertahankan kepentingan proporsional dalam kepemilikan korporasi dengan membeli bagian tambahan modal saham secara proporsional jika perusahaan menerbitkan lebih banyak saham.
4. Hak untuk turut serta dalam pembagian harta kekayaan Perseroan apabila Perseroan dilikuidasi.

Hak-hak di atas dapat diubah atau diabaikan untuk beberapa jenis modal saham atau dalam kondisi atau keadaan tertentu yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya, pemegang saham yang memiliki kelas saham tertentu mungkin hanya berhak memberikan suara hanya pada isu tertentu saja. Selain itu, pembelian saham yang melibatkan pelepasan hak memesan efek terlebih dahulu (*preemptive right*) yang memungkinkan suatu perusahaan meningkatkan modal dalam jumlah besar atau mengakuisisi perusahaan lain dengan menerbitkan sejumlah besar saham tambahan.

Karakteristik Ekuitas Pemegang Saham

Tujuan sebuah perusahaan mendapatkan sejumlah uang adalah untuk mendanai kegiatan operasi bisnisnya yang diperoleh melalui pembiayaan utang dan ekuitas. Pembiayaan utang dapat diperoleh dalam bentuk surat utang, obligasi, sewa guna usaha, dan kewajiban lainnya sehingga jumlah yang mewakili kewajiban tersebut menunjukkan kepentingan kreditur atas aset perusahaan.

Secara garis besar ekuitas pemegang saham dapat diartikan sebagai jumlah residual setelah klaim kreditur dikurangkan dari aset atau

dengan kata lain aset bersih. Ekuitas pemegang saham dapat diformulasikan berdasarkan persamaan akuntansi sebagai berikut:

Ekuitas Pemegang Saham = Aset – Kewajiban

Kepentingan kepemilikan pemegang saham timbul terutama dari dua sumber: (1) jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam korporasi dan (2) jumlah yang diperoleh korporasi atas nama pemegang sahamnya. Kedua sumber ini dilaporkan sebagai (1) modal disetor dan (2) laba ditahan.

Pada tingkat yang paling dasar, setiap transaksi dapat dilihat hanya sebagai peningkatan atau penurunan ekuitas pemegang saham, tanpa memperhatikan akun ekuitas pemegang saham tertentu. Faktanya, untuk bisnis yang diselenggarakan sebagai kepemilikan tunggal, semua perubahan modal dicatat dalam akun ekuitas pemilik tunggal. Konsep yang sama berlaku untuk perseroan. Namun bagi perusahaan, pertimbangan tambahan membuat ekuitas pemilik perlu dipisahkan ke dalam beberapa akun ekuitas pemegang saham yang terpisah. Pertimbangan tambahan ini merupakan persyaratan hukum dan tujuan pengungkapan. Jadi, saat kita mempelajari dampak terpisah dari transaksi terhadap laba ditahan dan akun modal disetor tertentu, kita mungkin akan terbantu dengan beberapa pertanyaan misalnya, “Apa dampak bersih transaksi ini terhadap ekuitas pemegang saham?” atau yang setara dengan “Seberapa besar pengaruh aset bersih (aset dikurangi liabilitas) akibat transaksi ini?”

Ekuitas Pemegang Saham dalam Neraca

Perusahaan wajib melaporkan perubahan saldo ekuitas pemegang sahamnya. Neraca melaporkan saldo tahunan akun ekuitas pemegang

saham. Namun, perusahaan juga harus mengungkapkan sumber perubahan pada akun tersebut. Inilah tujuan dari laporan ekuitas pemegang saham.

Investasi pemilik dilaporkan di bagian Ekuitas di neraca. Misalnya, ketika suatu perusahaan menerbitkan saham baru kepada publik, hasilnya dicatat di bagian ekuitas. Dana yang diinvestasikan ini disebut modal kontribusi atau modal disetor. Pemilik juga memberikan dana kepada perusahaan dengan membiarkan keuntungannya diinvestasikan kembali. Dalam suatu perusahaan, keuntungan yang diinvestasikan kembali ini disebut laba ditahan. Dalam kepemilikan perseorangan dan kemitraan, modal disetor dan laba ditahan digabungkan menjadi satu akun modal tunggal.

Secara sederhana, bagian Ekuitas dalam neraca perusahaan hanya mencakup dua bagian yang baru saja disebutkan yaitu modal disetor dan laba ditahan. Namun, meningkatnya kompleksitas bisnis di seluruh dunia memerlukan sejumlah item ekuitas lainnya. Misalnya, beberapa item terkait ekuitas harus dilaporkan sebagai kewajiban di neraca. Selain itu, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada beberapa sekuritas investasi disajikan dalam kategori ekuitas terpisah, begitu pula dampak fluktuasi mata uang asing terhadap ekuitas anak perusahaan di luar negeri.

Empat klasifikasi yang terdapat dalam ekuitas pemegang saham adalah modal disetor, laba ditahan, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan saham treasuri. Gambaran umum penyajian ekuitas pemegang saham dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut.

Gambar 6.1.
Penyajian Ekuitas Pemegang Saham

Saham preferen, 10%	Rp10.000.000
Saham biasa	Rp6.000.000
Tambahan modal disetor	Rp34.000.000
Laba ditahan	Rp167.000.000
Akumulasi penghasilan komprehensif lain:	
Kerugian bersih yang belum direalisasi atas investasi	(Rp8.500.000)
Kerugian bersih pensiun yang belum direalisasi	(Rp7.500.000)
Kerugian tangguhan pada derivative	(Rp400.000)
Saham Treasuri	(Rp600.000)+
Total ekuitas pemegang saham	Rp200.000.000

Modal disetor (*paid-in capital*)

Modal disetor terutama terdiri dari jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham ketika mereka membeli saham dari perusahaan atau timbul dari perusahaan yang membeli kembali sebagian saham tersebut atau dari aktivitas kompensasi berbasis saham.

Perusahaan meningkatkan dana ekuitas dengan menjual saham perusahaan tersebut. Pemegang saham adalah pemilik suatu korporasi. Jika suatu perusahaan hanya mempunyai satu kelas saham, tidak diperlukan penunjukan atas saham tersebut, namun biasanya saham tersebut diberi label saham biasa. Hak kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham biasa, kecuali secara khusus dipotong berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham, adalah:

1. Hak untuk memberikan suara mengenai hal-hal yang diajukan pemegang saham, termasuk pemilihan direktur perusahaan. Setiap saham mewakili satu suara.

2. Hak untuk mendapat bagian keuntungan ketika dividen diumumkan. Persentase saham yang dimiliki seorang pemegang saham menentukan bagiannya atas dividen yang dibagikan.
3. Hak untuk ikut serta dalam pembagian harta kekayaan apabila perseroan dilikuidasi. Persentase saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham menentukan bagiannya atas aset setelah kreditor dan pemegang saham preferen dibayar.

Hak lain yang terkadang diberikan kepada pemegang saham biasa adalah hak untuk mempertahankan persentase kepemilikannya ketika saham baru diterbitkan. Hal ini disebut sebagai hak memesan efek terlebih dahulu. Setiap pemegang saham ditawarkan kesempatan untuk membeli persentase saham baru yang diterbitkan sama dengan persentase saham yang dimilikinya pada saat itu.

Bukan hal yang aneh jika suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu, dan mungkin beberapa, kelas saham, masing-masing dengan hak dan batasan yang berbeda. Untuk menarik investor, perusahaan telah merancang cukup beragam sekuritas kepemilikan. Jika lebih dari satu kelompok saham disahkan berdasarkan anggaran dasar, maka hak khusus masing-masing kelompok (misalnya, hak untuk memilih, hak sisa atas aset, dan hak dividen) harus disebutkan. Selain itu, beberapa sebutan harus diberikan untuk membedakan setiap kelas. Sebutan yang diberikan misalnya saham preferen dan saham biasa.

Penerbitan saham dengan preferensi atau ciri tertentu yang membedakannya dari kelas saham yang biasa disebut dengan saham biasa. Seringkali sebutan yang membedakan adalah saham preferen.

Hak khusus pemegang saham preferen biasanya mencakup salah satu atau kedua hal berikut:

1. Pemegang saham preferen biasanya mempunyai preferensi terhadap jumlah dividen tertentu (jumlah rupiah per saham atau % nilai nominal per saham). Artinya, jika dewan direksi mengumumkan dividen, pemegang saham preferen akan menerima dividen yang ditentukan, sebelum dividen dibayarkan kepada pemegang saham biasa.
2. Pemegang saham preferen biasanya memiliki preferensi (dibandingkan pemegang saham biasa) mengenai pembagian aset jika perusahaan dibubarkan.

Pemegang saham preferen terkadang memiliki hak konversi yang memungkinkan mereka menukarkan saham preferen dengan saham biasa pada rasio konversi tertentu. Alternatifnya, hak istimewa penebusan mungkin memberikan pilihan kepada pemegang saham preferen, dalam kondisi tertentu, untuk mengembalikan saham mereka dengan harga penebusan yang telah ditentukan.

Saham preferen mungkin bersifat kumulatif atau nonkumulatif. Biasanya, saham preferen bersifat kumulatif, artinya jika dividen tertentu tidak dibayarkan pada tahun tertentu, maka dividen yang belum dibayar (disebut tunggakan dividen) diakumulasikan dan harus dibayar pada tahun dividen berikutnya sebelum dividen dibayarkan atas saham biasa.

Ketika saham dijual secara tunai, akun modal saham (saham biasa atau saham preferen) dikreditkan sebesar jumlah yang mewakili modal yang dinyatakan. Ketika saham mempunyai nilai pari tertentu, jumlah

tersebut menunjukkan modal yang dinyatakan dan dikreditkan ke rekening saham. Hasil yang melebihi jumlah ini dikreditkan ke modal disetor—kelebihan nilai nominal (juga disebut tambahan modal disetor).

Kadang-kadang, perusahaan mungkin menerbitkan sahamnya untuk tujuan selain uang tunai. Bukan hal yang aneh bagi suatu perusahaan baru yang belum memiliki arus kas yang dapat diandalkan, untuk membayar jasa promosi dan hukum dengan saham dibandingkan dengan uang tunai. Demikian pula, saham dapat diberikan sebagai pembayaran atas tanah, peralatan, atau aset non-kas lainnya.

Bahkan tanpa adanya penerimaan kas untuk menentukan nilai wajar saham pada saat pertukaran, transaksi tersebut tetap harus dicatat pada nilai wajar. Bukti terbaik mengenai nilai wajar adalah:

1. Harga pasar yang dikutip untuk saham tersebut.
2. Harga jual yang ditetapkan dalam penerbitan saham baru-baru ini secara tunai.
3. Jumlah uang tunai yang seharusnya dibayarkan dalam pembelian aset atau jasa secara tunai.
4. Penilai independen atas nilai aset yang diterima.
5. Bukti lain yang tersedia.

Laba ditahan (*retained earnings*)

Secara umum, laba ditahan merupakan akumulasi laba bersih (atau rugi bersih) perusahaan yang belum didistribusikan. Judul yang lebih deskriptif yang digunakan oleh beberapa perusahaan adalah laba yang diinvestasikan kembali. Saldo kredit dalam akun ini menunjukkan jumlah rupiah aset yang sebelumnya diperoleh perusahaan tetapi

tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Saldo debit dalam laba ditahan dapat disebut sebagai defisit.

Dividen dan pemecahan saham dapat berpengaruh terhadap nilai laba ditahan. Investasi awal pemegang saham di suatu perusahaan diwakili oleh jumlah yang dilaporkan sebagai modal disetor. Salah satu cara perusahaan memberikan pengembalian kepada pemegang saham atas investasinya adalah dengan membayar dividen, biasanya dalam bentuk uang tunai.

Dividen adalah pembagian aset yang diperoleh perusahaan atas nama pemegang sahamnya. Jika dividen yang dibayarkan melebihi jumlah aset yang diperoleh perusahaan, maka manajemen pada dasarnya mengembalikan sebagian investasinya kepada pemegang saham, bukan memberikan pengembalian atas investasi tersebut. Jadi sebagian besar perusahaan memandang laba ditahan sebagai jumlah yang tersedia untuk dividen.

Dalam keadaan yang tidak biasa dimana dividen melebihi saldo laba ditahan, kelebihan tersebut disebut sebagai dividen likuidasi karena sebagian modal yang diinvestasikan dilikuidasi. Hal ini mungkin terjadi ketika suatu perusahaan dibubarkan dan asetnya (tidak tunduk pada klaim superior oleh kreditor) dibagikan kepada pemegang saham. Setiap bagian dari dividen yang tidak mewakili pembagian laba harus didebitkan ke tambahan modal disetor, bukan laba ditahan.

Terkadang jumlah dividen yang tersedia sengaja dikurangi oleh manajemen. Pembatasan laba ditahan berarti sebagian saldo laba ditahan tidak tersedia untuk dividen. Perusahaan mungkin membatasi

laba ditahan untuk menunjukkan niat manajemen untuk menahan aset yang diwakili oleh bagian saldo laba ditahan untuk tujuan tertentu. Misalnya, manajemen mungkin mengantisipasi kebutuhan sejumlah aset tertentu di tahun-tahun mendatang untuk membayar utang yang jatuh tempo, untuk menutupi kerugian kontinjensi, atau untuk membiayai perluasan fasilitas.

Perusahaan dapat memilih membagikan dividen dalam bentuk saham. Dividen saham adalah pembagian saham tambahan kepada pemegang saham perusahaan saat ini. Pastikan untuk memperhatikan perbedaan antara dividen saham dan dividen tunai. Dividen saham tidak memengaruhi aset maupun kewajiban perusahaan. Selain itu, karena setiap pemegang saham menerima persentase kenaikan saham yang sama, kepentingan proporsional pemegang saham (persentase kepemilikan) dalam perusahaan tetap tidak berubah.

Alasan umum untuk mengeluarkan dividen saham sebenarnya adalah untuk menyebabkan penurunan harga pasar per saham setelahnya. Misalnya, setelah sebuah perusahaan mengumumkan dividen saham 100% atas 100 juta lembar saham biasa, dengan harga pasar per saham sebesar Rp10,-, perusahaan tersebut kemudian memiliki 200 juta lembar saham, masing-masing dengan perkiraan nilai pasar Rp5,-. Motivasi penurunan harga pasar per saham adalah untuk meningkatkan daya jual saham dengan membuatnya menarik bagi lebih banyak calon investor.

Pembagian saham sebesar 25% atau lebih dapat dicatat dengan salah satu dari dua cara berikut: (1) sebagai dividen saham “besar” atau (2) sebagai pemecahan saham. Dengan demikian, dividen saham sebesar

100% dapat diberi label pemecahan saham 2-untuk-1 dan dicatat demikian. Pemecahan saham yang dilakukan perusahaan dapat berdampak terhadap nilai ekuitas pemegang saham (Harjoto, Kim, Laksmana, dan Walton, 2019). Pemecahan saham dapat memberikan sinyal untuk mengurangi asimetri informasi antara investor dan manajer.

Penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income (OCI)*)

Penghasilan komprehensif memberikan pandangan yang lebih luas mengenai perubahan ekuitas pemegang saham dibandingkan laba bersih tradisional. Penghasilan komprehensif merupakan total perubahan ekuitas nonpemilik untuk periode pelaporan (Spiceland *et al.*, 2016). Faktanya, penghasilan komprehensif mencakup semua perubahan ekuitas selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Transaksi antara korporasi dan pemegang sahamnya terutama mencakup dividen dan penerbitan atau pembelian saham perusahaan. Sebagian besar perubahan ekuitas nonpemilik dilaporkan dalam laporan laba rugi. Jadi, perubahan ekuitas nonpemilik selain yang merupakan bagian dari laba bersih tradisional adalah perubahan yang dilaporkan sebagai “penghasilan komprehensif lain”.

Penghasilan komprehensif memperluas pandangan tentang penghasilan di luar laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dengan memasukkan empat jenis keuntungan dan kerugian yang tidak termasuk dalam laporan laba rugi:

1. Keuntungan (kerugian) kepemilikan bersih atas investasi.

Keuntungan dan kerugian beberapa sekuritas yang terjadi ketika nilai wajar investasi tersebut meningkat atau menurun. Beberapa

keuntungan dan kerugian tidak dimasukkan dalam laba sampai direalisasikan melalui penjualan sekuritas, namun dianggap sebagai komponen penghasilan komprehensif lain.

2. Keuntungan (kerugian) dari perubahan program imbalan pasca kerja.

Keuntungan dan kerugian bersih serta “biaya layanan sebelumnya” dari dana pensiun kadang-kadang memengaruhi penghasilan komprehensif lain daripada laba bersih pada saat hal tersebut terjadi.

3. Keuntungan (kerugian) yang ditangguhkan atas derivatif.

Derivatif yang ditetapkan sebagai “lindung nilai arus kas” pada saat disesuaikan dengan nilai wajarnya, maka keuntungan atau kerugiannya ditangguhkan sebagai komponen penghasilan komprehensif lain dan dimasukkan dalam laba di kemudian hari, bersamaan pula dengan laba yang dipengaruhi oleh transaksi lindung nilai.

4. Penyesuaian nilai tukar mata uang asing.

Penyesuaian dari perubahan nilai tukar mata uang asing juga termasuk dalam penghasilan komprehensif lain, namun tidak termasuk dalam laba bersih.

Penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income (OCI)*) memiliki ciri lain yang sama dengan laba bersih. Sama seperti laba bersih yang dilaporkan secara berkala dalam laporan laba rugi dan juga secara kumulatif sebagai bagian dari laba ditahan, OCI juga dilaporkan secara berkala dalam laporan laba rugi komprehensif dan juga sebagai akumulasi penghasilan komprehensif lain (*accumulated other comprehensive income (AOCI)*) di neraca bersama dengan laba

ditahan. Dengan kata lain, terdapat dua atribut OCI yang dilaporkan: (1) komponen penghasilan komprehensif yang dihasilkan selama periode pelaporan dan (2) akumulasi penghasilan komprehensif selama periode berjalan dan periode sebelumnya.

Atribut pertama—komponen penghasilan komprehensif yang dihasilkan selama periode pelaporan—dapat dilaporkan sebagai (a) versi laporan laba rugi yang diperluas atau (b) laporan terpisah segera setelah laporan laba rugi. Terlepas dari penempatan yang dipilih perusahaan, presentasinya serupa. Perusahaan akan melaporkan laba bersih, komponen penghasilan komprehensif lainnya, dan total penghasilan komprehensif, serupa dengan penyajian pada Gambar 6.2. Perlu diperhatikan bahwa setiap komponen dilaporkan setelah dikurangi beban pajak penghasilan atau manfaat pajak penghasilan.

Gambar 6.2.
Penghasilan Komprehensif

Penghasilan bersih		Rp xxx
Penghasilan komprehensif lainnya:		
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas beberapa sekuritas (setelah pajak)	Rp xxx	
Keuntungan (kerugian) dari perubahan program imbalan pasca kerja (setelah pajak)	(Rp xxx)	
Keuntungan (kerugian) yang ditangguhkan dari 90derivatif (setelah pajak)	(Rp xxx)	
Penyesuaian nilai tukar mata uang asing (setelah pajak)	<u>Rp xxx +</u>	
Total penghasilan komprehensif lainnya		<u>Rp xxx +</u>
Penghasilan komprehensif		Rp xxx

Atribut kedua—penghasilan komprehensif yang terakumulasi selama periode berjalan dan periode sebelumnya—dilaporkan sebagai

komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham setelah laba ditahan, serupa dengan penyajian pada Gambar 6.1. Perhatikan bahwa jumlah yang dilaporkan di sini—akumulasi pendapatan komprehensif lain (AOCI)—mewakili jumlah kumulatif perubahan pada setiap komponen yang terjadi selama setiap periode pelaporan (Gambar 6.2) sepanjang tahun-tahun sebelumnya.

Saham treasuri (*treasury stock*)

Apapun alasan pembelian kembali saham, perusahaan mempunyai pilihan bagaimana memperhitungkan pembelian kembali tersebut:

1. Saham tersebut dapat ditarik secara resmi.
2. Saham tersebut dapat disebut treasury stock.

Sayangnya, pilihan tersebut tidak ditentukan oleh sifat pembelian kembali, namun oleh motivasi praktis perusahaan.

Pembelian saham treasuri dipandang sebagai pengurangan sementara ekuitas pemegang saham, yang akan dibatalkan kemudian ketika saham treasuri tersebut dijual kembali (Spiceland *et al.*, 2016). Biaya perolehan saham tersebut “sementara” didebitkan ke rekening saham treasuri. Pada titik ini, saham tersebut dianggap telah diterbitkan, tetapi tidak beredar.

Pencatatan dampaknya pada akun ekuitas pemegang saham tertentu, tertunda hingga nanti saham tersebut diterbitkan kembali. Sementara itu, saham tersebut memiliki status fiktif, yaitu tidak diterbitkan atau beredar. Secara efektif, pembelian saham treasuri dan selanjutnya dijual kembali dianggap sebagai “transaksi tunggal.”

Laba ditahan dapat didebit dalam transaksi saham treasuri, namun tidak dikreditkan. Transaksi yang melibatkan saham treasuri tidak

berdampak pada laporan laba rugi. Hal ini mengikuti alasan bahwa pembelian dan penjualan saham perusahaan sendiri merupakan transaksi antara perusahaan dan pemiliknya dan bukan bagian dari proses memperoleh pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chung, H., Sheu, H.-J., dan Wang, J.-L. (2009). *Do firms' earnings management practices affect their equity liquidity?* Finance Research Letters, vol. 6, no. 3, pp. 152-158.
- Hao, S., Jin, Q., dan Zhang, G. (2011). *Investment Growth and the Relation between Equity Value, Earnings, and Equity Book Value.* The Accounting Review, vol. 86, no. 2, pp. 605-635.
- Harjoto, M. A., Kim, D., Laksmana, I., dan Walton, R. C. (2019). *Corporate social responsibility and stock split.* Review of Quantitative Finance and Accounting, vol. 53, no. 2, pp. 575-600.
- Spiceland, J. D., Sepe, J. F., Nelson, M. W., dan Thomas, W. B. (2016). *Intermediate Accounting* (Eighth ed.). New York: Mc Graw Hill.

Biodata Penulis

Dr. Angela Merici Minggu, S.E., M.Si.



Penulis lahir di Kefamenanu tanggal 10 Januari 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW), Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi FE Universitas Langlang Buana Bandung. Studi S2 ditamatkan dari Program Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Padjajaran, dan menyelesaikan studi S3 pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi FEB Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menekuni penulisan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi institusi penulis, bangsa dan negara Indonesia.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Audit, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Hasil penelitian penulis dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan jurnal internasional.

Email Penulis: angelaminggu10@gmail.com

BAB 7

ARUS KAS

Gebriany Pirade Wenur, S.E., M.S.A.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PETRA Bitung

Pengertian Arus Kas

Arus Kas adalah bagian penting dari laporan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran uang tunai selama periode tertentu. Laporan arus kas memberikan gambaran yang jelas tentang sumber-sumber kas perusahaan dan bagaimana kas tersebut digunakan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas untuk membantu para investor, kreditor dan pemakai eksternal lainnya agar dapat membantu dalam memahami dengan baik terkait aktivitas pembayaran dan investasi suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Arus kas adalah aliran masuk dan keluar uang tunai dari suatu entitas selama periode tertentu. Ini mencakup semua transaksi yang melibatkan uang tunai, baik itu penerimaan (inflow) maupun pengeluaran (outflow). Arus kas adalah konsep penting dalam manajemen keuangan yang membantu dalam memahami aliran uang tunai suatu perusahaan atau entitas. Ini membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik, perencanaan keuangan, dan pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Dengan memahami arus kas, manajemen dapat mengelola kas dengan lebih efektif dan investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik.

Tujuan Laporan Arus Kas

1. **Menggambarkan Kemampuan Menghasilkan Kas:**
Memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi bisnisnya.
2. **Menunjukkan Penggunaan Kas:**
Menyajikan bagaimana perusahaan menggunakan kasnya, termasuk dalam investasi, pendanaan, dan aktivitas operasional.
3. **Membantu Pengambilan Keputusan:**
Para pemangku kepentingan menggunakan informasi dalam laporan arus kas untuk membuat keputusan investasi dan keuangan.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:**
Memberikan transparansi tentang aliran uang tunai perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan.
5. **Mengukur Kesehatan Keuangan:**
Laporan arus kas merupakan salah satu indikator utama kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dengan memantau arus kas dari waktu ke waktu, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi tren yang mungkin mengindikasikan masalah keuangan atau potensi pertumbuhan.

Jenis – Jenis Arus Kas

1. Aktivitas operasi
Mencakup segala transaksi uang tunai yang terkait dengan operasional inti perusahaan.
Misalnya:
(+) Penerimaan uang tunai dari
 - a. Penjualan barang atau jasa

- b. Pendapatan bunga
- c. Pendapatan dividen
- (-) Pembayaran tunai kepada
 - a. Karyawan
 - b. Pemasok
 - c. Pemerintah
 - d. Kreditur

2. Aktivitas investasi

Mencakup transaksi uang tunai yang terkait dengan investasi perusahaan dalam asset tetap atau investasi jangka panjang.

Misalnya:

- (+) Penerimaan tunai dari
 - a. Penjualan aktiva tetap
 - b. Penjualan investasi
 - c. Penjualan aktiva tak berwujud
 - d. Penerimaan hasil penagihan pinjaman

- (-) Pengeluaran tunai untuk
 - a. Pembelian aktiva tetap
 - b. Pembelian investasi dari entitas lain
 - c. Pembelian aktiva tak berwujud
 - d. Pemberian pinjaman kepada entitas lain

3. Aktivitas pendanaan

Mencakup transaksi uang tunai yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan, seperti penerimaan atau pembayaran pinjaman, penerbitan atau pembelian saham perusahaan, serta pembayaran dividen kepada pemegang saham. Kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan tidak memiliki hutang.

Misalnya:

(+) Penerimaan kas dari

- a. Menerbitkan surat berharga berupa saham
- b. Menerbitkan surat utang jangka panjang berupa utang obligasi, wesel bayar jangka Panjang

(-) Pengeluaran kas dari

- a. Membayar dividen kepada pemegang saham
- b. Menarik surat utang jangka panjang
- c. Membeli saham treasury

Metode Pelaporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Dalam pelaporan arus kas, khusus aktivitas operasi terdapat dua metode yaitu:

- a. Metode langsung

Metode pelaporan arus kas yang dilakukan dengan cara mengelompokkan aktivitas operasional ke dalam beberapa kategori yang berbeda.

- b. Metode tidak langsung

Metode ini berfokus pada selisih yang terjadi antara laba bersih dengan arus dari kegiatan operasional. Metode ini menunjukkan adanya hubungan antara neraca, arus kas dan laporan laba rugi perusahaan.

Metode Tidak Langsung:

PT. Jaya Sukses
Laporan Arus Kas
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2x23

Arus kas dari aktivitas operasi

Laba (rugi) bersih..... XXX

penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke arus kas bersih dari aktivitas operasi:

amortisasi diskonto investasi obligasi	(xxx)
amortisasi premium investasi obligasi	xxx
penyisihan piutang ragu – ragu	xxx
penyusutan asset tetap	xxx
amortisasi asset tidak berwujud	xxx
amortisasi diskonto utang obligasi	xxx
amortisasi premium utang obligasi	(xxx)
keuntungan penjualan asset tetap	(xxx)
kerugian penjualan asset tetap	xxx
kenaikan dalam asset lancar (selain kas)	(xxx)
penurunan dalam asset lancar (selain kas)	xxx
kenaikan dalam kewajiban lancar	xxx
penurunan dalam kewajiban lancar	(xxx)
 arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi	 xxx

a. Amortisasi diskonto investasi obligasi

Diskonto investasi obligasi terjadi apabila besarnya uang kas yang dikeluarkan untuk membeli obligasi (tidak termasuk bunga berjalan) lebih kecil dibanding dengan nilai nominal obligasi. Akun investasi obligasi akan dicatat (debit) dalam pembukuan sebesar harga perolehannya. Amortisasi perlu dilakukan agar supaya pada saat obligasi jatuh tempoh, saldo akun investasi obligasi akan sama dengan besarnya nilai nominal obligasi. Amortisasi atas diskonto investasi obligasi akan dilakukan dengan cara mendeбет akun investasi obligasi dan mengkredit akun pendapatan bunga.

b. Amortisasi premium investasi obligasi

Premium investasi obligasi terjadi apabila besarnya uang kas yang dikeluarkan untuk membeli obligasi (tidak termasuk bunga berjalan) lebih besar disbanding dengan nilai nominal obligasi. Akun investasi obligasi akan dicatat di debet dalam pembukuan sebesar harga perolehannya tersebut. Amortisasi atas premium investasi obligasi akan mengurangi besarnya laba bersih karena pendapatan bunga berkurang.

c. Penyisihan piutang ragu – ragu, penyusutan asset tetap dan amortisasi asset tidak berwujud

Beban – beban tersebut dicatat dalam pembukuan agar dapat ditandingkan dengan pendapatan terkait selama periode berjalan dan tidak melibatkan arus kas keluar. Namun dalam laporan laba rugi beban – beban ini diakui dan dilaporkan sebagai pengurang besarnya laba bersih.

d. Amortisasi diskonto utang obligasi

Diskonto utang obligasi terjadi apabila besarnya uang kas yang diterima atas penerbitan/penjualan obligasi lebih kecil disbanding dengan nilai nominal obligasi. Akun utang obligasi akan dicatat di kredit dalam pembukuan sebesar nilai nominal obligasi dan akun diskonto akan di catat di debet. Nilai buku utang obligasi adalah selisih antara nilai nominal dengan besarnya diskonto yang belum diamortisasikan.

e. Amortisasi premium utang obligasi

Premium utang obligasi terjadi apabila besarnya uang kas yang diterima diluar bunga penjualan atas

penerbitan/penjualan obligasi lebih besar disbanding dengan nilai nominal obligasi. Akun utang obligasi akan dicatat di kredit dalam pembukuan sebesar nilai nominal obligasi, dan akun premium akan dicatat di kredit dalam pembukuan sebesar selisih antara besarnya uang kas yang diterima diluar bunga berjalan dengan nilai nominal obligasi.

f. Keuntungan penjualan asset tetap

Keuntungan dalam penjualan asset tetap terjadi apabila uang kas bersih yang diterima sebagai hasil dari penjualan asset tetap lebih besar disbanding dengan nilai buku dari asset tetap yang dijual. Nilai buku asset tetap dihitung dengan cara mengurangkan harga perolehan asset tetap dengan besarnya akumulasi penyusutan.

g. Kenaikan / penurunan dalam asset lancar (selain kas)

Kenaikan atau penurunan saldo asset lancar sepanjang periode berjalan dapat dilihat dari neraca yaitu neraca yang menyajikan saldo dari masing – masing komponen asset lancar, asset tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan modal selama dua periode (periode berjalan dan yang lalu). Yang tergolong asset lancar selain kas adalah piutang usaha, persediaan barang dagang, dan biaya dibayar di muka.

h. Kenaikan/penurunan dalam kewajiban lancar

Penurunan saldo utang usaha diantara dua tanggal neraca menunjukkan bahwa jumlah pembayaran kas (pelunasan utang) lebih besar disbanding dengan pembelian barang dagang secara kredit. Jumlah harga pokok penjualan yang

dilaporkan dalam laporan laba rugi oleh karena itu belum termasuk besarnya pembelian yang memerlukan arus kas keluar ini akan dikurangkan dari laba bersih.

Metode Tidak Langsung:

PT. Jaya Sukses
Laporan Arus Kas
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2x23

Arus kas dari aktivitas operasi

Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa.....	xxx
Penerimaan kas dari dividen	xxx
Penerimaan kas dari bunga.....	xxx
Kas yang dibayarkan untuk membeli barang dagang.....	(xxx)
Kas yang dikeluarkan untuk biaya dibayar di muka	(xxx)
Kas yang dibayarkan untuk gaji/upah karyawan	(xxx)
Kas yang dibayarkan atas bunga pinjaman	(xxx)
Kas yang dibayarkan atas pajak penghasilan	(xxx)
Arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi	xxx

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan instrument keuangan yang bukan untuk diperdagangkan. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi tidak dipengaruhi oleh metode langsung dan tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibandingkan dengan arus kas keluar maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi akan dilaporkan, dan sebaliknya jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih kecil dibanding dengan arus kas keluar maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi dilaporkan.

PT. Jaya Sukses
Laporan Arus Kas
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2x23

Arus kas dari aktivitas investasi

kas dari penjualan tanah xxx
kas yang dibayarkan untuk membeli bangunan (xxx)
kas yang dibayarkan untuk membeli peralatan (xxx)
 arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi **xxx**

3. **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas pendanaan meliputi transaksi – transaksi yang dimana kas diperoleh atau dibayarkan kembali ke pemelik dana atau investor dan kreditur. Contohnya kas bersih yang diterima dari penerbitan saham atau obligasi pembayarab untuk membeli kembali saham biasa atau untuk menebus kembali utang obligasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak dipengaruhi oleh metode langsung dan tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih besar disbanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan akan dilaporkan, dan sebaliknya.

PT. Jaya Sukses
Laporan Arus Kas
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2x23

Arus kas dari aktivitas pendanaan

kas dari penjualan saham biasa xxx
kas yang dibayarkan untuk menebus utang obligasi (xxx)
kas yang dibayarkan untuk deviden (xxx)
 arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan **xxx**

Pola Arus Kas

No	Arus Kas Operasi	Arus Kas Investasi	Arus Kas Pendanaan	Gambaran Perusahaan
1	+	+	+	Perusahaan tergolong sangat likuid karena menghasilkan banyak kas dari operasi, investasi dan pendanaan. Hal ini sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan akuisisi
2	+	-	-	Perusahaan menggunakan kelebihan arus kas operasi untuk membeli asset tetap (melakukan investasi) dan membayar hutang jangka panjang kepada kreditur dan investor
3	+	+	-	Perusahaan melakukan kelebihan arus kas operasi dan hasil penjualan investasi (asset tetap) untuk membayar utang jangka panjang kepada kreditur dan investor
4	+	-	+	Perusahaan menggunakan kelebihan arus kas operasi dan hasil pendanaan hasil pinjaman utang jangka panjang dari kreditur, penjualan saham

				pendiri kepada investor
5	-	+	+	Kekurangan arus kas operasi perusahaan diatasi dengan menjual investasi atau asset tetap dan melakukan pinjaman jangka panjang dari kreditur, penjualan saham pendiri kepada investor
6	-	-	+	Kekurangan arus kas operasi dan kebutuhan arus kas perusahaan untuk melakukan investasi atau pembelian asset tetap dibiayai oleh pinjaman jangka panjang dari kreditur, penjualan saham pendiri kepada investor
7	-	+	-	Perusahaan mengatasi kekurangan arus kas operasi dan membiayai pembayaran hutang jangka panjang kepada kreditur atau pembayaran prive atau dividen tunai kepada pemilik
8	-	-	-	Perusahaan menggunakan sisa cadangan kas yang ada untuk menutup kekurangan arus kas operasi dan

				membiayai aktivitas investasi serta pendanaan
--	--	--	--	---

Penyusunan Laporan Arus Kas

Ada lima cara untuk menyusun laporan arus kas:

1. Menghitung kenaikan dan penurunan kas
2. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional
3. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi dilaporan arus kas
4. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan
5. Hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas

DAFTAR PUSTAKA

Santoso, I. (2010). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. PT. Rafika Aditama.

Hery. (2020). *Akuntansi Keuangan Menengah*. PT. Grasindo. Jakarta.

Wibono, Abubakar. (2009). *Akuntansi Dasar 2*. PT. Grasido. Jakarta.

Biodata Penulis**Gebriany Pirade Wenur, S.E., M.S.A.**

Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Sam Ratulangi Manado pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2009 dan diselesaikan pada tahun 2013. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Sam Ratulangi Manado pada Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2013 dan diselesaikan pada tahun 2016. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja ±1 tahun di perusahaan swasta / BUMN di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bitung. Namun saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen tetap dan aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PETRA. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi (Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Manajemen Keuangan). Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: Gebrianywenur@gmail.com

BAB 8

PENDAPATAN

Dr. Dewi Sarifah Tullah, M.SI., AK., CA.
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Pengertian Pendapatan

Pendapatan pada PSAK 23 (Revisi 2018), merupakan arus masuk bruto suatu entitas mengenai manfaat ekonomi yang muncul atas aktivitas normalnya dalam periode tertentu dan arus masuk tersebut mampu memberikan dampak peningkatan ekuitas yang bukan bersumber dari kontribusi investor (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018b). **Pendapatan** merupakan bagian dari penghasilan Perusahaan yang bersumber dari aktivitas normal dan mengacu pada beberapa terminologi yang beragam seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen, (*dividend*), dan *royalty* (Martani et al., 2015). Berdasarkan definisi tersebut Perusahaan hanya akan mengakui pendapatannya dengan mengilustrasikan adanya transfer barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan dengan sejumlah imbalan yang diestimasi dalam pertukaran tersebut yang akan menjadi milik perusahaan (Arif et al., 2021; Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018b).

Pengukuran Pendapatan

Pendapatan dapat diukur melalui nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar merupakan harga yang disepakati dalam menjual sejumlah aset atau harga yang

dibayarkan dalam menyelesaikan suatu kewajiban antar pelaku pasar yang pengukurannya didasarkan pada tanggal (PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar). Secara umum, nilai pendapatan seringkali dapat ditetapkan dengan sederhana melalui kesepakatan kontrak antar entitas dan pembeli (pemakai asset). Jumlah yang disebutkan adalah jumlah yang diterima atau diterimakan dengan memperhitungkan adanya diskon dan potongan terhadap harga penjualan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018a).

Pengakuan Pendapatan

Pedoman untuk mengakui pendapatan umumnya cukup luas. Industri tertentu biasanya memiliki pedoman yang sangat khas untuk memberikan pengetahuan tambahan kapan pendapatan dapat diakui. Prinsip pengakuan pendapatan adalah saat pendapatan terealisasi atau dapat terlaksana dan diwujudkan.

Empat pendapatan yang transaksinya telah diakui sejalan dengan prinsip adalah:

1. Perusahaan dapat mengakui pendapatannya dari hasil menjual produknya yang diakui saat tanggal terjadinya penjualan, biasanya ditafsirkan dengan diserahkannya produk kepada pembeli/pelanggan.
2. Perusahaan dapat mengakui pendapatannya dari pelayanan jasa yang pengakuannya saat jasa-jasa tersebut selesai dikerjakan.
3. Perusahaan mengakui pendapatannya dengan memperkenalkan pihak yang berbeda untuk memanfaatkan aktivitya, misalnya royalty, sewa, dan bunga, yang diakuinya sesuai waktu yang diizinkan selama aktivitya dimanfaatkan.

4. Perusahaan mengakui pendapatannya saat aktiva dilepaskan (selain produk atau barang) dan diakuinya pada saat tanggal penjualan aktiva tersebut (Kieso et al., 2011).

Tujuan pengakuan pendapatan untuk memperlihatkan adanya proses transfer (pengalihan) barang atau jasa pada pelanggan/pembeli dalam jumlah yang disepakati dan menggambarkan imbalan yang akan diterima perusahaan (penjual) atau yang diekspektasikan untuk diterima/didapat pada saat diselesaikannya pertukaran tersebut. Pengakuan (*recognition*) merupakan proses mencatat dan melaporkan dengan formal pada pos atau akun laporan keuangan (Bazley et al., 2010).

Pada PSAK 72 mensyaratkan entitas untuk melaksanakan analisis proses pengakuan pendapatan dalam lima tahapan. Untuk lebih jelasnya, setiap tahapan adapt dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap pertama pengidentifikasian kontrak dengan pembeli.

Kontrak merupakan kesepakatan atau kesepakatan secara tertulis maupun lisan atau berdasarkan praktik yang berlaku umum, antara dua atau lebih pihak yang dapat menciptakan terjadinya hak atau kewajiban. Pada praktik akuntansi, kontrak memainkan peranan yang sangat penting. Sebab, pendapatan tersebut tidak akan dapat diakui sampai kontrak itu ada. Kontrak membagikan informasi mengenai penerimaan imbalan yang merupakan hak dari perusahaan serta menjalankan kewajiban perusahaan dalam mengalihkan produknya kepada pelanggan.

Contoh: Tanggal 1 Maret 2023, telah ditandatangani kontrak antara PT Berlian Motors dan PT Pandawa. Kesepakatan pada

kontrak produk akan dialihkan sebanyak 20 unit diakhir bulan Juli, sehingga PT Pandawa diharuskan membayar penuh sebesar Rp20 milyar pada akhir Agustus. Harga pokok penjualan produk Rp15 milyar.

Jurnal untuk mencatat transaksi di atas (dalam Milyar).

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
31 Juli 23	Accounts Receivable		20	
	Sales Revenue			20
	Cost of Goods Sold		15	
	Inventory			15

Setelah menerima pembayaran tunai pada 31 Agustus 2023, jurnal yang dibuat PT Berlian sebagai berikut (dalam milyar).

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
31 Agus. 23	Cash		20	
	Accounts Receivable			20

2. Tahap kedua pengidentifikasian dalam kontrak untuk kewajiban kinerja yang terpisah.

Kewajiban pekerjaan merupakan kewajiban kontrak dalam menyediakan produk tertentu kepada pelanggan/pembeli. Kasus di atas, Berlian baru memenuhi satu kewajiban pekerjaan dengan menyerahkan dua puluh unit produknya Pandawa. Apabila pada kontrak ditentukan bahwa Berlian setuju memberikan jasa maintenance selama 6 (enam) bulan, maka jasa perawatan yang diberikan tersebut merupakan kewajiban pekerjaan (*separate performance obligation*) tersendiri. Agar suatu perusahaan dapat menentukan ada tidaknya kewajiban pekerjaan, ia harus memiliki produk (barang/jasa) yang jelas dan terinci sehubungan dengan syarat bentuk transaksi yang terjadi.

Namun, dalam penentuan kontrak tersebut apakah terdapat satu atau lebih kewajiban, diperlukan evaluasi terhadap sejumlah produk yang dicantumkan dalam kontrak yang memiliki karakter spesifik, mandiri (tidak bergantung), dan mempunyai harga jual tersendiri. Apabila kewajiban pekerjaan tidak bergantung satu dengan yang lain dan dapat dijual dengan mandiri, maka kewajiban pekerjaannya dapat digolongkan sebagai kewajiban yang tidak terikat dan terpisah. Akan tetapi, jika suatu kewajiban pekerjaannya bergantung satu sama lainnya dan terikat, maka beberapa kewajiban dari pekerjaannya digabung menjadi satu dan dilaporkan untuk satu kewajiban pekerjaan.

3. Tahap ketiga adalah menentukan harga dari transaksi kontrak.

Harga transaksi terdiri banyaknya imbalan yang diekspektasikan dari pelanggan/pembeli yang diterima penjual (perusahaan). Suatu kontrak umumnya menyatakan harga dari transaksi agar dapat diidentifikasi. Tetapi, dalam kontrak tertentu, tidak mudah untuk menentukan/mengidentifikasi harga dari transaksi. Perusahaan (penjual), harus menyesuaikan kondisi berikut untuk menentukan harga transaksi: imbalan variabel, nilai waktu uang, imbalan non-tunai, dan imbalan yang dibayarkan atau terutang.

Contoh: PT Adhi Karya menandatangani kontrak dengan pelanggan untuk membangun gedung seharga Rp100 Miliar, dengan bonus kinerja sebesar Rp50 Miliar yang dibayarkan saat penyelesaian pekerjaan. Bonus kinerja akan berkurang sebanyak 10% untuk setiap minggunya pada saat penyelesaian yang disepakati menyimpang. Sebelumnya PT Adhi Karya memiliki

pengalaman serupa dengan syarat kontrak seperti itu. Manajemen memprediksikan bahwa 60% kemungkinan kontrak dapat selesai sesuai tanggal yang menjadi kesepakatan, 30% selesai dengan keterlambatan 1 (satu) minggu, dan 10% selesai dengan keterlambatan 2 (dua) minggu.

Harga transaksi yang diestimasikan untuk imbalan PT Adhi Karya sebagai haknya tersebut adalah sebagai berikut (dalam milyar).

Tepat waktu: peluang 60% Rp150 $[Rp100 + (Rp50 \times 1.0)]$

=Rp 90,00

Lambat 1 minggu: peluang 30% dari Rp145 $[Rp100 + (Rp50 \times 0.9)]$

=Rp 43,50

Lambat 2 minggu: peluang 10% dari Rp140 $[Rp100 + (Rp50 \times 0.8)]$

=Rp 14,00

Rp147,50

Total harga transaksi adalah Rp147,50M berdasarkan atas estimasi metode probabilitas tertimbang dan manajemen pada saat pelaporannya harus memperbaiki estimasinya.

Apabila suatu komponen pembiayaan yang signifikan terpenuhi dalam suatu transaksi, maka transaksi tersebut ditentukan dengan memperkirakan imbalan yang disepakati atau mendiskontokan pembayaran dengan memperhitungkan suku bunga. Dalam hal ini, perusahaan dapat melaporkan dampak pembiayaan dapat menjadi pendapatan bunga atau beban bunga.

Contoh: 1 July 2023, Philips Ltd. menjual produknya kepada Kesatuan Co. dengan harga Rp900 Juta dengan 4 tahun imbalan tanpa bunga dengan nominal Rp 1.416,163 Juta. Harga pokok

penjualan sebesar Rp 590 Juta. Asumsikan tingkat bunga yang diperhitungkan 12%.

Jurnal untuk mencatat penjualan, COGS dan pendapatan bunga Philips ke Kesatuan sebagai berikut.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
1 Jul. 23	Notes Receivable (Rp1.416,163–Rp516,163)		900	
	Sales Revenue			900
	Cost of Goods Sold		590	
	Inventory			590
31 Des. 23	Notes Receivable		54	
	Interest Revenue ($12 \times \frac{1}{2} \times \text{Rp}900$)			54

Imbalan non tunai dapat berupa barang, jasa, atau imbalan non tunai lainnya. Perusahaan mengakui imbalan non tunai berdasarkan nilai wajar pada bentuk kontribusi yang diterimanya.

Contoh: Maspion Co. memberikan diskon 3% kepada pembelinya apabila membeli paling sedikit Rp 2 Milyar terhadap produknya dalam satu tahun. Tanggal 31 Maret 2023, Putra Co. membeli sebesar Rp700 Juta. Dalam 2 tahun sebelumnya, Putra Co. membeli lebih dari Rp 3 Milyar untuk periode 3 Mei hingga akhir desember 2022. Asumsikan Maspion membuat laporan keuangan untuk per triwulan.

Maspion akan mengurangi pendapatan Rp21 Juta ($700 \text{ Juta} \times 3\%$) untuk kemungkinan estimasi potongan harga yang akan diberikan. Pendapatan adalah 679 Juta ($\text{Rp}700 \text{ Juta} - \text{Rp}21 \text{ Juta}$).

Jurnal yang harus dibuat Maspion pada 31 maret 2023, untuk mengakui pendapatan, piutang dagang dan ambang diskon (dalam juta).

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
31 Mar. 23	Accounts Receivable		20	
	Sales Revenue			20
	(untuk mencatat pendapatan)			
	Cash		679	
	Accounts Receivable			679
	(untuk mencatat piutang)			
	Cash		679	
	Accounts Receivable			679
	Sales (Volume) Discounts Forfeited			679
	(untuk mencatat jika pelanggan gagal memenuhi ambang diskon)			

Kadang-kadang pelanggan ditawarkan imbalan oleh dalam bentuk layanan tidak berbayar, diskon, rabat, produk gratis, voucher dan kupon. Umumnya, komponen-komponen tersebut dapat menurunkan imbalan dari jumlah yang diterima yang diakui perusahaan.

4. Tahapan keempat mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja yang terpisah pada kontak

Alokasi terhadap harga dari suatu transaksi dalam tiap kewajiban pekerjaan yang didasarkan pada nilai wajar masing-masing kewajiban. Pengukuran terbaik nilai wajar dengan melihat perusahaan apakah dapat menjual produknya (barang atau jasa) dengan harga jual mandiri (*standalone basis*).

PT Wika adalah produsen peralatan yang digunakan dalam industri konstruksi. Produk Wika merupakan mesin otomatis hingga mesin dengan sistem yang kompleks. PT Pandu membeli peralatan dari PT Wika dengan harga Rp 2.000 juta termasuk jasa instalasi. Jasa pemasangan/instalasi yang termasuk dalam kontrak diperkirakan memiliki harga jual mandiri Rp 20 juta, sedangkan jasa pelatihan diperkirakan Rp 50 juta. PT Pandu wajib

membayar PT Wika Rp 2.000 juta pada saat pengiriman dan instalasi peralatan. PT Wika menyerahkan dan menyelesaikan instalasi peralatan pada tanggal 1 November

Apabila Wika melaksanakan lebih dari satu kewajiban kinerja pembayaran sebesar Rp 2.000 juta pada tanggal 1 November 2023. Pelatihan akan dimulai setelah pemasangan selesai dan diselenggarakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan umur peralatan diperkirakan selama 10 tahun.

Total pendapatan Rp 2.000 juta perlu dialokasikan pada tiga elemen sesuai harga jual relative yang terpisah. Harga jual dari peralatan yang terpisah adalah Rp 2.000 Juta, biaya instalasi Rp 20 Juta dan pelatihan Rp 50 Juta. Oleh karena itu, total harga jual produk secara terpisah adalah Rp 2.070 Juta (2.000 +20 +50). Alokasinya sebagai berikut (dalam jutaan rupiah).

Peralatan	1.932,367	$[(2.000 : 2.070) \times 2.000]$
Instalasi	19,324	$[(20 : 2.070) \times 2.000]$
Pelatihan	48,309	$[(50 : 2.070) \times 2.000]$

Berikut jurnal yang diperlukan PT Wika untuk 1 November 2023

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
1 Nov. 23	Cash		2.000	
	Service revenue (installation)			19,324
	Unearned service revenue			48,309
	Sales revenue			1.932,367

Asumsikan harga perolehan peralatan adalah Rp 1.500 Juta, jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan sebagai berikut.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
1 Nov. 23	Cost of Goods Sold		1.500	
	Inventory			1.500

Pada 31 Desember PT Wika mengakui pendapatan pelatihan selama 2 bulan Rp 8,052 juta [$2 \times (48,309 : 12)$].

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
31 Des. 23	Unearned service revenue		8,052	
	Service revenue (training)			8,052

Pada tahun 2024 PT Wika mengakui sisa pendapatan pelatihan, diasumsika penyesuaian jurnal dicatat pada tanggal 31 Desember 2024.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
31 Des. 24	Unearned service revenue		40,257	
	Service revenue (training) (48,309-8,052)			40,257

5. Tahap kelima mengenali pengakuan pendapatan pada setiap kewajiban yang dipenuhi

Menurut Kieso et al. (2020), perusahaan dapat dikatakan selesai memenuhi harapan dalam kewajiban kinerjanya dan pelanggan sudah memperoleh kontrol terhadap barang dan/atau jasa dengan sejumlah perubahan indikator dibawah.

- Perusahaan mempunyai hak untuk pembayaran atas aset.
- Perusahaan sudah memindahkan hak legal atas aset.
- Perusahaan sudah menggeser kepemilikan wujud aset.
- Pelanggan mendapat risiko dan utilitas kepemilikan yang berarti.
- Pelanggan sudah mendapatkan asetnya.

Kieso et al. (2020) selanjutnya menjelaskan perusahaan mengakui pendapatannya atas kewajiban kinerja dari periode ke periode melalui memperkirakan kemajuan atas penyelesaian pekerjaan atau kewajibannya.

Beberapa Isu Lain Terkait Masalah Pengakuan Pendapatan

Sejumlah transaksi, memiliki beberapa ketentuan spesifik terkait masalah-masalah dalam mengakui pendapatannya.

1. *Sales Returns and Allowances*

Sejumlah kontrak penjualan memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli dengan mengembalikan dana pelanggan secara penuh atau pengurangan sebagian tagihan dengan mengkredit piutang pembeli, atau mengganti produk lain sebagai gantinya untuk pembeli. Perusahaan dapat mengakui pendapatannya dengan menyesuaikan pendapatan yang diharapkan atas pengembalian barang yang dikembalikan pembeli dan penyesuaian terhadap asset yang berkaitan dengan *Cost of Good Sold (COGS)* dari pengembalian barang tersebut.

Misal, Asumsikan tanggal 12 Januari 2023, PT Nokia menjual 100 handphone seharga \$100 secara kredit kepada Panasonic Ltd. Nokia memberikan berbagai fasilitas pada Panasonic untuk mengembalikan handphone yang tidak terpakai dalam jangka waktu 60 hari setelah pembelian. Biaya setiap handphone \$60. Nokia dapat memperkirakan:

- a. Produk yang akan kembali sebanyak tiga,
- b. Pemulihan atas biaya produk tidak akan signifikan, dan
- c. Produk yang diretur dapat dijual lagi untuk mendapat keuntungan.

Jurnal untuk mencatat transaksi atas penjualan handphone.

<u>Tanggal</u>	<u>Akun</u>	<u>Ref</u>	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>
12 Jan 2022	Accounts Receivable		10.000	
	Sales Revenue (100 x \$100)			10.000
	Cost of Goods Sold		6.000	
	Inventory (100 x \$60)			6.000

Asumsikan 24 Januari 2024, Panasonic mengembalikan sebanyak dua handphone. Nokia pada 31 Januari 2024 dalam laporan menyiapkan kemungkinan adanya satu handphone yang dikembalikan, sehingga dicatat pada jurnal sebagai berikut.

<u>Tanggal</u>	<u>Akun</u>	<u>Ref</u>	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>
24 Jan 2024	Sales Returns and Allowances		200	
	Accounts Receivable (2 x \$100)			200
	Returned Inventory		120	
	Cost of Goods Sold (2 x \$60)			120

Perkiraan awal Nokia bahwa kemungkinan ada tiga handphone yang dikembalikan, dan Nokia yakin atas estimasinya itu benar sehingga untuk penyesuaian jurnal sebagai berikut.

<u>Tanggal</u>	<u>Akun</u>	<u>Ref</u>	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>
31 Jan 2024	Sales Returns and Allowances		100	
	Return Liability (1 x \$100)			100
	Estimated Inventory Returns		60	
	Cost of Goods Sold (1 x \$ 60)			60

Berikut laporan laba rugi dan posisi keuangan PT Nokia

PT NOKIA Net Income January 31, 2024	
Sales revenue (100x\$100)	\$10.000
Less: sales returns & allowance (\$200 + \$100)	<u>300</u>
Net sales	9.700
Cost of Goods Sold (COGS) (97x\$60)	<u>5.820</u>
Gross profit	\$3.880

PT NOKIA Statement Financial Position For the Period Ended January 31, 2024	
Account Receivable (\$10.000-\$200)	\$9.800
Refund Liability	<u>100</u>
Account Receivable (net)	9.700
Returned Inventory (Including estimated) (3 x \$60)	180

2. Repurchase Agreements

Perjanjian jual beli dimana perusahaan untuk mentransfer asset ke pelanggan memiliki kewajiban untuk membeli kembali asset yang sudah dijual ke pelanggan dikemudian hari dengan jangka waktu dan harga yang disepakati. Apabila hak atau kewajiban untuk membeli kembali harganya lebih tinggi dari nilai jualnya, maka kategori transaksi tersebut merupakan jenis transaksi pembiayaan.

Misal, CV Mitsubishi Motors, pada tanggal 1 Januari 2023 menjual mobil ke PT Honda senilai \$100,000. CV Mitsubishi menyetujui untuk membeli mobil itu kembali tanggal 31 Desember 2024, dengan nilai \$121.000. Asumsikan suku bunga yang digunakan dalam kontrak tersebut sebesar 10%, CV Mitsubishi mencatat pembiayaan tersebut pada jurnal berikut.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
1 Jan 2023	Cash		\$100.000	
	Liability to PT Honda			\$100.000

Tanggal 31 Desember 2023 jurnal yang diperlukan CV Mitsubishi adalah.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
31 Des 2023	Interest Expense		\$10.000	
	Liability to PT Honda			\$10.000

*(10% x \$100.000)

Pada tanggal 31 Desember 2024 CV Mitsubishi membuat jurnal untuk transaksi saat pembelian kembali sebagai berikut.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
31 Des 2024	Cash		\$100.000	
	Liability to PT Honda*			\$100.000
	Liability to PT Honda**		\$121.000	
	Cash			\$121.000

*(10% x \$100.000)

*(\$100.000 + \$10.000 + \$11.000)

3. *Bill and Hold Arrangements*

Perjanjian kontrak dimana perusahaan telah memberikan *bill* (tagihan) kepada pelanggan, namun perusahaan masih mempertahankan kepemilikan fisik produk yang dijual (*hold*) karena ketidaksiapan pembeli dalam menerima produk. Pengakuan pendapatan diakui perusahaan waktu pelanggan telah memegang kendali (kontrol) produknya.

Misal, Tunggal Jaya Co. menjual mesin produksi dengan harga €450.000 dengan harga pokok sebesar €280.000 pada 1 Maret 2023 ke Makmur Jaya ltd. yang sedang mengekspansi usahanya. Berdasarkan perjanjian tersebut, Makmur Jaya ltd. meminta Tunggal Jaya co. untuk menempatkan mesin tersebut di gudang Tunggal Jaya co. sampai dengan pabrik industri baru Makmur Jaya ltd. siap menampung mesin produksi tersebut. Kepemilikan mesin produksi telah diserahkan ke Makmur Jaya saat kontrak ditandatangani selesai.

Tunggal Jaya mengakui akan pendapatannya saat Makmur Jaya telah mengambil alih kendali terhadap mesin. Supaya Makmur Jaya mendapatkan kendali atas mesin produksi, apabila semua kriteria di bawah terpenuhi.

- Alasan perjanjian harus substantif.
- Produk dapat diidentifikasi secara mandiri dengan Makmur Jaya sebagai milik.
- Fisik dari produk siap dikirim ke Makmur Jaya.
- Tunggal Jaya tidak memiliki otoritas dalam memanfaatkan produk dan menjualnya ke pihak lain.

Kasus di atas semua kriteria sudah dipenuhi sehingga Tunggal Jaya dapat mencatat pendapatannya saat kontrak selesai ditandatangani pada jurnal berikut.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
1 Mar. 2023	Accounts Receivable		€450.000	
	Sales Revenue			€450.000
	Cost of Goods Sold		€280.000	
	Inventory			€280.000

4. *Principal-Agent*

Perjanjian kerjasama antara *agent* dan *principal* (penjual induk). *Principal* memiliki kewajiban kinerja dalam menyediakan barang dan/atau jasa untuk pelanggan, sementara itu kewajiban kinerja *agent* mendukung *principal* untuk menjual produk yang barang atau jasa ke pelanggan.

Hasil dari penjualan total barang yang dijual merupakan pendapatan *principal*, bukan pendapatan *agent*. Sedangkan pendapatan *agent* hanya sejumlah komisi yang diterimakan dari pihak *principal*. Selanjutnya, *principal* dapat mengakui

pendapatannya pada saat barang dan atau jasa dapat terjual ke pelanggan.

5. Konsinyasi/*Consignment*

Hubungan *principal* dan *agent* dimana *consignor* (atau produsen atau *wholesaler*) sebagai *principal* mengirimkan barang kepada *consignee (dealer)* sebagai agennya untuk menjual produk yang dimiliki *consignor* kepada pelanggan. *Consignor* tetap memegang hak kepemilikan barang sampai dengan barang terjual. Pengakuan pendapatan oleh *consignor* pada saat dilaporkan dan diserahkannya hasil penjualan dari pelanggan oleh *consignee*. Sedangkan pengakuan pendapatan yang diakui *consignee* pada saat *consignor* memberikan sejumlah komisinya.

Misal, PT Selaras (*consignor*) menyerahkan barang konsinyasi sebesar \$36.000 kepada Ramayana Store (*consignee*). PT Selaras membayar \$3.750 untuk biaya pengiriman, dan Ramayana Store membayar biaya iklan sebesar \$2.250 yang nantinya dapat reimburse ke PT Selaras. Di akhir tahun, Ramayana store menjual 2/3 (dua pertiga) dari barang dagangan sebesar \$40.000 dengan tunai. Ramayana Store kemudian melaporkan dan meyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada PT Selaras sekaligus meminta komisinya yang 10%. Selaras dan Ramayana Store mencatat atas transaksinya sebagai berikut.

PT Selaras (Consignor)		Ramayana Store (Consignee)	
<u>Pengiriman barang konsinyasi</u>			
Inventory (consignments)	\$36.000	Tidak ada jurnal (memorandum)	
Finished Goods Inventory	\$36.000		
<u>Pembayaran biaya angkut oleh consignor</u>			
Inventory (consignments)	\$3.750		
Cash	\$3.750		
<u>Pembayaran biaya iklan oleh consignee</u>			
Tidak ada jurnal sampai ada pelaporan		Receivable from consignor	\$2.250
		Cash	\$2.250
<u>Penjualan barang konsinyasi</u>			
Tidak ada jurnal sampai ada pelaporan		Cash	\$40.000
		Payable to consignor	\$40.000
<u>Pelaporan penjualan dan beban serta pembayaran kewajiban</u>			
Cash	\$33.750	Payable to consignor	\$40.000
Advertising Expense	\$ 2.250	Receivable from consignor	\$ 2.250
Commission Expense	\$ 4.000	Commission Revenue	\$ 4.000
Revenue from Consignment Sales	\$40.000	Cash	\$33.750
<u>Penyesuaian harga pokok barang konsinyasi yang terjual</u>			
Cost of Goods Sold	\$26.500	Tidak ada jurnal	
Inventory (consignments)	\$26.500		
*(2/3 x (36.000+37.500))			

6. Garansi/Warranties

Kesepatakan pada kontak atas jaminan produk yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggan telah memenuhi spesifikasinya. Ada dua **tipe garansi**, yaitu: tipe **pertama** garansi yang harganya sudah termasuk pada harga jual (garansi dengan jaminan/*assurance type warranty*), dan tipe **kedua** garansi yang dijual terpisah dan dihitung mandiri/terpisah sebagai kewajiban kinerja (*garansi layanan/service-type warranty*).

Misal, Aladin Ltd. menjual 1.000 unit computer pada 1 Oktober 2022 dengan tunai pada harga \$6.000.000, dengan jaminan garansi bahwa produk terbebas dari cacat. Biaya harga pokok penjualan untuk computer tersebut \$4.000.000. Jaminan garansi adalah 2 tahun, dengan biaya estimasi \$80.000. Selain itu, Aladin Ltd. menjual perpanjangan garansi untuk 400 unit komputer sebesar \$18.000. Pada 22 November 2022, Aladin Ltd.

mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja \$3.000 dan biaya *spare part* \$25.000 untuk pemberian garansi. Aladin Ltd. mengestimasi biaya jaminan garansi masa yang akan datang \$44.000 pada 31 Desember 2022.

Transaksi yang perlu dicatat pada jurnal saat penjualan sebagai berikut.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
1 Okt. 2022	Cash (6.000.000+18.000)		6.018.000	
	Sales Revenue			6.000.000
	Unearned Warranty Revenue			18.000
	Cost of Goods Sold		4.000.000	
	Inventory			4.000.000

Jurnal untuk mencatat beban garansi yang dikeluarkan Aladin Ltd.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
22 Nov. 2022	Warranty Expense		28.000	
	Salaries and Wages Payable			3.000
	Inventory			25.000

Jurnal penyesuaian yang diperlukan.

Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit
31 Des. 2022	Warranty Expense		44.000	
	Warranty Liability			44.000

7. *Non Refundable Upfront Fees*

Pembayaran di muka yang diterima oleh penjual dan tidak dapat ditarik kembali. Pembayaran di muka tersebut biasanya terkait dengan aktivasi atau permulaan aktivitas barang atau jasa yang akan disediakan di masa depan, seperti iuran anggota pada club kebugaran, biaya aktivasi ponsel (telpon seluler/HP), internet, dan langganan televisi kabel.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian

Apabila satu diantara pihak pada kontrak telah menjalankan kewajiban kinerjanya, kontrak perusahaan dapat disajikan sebagai asset dalam laporan posisi keuangan atau liabilitas, tergantung pada hubungan kinerja perusahaan dan pelunasan yang dibayarkan oleh pelanggan.

Perusahaan menyajikan asset kontrak yang terdiri dari *conditional rights* dan *unconditional rights*: *Conditional rights* (hak bersyarat) berupa imbalan yang diterima perusahaan akibat telah dipenuhinya satu kewajiban kinerja namun masih ada kewajiban kinerja lainnya yang belum terpenuhi untuk dapat menyampaikan tagihannya pada pelanggan, dalam hal ini perusahaan harus melaporkannya secara terpisah sebagai asset kontrak pada laporan posisi keuangan. *Unconditional rights* (hak tanpa syarat) merupakan imbalan yang diterima akibat telah terpenuhinya kewajiban kinerja perusahaan. Perusahaan melaporkannya pada posisi laporan keuangan sebagai piutang untuk *unconditional rights*.

Kontrak disajikan sebagai liabilitas ketika perusahaan telah menerima pembayaran dari pelanggan sehingga perusahaan memiliki kewajiban dalam mengalihkan barang dan/atau jasa ke pelanggan (Arif et al., 2021). Liabilitas kontrak biasanya dicatat dalam pos/akun *unearned service revenue*, *unearned sales revenue*, atau akun yang sesuai lainnya (Mahrus & Biswan, 2019).

Pengungkapan

Perusahaan mengungkapkan pendapatan dan arus kas perusahaan dari adanya kontrak dengan pelanggan seperti jumlah, sifat, ketidakpastian pendapatan dan waktu. Informasi yang diperlukan dalam pengungkapan adalah informasi kualitatif dan kuantitatif yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Kontrak dengan pelanggan meliputi: a) penguraian pendapatan berdasarkan sifat, jumlah, waktu dan ketidakjelasan pendapatan, b) sisa kontrak, c) pelaksanaan kewajiban, d) alokasi harga transaksi terhadap sisa kewajiban.
2. Pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan, yang dibuat terhadap kontrak, terdiri dari penentuan: a) waktu penyelesaian kewajiban, b) harga transaksi yang dialokasikan atas kewajiban.
3. Asset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan, terdiri dari: 1) pertimbangan jumlah biaya beserta saldonya, 2) pertimbangan metode amortisasi yang digunakan beserta jumlahnya (Arif et al., 2021).

Selain pengungkapan di atas, perusahaan juga harus perlu menyediakan pengungkapan lainnya seperti pemisahan pendapatan, penyesuaian saldo kontrak, sisa dari kewajiban kinerja, biaya untuk mendapatkan kontrak.

Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi Jangka Panjang

Pada kontrak konstruksi jangka panjang, biasanya kontraktor (penjual) sering kali menyerahkan faktur (tagihan) secara berkala kepada pemesan proyek (pembeli) selama masa konstruksi berlangsung. Dalam hal ini, kontraktor dapat mengakui pendapatan

selama berjalannya proyek (bangunan), meskipun proyek tersebut belum berakhir.

Kontraktor (perusahaan) dapat mengakui pendapatan sepanjang pelaksanaan proyek konstruksi apabila salah satu dari tiga kriteria berikut terpenuhi.

1. Pelanggan secara bersamaan mendapatkan dan menggunakan manfaat dari kinerja perusahaan seperti yang dilakukan penjual.
2. Kinerja perusahaan mampu menghasilkan asset dengan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya (misalnya, barang dalam proses); atau
3. Kinerja perusahaan menghasilkan asset untuk memenuhi tujuan pesanan pelanggan bukan untuk menggunakan asset tersebut.

Ketika salah satu dari tiga kriteria tersebut terpenuhi, maka perusahaan dapat mengakui pendapatan selama periode pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan ketentuan perusahaan dapat mengestimasi kemajuan penyelesaian kewajiban pekerjaan. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian untuk mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan penyelesaian konstruksi.

Namun, jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat penyelesain kontrak selesai, yang disebut dengan metode *the cost-recovery (zero-profit method)*.

1. Metode Persentase Penyelesaian/*The Percentage-of-Completion Method*

Tahapan dalam pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian.

- a. Pertama menghitung persentase penyelesaian, hal ini dilakukan dengan menghitung total biaya yang dikeluarkan sampai tanggal pelaporan (*cost to date*) yang dibagi dengan estimasi dari total biaya konstruksi.
- b. Kedua, mengalikan persentase penyelesaian dengan total estimasi pendapatan.
- c. Ketiga, menghitung pendapatan periode berjalan yang diakui dengan mengurangi hasil perkalian persentase penyelesaian dengan total estimasi pendapatan (hasil perhitungan pada tahapan ke-2) dengan pendapatan total yang telah diakui untuk periode sebelumnya.
- d. Keempat, membuat jurnal yang untuk mencatat pengakuan pendapatan tersebut.

Misal: PT Agung Podomoro memiliki nilai kontrak sebesar €4.500.000 untuk membangun perumahan dengan estimasi biaya €4.000.000. Kontrak dimulai pada 1 Juli 2022 dan perkiraan perumahan selesai pada akhir Oktober 2024. Berikut informasi data dalam penyelesaian kontrak.

	2022	2023	2024
Costs to date	€1.000.000	€2.916.000	€4.050.000
Estimated costs to complete	€3.000.000	€1.134.000	0
Billing Progress to date	€ 900.000	€2.400.000	€1.200.000
Cash collected to date	€ 750.000	€1.750.000	€2.000.000

Untuk menghitung persentase penyelesaian dan estimasi gross profit dari data di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

PENDAPATAN

	2022	2023	2024
Contract price	€4.500.000	€4.500.000	€4.500.000
Less estimated costs:			
Costs to date	€1.000.000	€2.916.000	€4.050.000
Estimated costs to complete	<u>€3.000.000</u>	<u>€1.134.000</u>	<u>0</u>
Estimated total costs	<u>€4.000.000</u>	<u>€4.050.000</u>	<u>€4.050.000</u>
Estimated total gross profit	€ 500.000	€ 450.000	€ 450.000
Percent complete*	25%	72%	100%

*Costs to date/Estimated total costs

Pendapatan yang diakui oleh PT Agung Podomoro dengan perhitungan *cost to cost basis* adalah sebagai berikut.

	To Date	Recognized in Prior Years	Recognized in Current Year
2022			
Revenues (25% x 4.500.000)	1.125.000		1.125.000
Costs	<u>1.000.000</u>		<u>1.000.000</u>
Gross Profit	125.000		125.000
2023			
Revenues (72% x 4.500.000)	3.240.000	1.125.000	2.115.000
Costs	<u>2.916.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.916.000</u>
Gross Profit	324.000	125.000	199.000
2024			
Revenues (100% x 4.500.000)	4.500.000	3.240.000	1.260.000
Costs	<u>4.050.000</u>	<u>2.916.000</u>	<u>1.134.000</u>
Gross Profit	450.000	324.000	126.000

Jurnal yang dibuat oleh PT Agung Podomoro adalah sebagai berikut.

1. Untuk mencatat biaya konstruksi: Construction in Process (CIP) Materials, cash, payables, etc.	1.000.000 1.000.000	1.916.000 1.916.000	1.314.000 1.314.000
2. Untuk mencatat tagihan Accounts Receivable Billings on CIP	900.000 900.000	2.400.000 2.400.000	1.200.000 1.200.000
3. Untuk mencatat penerimaan kas Cash Accounts Receivable	750.000 750.000	1.750.000 1.750.000	2.000.000 2.000.000
4. Untuk mengakui revenue dan gross profit Constructions in Process (Gross Profit) Constructions Expenses Revenue from Long-Term Contracts	125.000 1.000.000 1.125.000	199.000 1.916.000 2.115.000	126.000 1.134.000 1.260.000
5. Untuk mencatat penyelesaian kontrak Billing on CIP Constructions in Process			4.500.000 4.500.000

2. *The Cost-Recovery (Zero-Profit) Method*

Cost-recovery method ini mengakui pendapatannya hanya sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diestimasi dapat terpulihkan. Dalam hal ini, perusahaan hanya dapat mengakui laba kotornya pada saat semua biaya konstruksi diakui. Biasanya semua biaya konstruksi tertutupi saat kontrak telah selesai.

Kasus PT Agung Podomoro di atas, jika perusahaan menggunakan *cost-recovery method*, maka untuk perhitungan pendapatannya sebagai berikut.

	To Date	Recognized in Prior Years	Recognized in Current Year
2022			
Revenues (<i>biaya yang dikeluarkan</i>)	1.000.000		1.000.000
Costs	<u>1.000.000</u>		<u>1.000.000</u>
Gross Profit	0		0
2023			
Revenues (<i>biaya yang dikeluarkan</i>)	2.916.000	1.000.000	1.916.000
Costs	<u>2.916.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.916.000</u>
Gross Profit	0	0	0
2024			
Revenues (<i>biaya yang dikeluarkan</i>)	4.500.000	2.916.000	1.584.000
Costs	<u>4.050.000</u>	<u>2.916.000</u>	<u>1.134.000</u>
Gross Profit	450.000	0	450.000

Jurnal yang dibuat PT Agung Podomoro sebagai berikut.

	2022	2023	2024
1. Untuk mencatat beban:			
Construction Expenses	1.000.000	1.916.000	
Revenue from Long-Term Contracts	1.000.000	1.916.000	
(to recognize costs and related expenses)			
2. Untuk mencatat pendapatan:			
Construction in Process (Gross Profit)			450.000
Construction Expenses			1.134.000
Revenue from Long-Term Contracts			1.584.000
(to recognize costs and related expenses)			
3. Untuk mencatat penyelesaian kontrak			
Billing on CIP			4.500.000
Constructions in Process			4.500.000

- Pengakuan Pendapatan yang Mengalami Kerugian di Tahun Berjalan pada Kontrak Konstruksi

Kerugian pada periode berjalan atas kontrak karena adanya kenaikan estimasi biaya yang menyebabkan diperlukannya penyesuaian di periode berjalan atas laba kotor yang diakui pada periode sebelumnya. Hal ini hanya berlaku untuk *percentage-of-completion method*.

Asumsikan PT Agung Podomoro pada tanggal 31 Desember 2023, memperkirakan biaya dalam penyelesaian kontrak perumahan sejumlah €1.468.962 bukan €1.134.000. Asumsikan untuk data yang lainnya sama, PT Agung Podomoro dapat menghitung persentase penyelesaian dan mengakui kerugian sebagai berikut.

	2023
Costs to date (31/12/2023)	€2.916.000
Estimated costs to complete (revised)	<u>€1.468.962</u>
Estimated total costs	€4.384.962
Percent complete (€2.916.000: €4.384.962)	66.50%
Revenue recognized in 2023	€1.867.500
(€4.500.000 x 0.665) - €1.125.000	<u>€1.916.000</u>
Loss recognized in 2023	<u>€ (48.500)</u>

PT Agung Podomoro mencatat kerugian tahun 2023 sebagai berikut.

Construction Expense	€1.916.000
Construction in Process (loss)	€48.500
Revenue from Long-Term Contracts	€1.867.500

b. Pengakuan Pendapatan yang Mengalami Kerugian Secara Keseluruhan pada Kontrak Konstruksi

Kerugian secara keseluruhan pada kontrak (*unprofitable contract*) adalah seluruh kerugian kontrak yang diekspetasi pada tahun berjalan yang harus diakui perusahaan sehingga diperlukan penyesuaian atas pembebanan biaya (*cost*) pada

tahun tersebut. Hal ini berlaku untuk metode persentase penyelesaian (*percentage-of-completion method*) dan metode biaya terpulihkan (*cost-recovery method*).

Asumsikan kasus PT Agung Podomoro di atas mengalami seluruh kerugian atas kontrak jangka Panjang. Tanggal 31 Desember 2023, PT Agung Podomoro mengestimasi biaya untuk menyelesaikan kontrak sebesar €1.640.250 bukan €1.134.000. Estimasi biaya yang direvisi untuk kontrak tersebut adalah sebagai berikut.

Untuk mengilustrasikan seluruh kerugian atas kontrak jangka Panjang,

	2022	2023
	Oroginal Estimates	Revised Estimates
Contract price	€4.500.000	€4.500.000
Estimated total costs	<u>€4.000.000</u>	<u>€4.556.250</u>
Estimated gross profit	€ 500.000	
Estimated loss		€ (56.250)
* (€2.916.000 + €1.640.250)		

PT Agung Podomoro mengakui laba bruto €125.000 untuk tahun 2022. Jumlah ini harus saling hapus pada tahun 2023 karena sudah tidak ada ekspektasi yang dapat direalisasikan. Selain itu, kerugian harus segera diakui sesegera mungkin, Perusahaan harus mengakui kerugian pada tahun 2023 sebesar €181.250 (€125.000 + €56.250).

Revenue recognized in 2023:	
Contract price	€4.500.000
Percent complete	0.64*
Revenue recognizable to date	€2.880.125
Less: Revenue recognized prior to 2023	<u>€1.125.000</u>
Revenue recognized in 2023	€1.755.500

*Cost to date (12/31/2023)	€2.916.000
Estimated cost to complete	<u>€1.640.250</u>
Estimated total cost	€4.556.250
Percent complete	$\frac{€2.916.000}{€4.556.250} = 64\%$

Untuk menghitung biaya konstruksi yang harus dikeluarkan pada tahun 2023, PT Agung Podomoro menambahkan kerugian total yang harus diakui pada tahun 2023 sebesar € 181.250 (€125.000+€56.250) pada pendapatan yang akan diakui tahun 2023.

Revenue recognized in 2023 (computed above):	€1.755.000
Total loss recognized in 2023:	
Reversal of 2022 gross profit	<u>€ 125.000</u>
Total estimated loss on the contract	<u>€ 56.250</u> <u>€ 181.250</u>
Construction cost expensed in 2023	€1.936.250

Jurnal yang dibuat oleh PT Agung Podomoro untuk mengakui pendapatan kontrak, beban dan kerugian kontrak jangka Panjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Construction Expense	€1.936.250	
Construction in Process (loss)		€181.250
Revenue from Long-Term Contracts		€1.755.000

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. F., Anwar, & Wijayanti, N. A. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Salemba Empat.
- Bazley, J. D., Nikolai, L. A., & Jones, J. P. (2010). *Intermediate Accounting*. South-Western/Cengage Learning.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018a). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 68 Pengukuran Nilai Wajar*. IAI.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018b). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. IAI.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Intermediate Accounting Volume 2 IFRS Edition*. Wiley.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Mahrus, M. L., & Biswan, A. T. (2019). *Praktik Akuntansi Keuangan Menengah Buku 2*. PKN STAN PRESS Publising Unit.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Salemba Empat.

Biodata Penulis**Dr. Dewi Sarifah Tullah, M.Si., Ak., CA.**

Penulis tertarik terhadap Akuntansi pada tahun 2000, yang diawali dengan menempuh pendidikan Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pandu Madania pada Program Studi Akuntansi. Selanjutnya penulis menempuh Pendidikan Strata 2 Magister Sains Akuntansi di Universitas Jenderal Soedirman pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan selesai pada tahun 2011. Pendidikan Strata 3 ditempuh penulis di Universitas Padjadjaran pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Doktorat Ilmu Akuntansi pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2017. Penulis memilih untuk fokus sebagai dosen mulai tahun 2006 sebagai tenaga pengajar di STIE Pandu Madania. Penulis sekarang merupakan dosen dengan *homebase* di Perguruan Tinggi Swasta Bogor pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Penulis menekuni keahlian kompetensinya dalam bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik.

Email Penulis: dewisarifah@ibik.ac.id

BAB 9

AKUNTANSI UNTUK LEASING

Alfriadi Dwi Atmoko, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA
Universitas Amikom Yogyakarta

Pengertian Leasing (Sewa)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha: Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Barang modal yang dimaksud adalah setiap aset tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aset tetap berupa bangunan (plant) dan tanah serta aset dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *lessee*. *Finance lease* yang dimaksud adalah kegiatan sewa guna usaha yang memberikan hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa (residu) yang disepakati kedua belah pihak bagi *lessee*. Sedangkan *operating lease* tidak memiliki hak opsi tersebut.

Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Leasing

Di setiap transaksi leasing paling tidak terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat, yaitu: *lessor*, *lessee*, *supplier* dan bank/kreditor.

1. **Lessor** adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha;
2. **Lessee** adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *Lessor*; Pembayaran Sewa-guna-usaha (*Lease Payment*) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh *Lessee* kepada *Lessor* selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha;
3. **Supplier** adalah perusahaan atau pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang kepada *lessee* tanpa melalui pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease*, *supplier* menjual barangnya langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala;
4. **Bank** atau kreditor merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kontrak *leasing*, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease* di mana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank.

Peraturan Akuntansi Sewa

Peraturan yang mengatur tentang sewa di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73. Adanya penetapan PSAK 73 sewa sejak 2017 oleh Dewan Standar Akuntansi

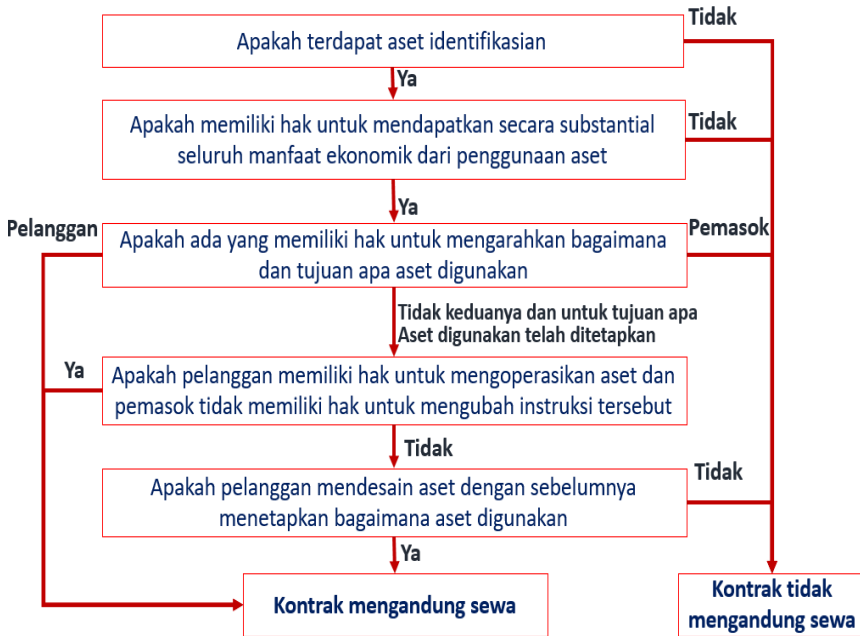
Keuangan (DSAK) menggantikan standar akuntansi sewa yang relevan sebelumnya seperti PSAK 30, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8, ISAK 23, ISAK 24, dan ISAK 25. DSAK telah mengesahkan PSAK 73 tentang Sewa yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Cakupan PSAK 73 memang lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan standar akuntansi sebelumnya, terlihat bahwa standar ini dapat menggantikan aturan seperti ISAK 24 yang mengatur substansi transaksi sewa dan ISAK 25 yang mengatur hak tentang tanah. Transaksi sewa sendiri terbagi menjadi dua jenis di mana ini dapat mempengaruhi bagaimana liabilitas dan likuiditas tercatat dalam laporan keuangan.

Identifikasi Sewa

Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset misal unit produksi. Apabila syarat dan ketentuan kontrak berubah, maka entitas menilai kembali.

1. Aset identifikasi: 1) ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit, 2) pemasok (supplier tidak memiliki hak substitusi substantive), 3) bagian kapastias aset secara fisik dapat dibedakan
2. Penyewa secara substantial mendapat manfaat ekonomik dari penggunaan aset
3. Penyewa mengarahkan penggunaan aset
4. Kontrak mengandung sewa

Untuk lebih jelas cara mengidentifikasi sewa dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Klasifikasi Sewa

Dalam sewa terdapat dua jenis sewa yang dapat mempengaruhi bagaimana liabilitas dan likuiditas tercatat dalam laporan keuangan. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis sewa:

1. Sewa Pembiayaan (*finance lease*)

Sewa pembiayaan atau *finance lease* merupakan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko yang terkait kepemilikan suatu aset kepada *lessee*. Hak kepemilikan pada akhir periode dapat dialihkan ataupun tidak. Sewa dapat diklasifikasikan sebagai *finance lease* apabila memenuhi satu syarat dari beberapa syarat sebagai berikut ini:

-
- a. Pada masa akhir masa sewa terdapat transfer kepemilikan kepada *lessee*.
 - b. *Lessee* memiliki hak opsi untuk membeli aset sewa pada harga yang lebih rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan.
 - c. Masa sewa adalah lebih dari 75% umur ekonomis aset sewaan.
 - d. Nilai kini atau nilai *present value* dari jumlah minimum lease payment (MLP) secara substansial yaitu sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan.
 - e. Aset sewaan bersifat khusus dan hanya *lessee* yang dapat menggunakan tanpa perlu ada modifikasi secara material.
- a. Pengakuan dan Pengukuran
- Pada tanggal permulaan, *lessor* mengakui aset yang dimiliki dalam *finance lease* dalam laporan posisi keuangan dan menyajikan sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Cara menentukan pengukuran awal dalam *finance lease* sebagai berikut:
- 1) *Lessor* menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengatur investasi neto sewa.
 - 2) Jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka *lessor* dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama (d disesuaikan dengan biaya langsung awal yang terkait dengan subsewa) untuk mengukur investasi neto dalam subsewa.
-

- 3) Biaya langsung awal, selain yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan atau diler, dimasukkan dalam pengukuran awal investasi netto dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa.

b. Investasi Neto Sewa

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi netto sewa meliputi pembayaran atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal permulaan sebagai berikut:

- 1) pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi dengan insentif sewa terutang;
- 2) pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- 3) jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa, pihak yang terkait dengan penyewa, atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara finansial mampu melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut;
- 4) harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan
- 5) pembayaran penalti karena menghentikan sewa, jika penyewa akan mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

c. Pengukuran Selanjutnya

- 1) *Lessor* mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa umur sewa, berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa *lessor*.
 - 2) *Lessor* mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematis dan rasional. *Lessor* menerapkan pembayaran sewa terkait dengan periode tersebut untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima.
 - 3) *Lessor* menerapkan penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam PSAK 71. *Lessor* meninjau ulang secara reguler nilai residual takterjamin estimasian yang digunakan dalam menghitung investasi bruto sewa. Jika terdapat pengurangan nilai residual takterjamin estimasian, maka *lessor* merevisi alokasi penghasilan selama masa sewa dan segera mengakui setiap pengurangan jumlah yang terutang.
 - 4) *Lessor* yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual) dengan menerapkan PSAK 58.
- d. Modifikasi Sewa
- Pesewa mencatat modifikasi sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika:

- 1) modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- 2) imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa pembiayaan yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pesewa mencatat modifikasi tersebut sebagai:

- 1) jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi ketika modifikasi diberlakukan pada tanggal insepisi, maka pesewa:
 - a) mencatat modifikasi sewa sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi; dan
 - b) mengukur jumlah tercatat aset pendasar sebagai investasi neto sewa segera sebelum tanggal efektif modifikasi sewa.
- 2) jika tidak, maka pesewa menerapkan persyaratan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan*.

2. Sewa Operasi (*Operating Lease*)

Sewa dikatakan sebagai sewa operasi adalah ketika tidak ada pengalihan secara substansial seluruh manfaat dan risiko atas aset sewa.

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) *Lessor* mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematis lain. *Lessor* menerapkan dasar sistematis lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun.
- 2) *Lessor* mengakui biaya, termasuk depresiasi, yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban.
- 3) *Lessor* menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset pendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang sama dengan penghasilan sewa.
- 4) Kebijakan penyusutan atas aset pendasar yang dapat didepresiasi untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan depresiasi normal pesewa untuk aset serupa sesuai PSAK 16 dan PSAK 19: *Aset Takberwujud*.
- 5) *Lessor* menerapkan PSAK 48: *Penurunan Nilai Aset* untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami penurunan nilai.
- 6) *Lessor* produsen atau diler tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak ekuivalen dengan penjualan.

b. Modifikasi Sewa

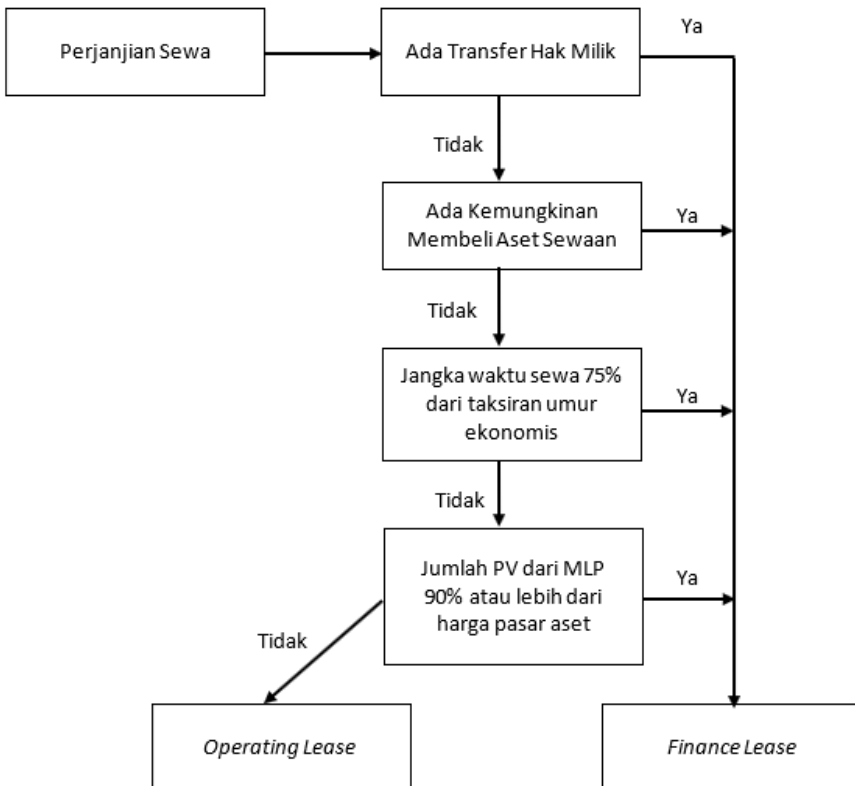
Lessor mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi, dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait

dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru.

c. Penyajian

Lessor menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut.

Untuk memahami antara kedua jenis klasifikasi sewa tersebut dapat dilihat pada bagan alir sebagai berikut:



Perlakuan Akuntansi

Atas disahkan PSAK 73 menyebabkan perubahan signifikan dalam pengklasifikasin transaksi sewa, khususnya dari sisi *lessee*. Adapun

sisi *lessor* tidak terdapat perubahan aturan pencatatan antara PSAK 30 dengan PSAK 73. Menurut PSAK 73, *lessee* akan mencatat transaksi sewa sebagai *finance lease* kecuali untuk hal-hal yang diatur lain. pengecualian dapat dilakukan untuk sewa yang berjangka pendek (kurang dari 12 bulan) dan bernilai rendah (praktik internasional adalah sebesar $< \$ 5.000$). Sebelum penerapan PSAK 73, *lessee* dapat menerapkan akuntansi sewa sebagai sewa operasi apabila kriteria yang diatur dalam PSAK terpenuhi, namun dengan disahkannya PSAK 73, *lessee* secara umum hanya dapat menerapkan akuntansi sewa sebagai *finance lease*. Berikut perbedaan pencatatan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 adalah sebagai berikut:

Akuntansi Sewa	PSAK 30 (Operating Lease)	PSAK 73 (Finance Lease)
Saat Menerima Aset Sewa		Aset Hak Guna (D)
		Liabilitas Sewa (K)
Saat Membayar Sewa	Beban Sewa (D)	Liabilitas Sewa (D)
	Kas (K)	Beban Bunga (D)
		Kas (K)
Depresiasi		Beban Depresiasi Aset (D)
		Akumulasi Depresiasi Aset (K)

Sementara pada sisi *lessor* tidak terdapat perubahan signifikan untuk pencatatan antara PSAK 30 dengan PSAK 73. Untuk perlakuan *lessor*, sewa tetap dapat diklasifikasikan sebagai *operating lease* maupun *finance lease*. Berikut perbedaan pencatatan antara *operating lease* dengan *finance lease* bagi *lessor*:

Akuntansi Sewa	PSAK 30 (Operating Lease)	PSAK 73 (Finance Lease)
Saat pengakuan awal sewa dan menerima pembayaran dari lessee di awal periode	Kas (D)	Piutang sewa pembiayaan (D)
	Pendapatan sewa di terima dimuka (K)	Kas (D)
		Aset (K)
Saat mengakui pendapatan di akhir periode	Pendapatan sewa di terima di muka (D)	Piutang sewa pembiayaan (D)
	Pendapatan sewa (K)	Pendapatan bunga (K)
Depresiasi di akhir periode	Beban depresiasi aset (D)	
	Akumulasi depresiasi aset (K)	
Saat menerima pembayaran dari lessee	Kas (D)	Kas (D)
	Pendapatan sewa di terima di muka (K)	Pendapatan sewa di terima di muka (K)

Ilustrasi Akuntansi Sewa Berdasarkan PSAK 73

Contoh 1 (Identifikasi Sewa)

Perusahaan kontraktor menyepakati kontrak dengan pemasok untuk penggunaan 1 eskavator selama 1 bulan untuk dan membuat *basement* gedung perkantoran. Pemasok tidak memiliki hak substitusi untuk eskavator tersebut. Kontrak menetapkan jumlah jam operasional per hari. Pelanggan tidak memiliki hak untuk melanjutkan penggunaan eskavator ini setelah waktu kontrak habis. Luas dan kedalaman tanah yang dikeruk sudah ditentukan dalam kontrak. Pelanggan bertanggung jawab atas pengoperasian eskavator tersebut.

Jawab:

- Kontrak mengandung sewa**
- Pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan eskavator selama durasi waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

Terdapat aset teridentifikasi. Eskavator secara eksplisit ditetapkan dalam kontrak, dan pemasok tidak memiliki hak untuk mensubstitusikan eskavator. Pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan penggunaan eskavator sepanjang periode penggunaan, karena:

- a. Pelanggan mendapatkan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan eskavator selama periode penggunaan. Pelanggan menggunakan eskavator secara eksklusif sepanjang periode penggunaan.
 - b. Pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan eskavator.
3. Karena durasi kontrak adalah 1 bulan, maka sewa ini memenuhi definisi sewa jangka pendek.

Contoh 2 (Identifikasi Sewa)

Pelanggan menyepakati kontrak selama 5 tahun dengan pemasok untuk penggunaan 10 mobil sedan sebagai mobil antar jemput direksi PT XYZ. Pemasok memiliki hak untuk menentukan mobil mana yang akan digunakan setiap harinya oleh supir perusahaan. Di dalam kontrak mencantumkan luasan wilayah dan jarak yang dapat ditempuh. Pelanggan menggunakan mobil tersebut namun dapat diubah oleh pemasok sewaktu-waktu dengan spesifikasi yang sama.

Jawab:

1. **Kontrak tidak mengandung sewa**
2. Meskipun luasan wilayah dan jarak yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan tercantum dalam kontrak, namun tidak terdapat aset

yang teridentifikasi. Pelanggan mengendalikan mobil tersebut namun sewaktu-waktu dapat ditukar oleh pemasok.

3. Pemasok memiliki kemampuan mengganti mobil tersebut sewaktu-waktu.

Contoh 3 (Sewa Bernilai Rendah)

1. Sewa real estate (gedung perkantoran, gudang dan lain-lain)
2. Sewa peralatan pabrik
3. Sewa ruangan untuk layanan pelanggan dan promosi
4. Sewa mobil perusahaan baik untuk pimpinan, manajer, direksi dengan berbagai kualitas, spesifikasi dan nilai
5. Sewa truk dan mobil van untuk tujuan pengiriman dengan berbagai ukuran dan nilai
6. Sewa peralatan IT yang digunakan oleh karyawan individu (laptop, komputer, PDA, printer, kamera, ponsel)
7. Sewa server, termasuk beberapa terminal dan peralatan yang terhubung dalam server tersebut. Terminal dan peralatan tambahan tersebut ditambahkan pada server tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan.
8. Sewa peralatan kantor seperti mebel kantor, dispenser, mesin *fotocopy* kapasitas rendah.

Contoh 4 (Komponen Non Sewa)

Perusahaan menyewa 3 lantai gedung perkantoran selama 10 tahun dengan opsi dapat diperpanjang kembali selama 10 tahun dan seterusnya. Untuk memastikan gedung aman dan terawat dengan baik, perusahaan melakukan kontrak pemeliharaan gedung selama masa sewa. Total sewa dan pemeliharaan per tahun sebesar Rp 200.000.000. Perusahaan memperoleh informasi bahwa gedung

serupa sewa per tahun sebesar Rp 200.000.000 dan pemeliharaan sebesar Rp 50.000.000. Perusahaan memilih memisahkan komponen non sewa dari sewa gedung tersebut.

Jawab:

1. Penyewa mengalokasikan komponen sewa dan non sewa berdasarkan harga sewa secara mandiri:

Gedung 2 lantai	Rp 200.000.000
Pemeliharaan	<u>Rp 50.000.000</u>
Total	Rp 250.000.000

Pengalokasian

Gedung 2 lantai	200 jt/250 jt x 200 jt	= Rp 160.000.000
Pemeliharaan	50 jt/250 jt x 200 jt	= <u>Rp 40.000.000</u>
Total		Rp 200.000.000

2. Alokasi sewa gedung 2 lantai Rp 160.000.000 dan komponen non sewa Rp 40.000.000

Contoh 5 (Ilustrasi Jurnal Penyewa)

Perusahaan menyewa mesin produksi selama 6 tahun dengan nilai sewa Rp 100.000.000 per tahun. Tingkat suku bunga inkremental untuk jangka waktu sewa adalah 7%. Pada saat awal sewa, perusahaan membayar Rp 100.000.000. Dengan menggunakan rumus DF PV maka di dapat rumus sebagai berikut:

$$DF\ PV = 1 + \left[\frac{\left(1 - \left(\frac{1}{(1+i)^{n-1}} \right) \right)}{i} \right]$$

Dengan menggunakan rumus tersebut didapatkan hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 9.1.
Amortisasi Aset Sewa

Thn	Saldo Awal	Pembayaran	Bunga	Amortisasi	Saldo Akhir
1	510.019.744	100.000.000		100.000.000	410.019.744
2	410.019.744	100.000.000	28.701.382,05	71.298.617,95	338.721.126
3	338.721.126	100.000.000	23.710.478,80	76.289.521,20	262.431.604
4	262.431.604	100.000.000	18.370.212,31	81.629.787,69	180.801.817
5	180.801.817	100.000.000	12.656.127,17	87.343.872,83	93.457.944
6	93.457.944	100.000.000	6.542.056,07	93.457.943,93	(0)
Total		600.000.000	89.980.256,41		

Thn	Saldo Awal	Dep	Saldo Akhir	waktu	PV
1	510.019.744	85.003.290,60	425.016.453,00		
2	425.016.453,00	85.003.290,60	340.013.162,40	1	93.457.943,93
3	340.013.162,40	85.003.290,60	255.009.871,80	2	87.343.872,83
4	255.009.871,80	85.003.290,60	170.006.581,20	3	81.629.787,69
5	170.006.581,20	85.003.290,60	85.003.290,60	4	7.628.9521,20
6	85.003.290,60	85.003.290,60	(0)	5	71.298.617,95
Total		510.019.743,59			410.019.743,59

Total Bunga dan Depresiasi = Rp 89.980.256,41 + Rp 510.019.743,59 =

Rp 600.000.000

Maka jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Saat pertama kali menyewa mesin dan melakukan pembayaran pertama

Aset (Mesin) – Hak Guna	Rp 510.019.744
Kas	Rp 100.000.000
Liabilitas sewa	Rp 410.019.744

2. Saat mencatat depresiasi aset

Beban depresiasi aset (mesin) – Hak Guna	Rp 85.003.290,60
Akumulasi depreasiasi aset (mesin) – Hak Guna	Rp 85.003.290,60

3. Saat pengakuan beban bunga (31 desember)
- | | |
|-----------------|------------------|
| Beban Bunga | Rp 28.701.382,05 |
| Liabilitas sewa | Rp 28.701.382,05 |
4. Saat pembayaran bunga
- | | |
|-----------------|----------------|
| Liabilitas sewa | Rp 100.000.000 |
| Kas | Rp 100.000.000 |

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
- Kieso, Donald E., Warfield, Terry D., Weigandt, Jerry J. (2018). *Intermediate accounting: ifrs edition 3rd ed.* (3rd). New Jersey: John Wiley & Sons.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 73 (PSAK 73)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

Biodata Penulis

Alfriadi Dwi Atmoko, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA



Lahir pada 26 Mei 1993. Memiliki Ketertarikan terhadap bidang ilmu akuntansi pada saat kuliah di semester 3. Penulis pernah menempuh pendidikan tinggi Strata 1 di program studi S1-Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta pada tahun 2011-2015, dan Strata 2 Magister Akuntansi di Pascasarjana

STIE YKPN Yogyakarta di tahun 2016-2017. Penulis juga telah menyelesaikan program profesi akuntan pada Program Pendidikan Profesi Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta pada tahun 2015-2016 dan telah menyelesaikan ujian *Chartered Accountant* yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2017

Penulis memiliki pengalaman di tahun 2015 menjadi seorang auditor internal, tahun 2015 juga menjadi konsultan keuangan di beberapa perusahaan serta menjadi instruktur pelatihan dalam bidang akuntansi dan keuangan di beberapa perusahaan. Tahun 2017 sampai dengan sekarang penulis mengabdikan sebagai dosen tetap di salah satu Universitas Swasta di Yogyakarta yaitu Universitas Amikom Yogyakarta di prodi S1-Akuntansi. Menjadi pendamping BUMDes di beberapa BUMDes yang ada di Yogyakarta sejak tahun 2019. Anggota aktif Ikatan Akuntan Indonesia. Penulis memiliki kepakaran di bidang keuangan, audit internal dan pajak.

Email Penulis: alfriadiatmoko@amikom.ac.id

BAB 10

AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN

Widiyanti Kurnianingsih, S.E., M.Akt., Ak., CA., CRA
Universitas Amikom Yogyakarta

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan cabang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan aspek perpajakan dalam kegiatan bisnis suatu entitas usaha. Tujuan akuntansi untuk perpajakan yaitu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif. Dalam praktiknya perusahaan merupakan wajib pajak badan yang harus menghitung penghasilan dengan dua cara yang berbeda. Akuntan perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sementara disisi lain akuntan juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah dalam hal ini ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan standar perpajakan.

Pajak penghasilan sebagai pajak yang melekat pada setiap wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan. Dalam ketentuan perpajakan setiap wajib pajak terikat pada hak dan kewajiban. Perpajakan di Indonesia menganut sistem *selfassessment* yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

Menurut PSAK 46, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas pajak penghasilan perusahaan. Pajak penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

Fungsi Akuntansi Perpajakan:

1. Pencatatan dan Pelaporan Pajak
2. Kepatuhan Pajak
3. Perencanaan Pajak
4. Audit dan Konsultasi Pajak
5. Analisis dan pengambilan Keputusan

Sedang Klasifikasi Akuntansi Perpajakan:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
4. Pajak Karyawan
5. Pajak Deviden
6. Pajak Lainnya

Penghasilan Sebagai Objek Pajak

Untuk memahami dasar-dasar Akuntansi Pajak Penghasilan, maka harus memahami istilah-istilah khusus sebagai berikut:

1. *Taxable Income* yaitu pendapatan yang menjadi dasar perhitungan penghasilan.

2. *Pretax Financial Income* yaitu catatan keuangan sebelum membayar pajak penghasilan.
3. *Deferred Tax Liability* yaitu akun yang mencatat jumlah yang harus dibayar di masa depan.
4. *Deffered Tax Asset* yaitu akun yang melacak jumlah yang dapat diperoleh Kembali di masa depan.

Merujuk dalam peraturan Undang Undang no 36 tahun 2018 dan dipertegas pada UU Cipta Kerja no 11 tahun 2020 dan UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang berasal dari wajib pajak baik pribadi atau badan usaha. Penghasilan yang dimaksud diperoleh di dalam negeri atau luar negeri.

PPh sendiri terbagi atas berbagai jenis pasal, mulai dari PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26, pasal 29, pasal 4 ayat 2, pasal 15, serta pasal 19. Dalam setiap pengenaan PPh tentunya ada ketentuan khusus yaitu subjek dan objek yang dikenakan, Dimana subjek pajak merupakan orang yang dipungut atau wajib pajak, dan objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis seperti gaji, imbalan, upah, dan sebagainya yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997 menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 46 (PSAK 46) yaitu mengenai akuntansi pajak penghasilan. PSAK 46 ini dikeluarkan untuk memenuhi tuntutan dalam memasuki era globalisasi agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang di Indonesia maupun luar negeri dapat sejalan dengan standar internasional. PSAK 46 ini sejalan

dengan SAFS 96 yang diterbitkan oleh FASB tahun 1987 dan SFAS 109 pada tahun 1992, mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Lalu bagaimana pengakuan pajak pada periode berjalan dan periode mendatang terhadap transaksi yang telah diakui dalam laporan keuangan dan surat pemberitahuan tahunan (SPT) serta kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan.

Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK 46

Peraturan perpajakan telah menggulirkan bahwa pembaharuan sistem perpajakan yang semula *official assessment* berubah menjadi *selfassessment*. Sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam mekanisme *selfassessment* Wajib Pajak memerlukan media untuk dapat menghitung jumlah pajak yang dibayarkan. Berdasarkan undang-undang, media tersebut dalam bentuk pembukuan.

Menurut UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 Tahun 2000 disebutkan bahwa:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No 46 menggunakan dasar akrual yang mengatur pajak penghasilan yang

kurang dibayar atau terhutang dan pajak yang lebih bayar dalam masa pajak dan mengakui liabilitas dan asset pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakui sebagai laba fiskal atau sebaliknya. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena faktor kepastian peraturan pajak dan digunakannya *selfassessment system* sebagai dasar pemungutan pajak.

Laporan keuangan perusahaan dihasilkan dan disiapkan perusahaan sebagai wajib pajak, sebagai pertanggungjawaban manajemen, sehingga mencerminkan aktivitas wajib pajak dalam satu tahun. Bentuk pertanggungjawaban kepada otorisasi pajak dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Pada umumnya Wajib Pajak menyajikan beban pajak penghasilan dalam laporan keuangan sesuai data pada SPT. Dengan PSAK No 46 inilah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan Pajak Penghasilan serta pengaruhnya, karena faktor beda tetap dan beda waktu akan mengakibatkan koreksi fiskal. Beberapa pengaruh tersebut seperti asset dan/atau liabilitas pajak tangguhan, perlakuan Pajak Penghasilan yang pemungutannya bersifat final dan pengaruh pajak atas sisa kerugian yang dikompensasikan.

Pembukuan fiskal dan akuntansi mempunyai kesamaan dan perbedaan diantaranya sebagai berikut:

1. **Perbedaan Waktu / Temporer**

Waluyo dalam bukunya Akuntansi Pajak, mengemukakan perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu asset atau liabilitas

dengan nilai tercatat pada asset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future deductible amount*) pada saat asset dipulihkan atau liabilitas dilunasi/dibayar. Hal ini berakibat adanya penundaan pengakuan.

Contoh:

Penyusutan asset tetap dengan masa/umur ekonomis 10 tahun, tetapi menurut perpajakan hanya terbatas 4 tahun karena masuk Kelompok 1, sehingga alokasi beban penyusutan dalam kurun waktu yang berbeda pula.

Yang dapat menimbulkan beda waktu adalah perbedaan metode pengakuan terhadap:

- a. Piutang Usaha
- b. Efek
- c. Persediaan
- d. Tagihan/utang dalam valuta asing
- e. Harta berujud dan tidak berujud
- f. Penyertaan saham
- g. Biaya pendirian dan perluasan usaha
- h. Biaya sebelum produksi komersial
- i. Biaya dibayar dimuka jangka Panjang
- j. Selisih kurs
- k. Pencadangan kewajiban bersyarat/cadangan lain
- l. Pengakuan penghasilan & biaya atas proyek jangka Panjang
- m. Hak penambangan dan Hak Pengusaha Hutan

2. Perbedaan Tetap / Permanen

Perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang bersifat permanen.

Suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).

Contoh:

Pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito memang secara akuntansi komersial akan masuk sebagai penghasilan, tetapi aturan perpajakan tidak masuk dalam penghasilan kena pajak diterapkan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh karena pengenaan pajak atas bunga deposito bersifat final. Demikian halnya dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Yang termasuk beda tetap/permanen:

- a. Pemberian kenikmatan atau natura
- b. Biaya jamuan tamu
- c. Sumbangan
- d. Rugi penarikan harta tetap dari pemakaian
- e. PPh pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pemberi hasil
- f. Hibah dan warisan
- g. Bunga dan dividen

Untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi dilakukan koreksi fiskal, baik positif atau negatif. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi akan digunakan sebagai dasar

perhitungan Pajak Penghasilan yang terhutang menurut ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Secara garis besar proses rekonsiliasi ini dapat digambarkan sebagai berikut (*image credit: Dwi martini – Universitas Indonesia*):

Gambar 10.1.
Proses rekonsiliasi



Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan terdiri atas beban pajak kini (dalam tahun berjalan) dan beban pajak tangguhan. Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode (Amanda dan Febrianti, 2015:77). Dimana beban pajak kini hasil dari pengkalkulasian atas penghasilan kena pajak hasil dari koreksi fiskal yang dikalikan dengan tarif pajak. Dalam penelitian Setia, dkk (2020:160), Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang tarif pajak. Penghasilan kena pajak

atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan akuntansi.

Beban Pajak Tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dari fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam prinsip dan asumsi akuntansi dibanding yang diperbolehkan menurut peraturan pajak (Wijaya, dkk, 2017:38). Beban Pajak tangguhan dapat menimbulkan liabilitas pajak tangguhan, yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut Undang-undang Pajak.

1. Perubahan Tarif Pajak

Perubahan tarif pajak dilakukan oleh pemerintah karena pajak merupakan salah satu sumber penghasilan bagi penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak pada objek pajak yang menjadi tanggungan dari wajib pajak yang biasanya berupa prosentase (%). Tarif PPh Badan No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1b “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% berlakuk pada tahun 2009”. Namun berdasarkan pasal 2 ayat 2a “tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) untuk penghasilan diatas Rp 250.000.000 sd Rp 500.000.000, yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010’. Ketentuan tarif pajak badan kembali direvisi melalui Undang-undang No 1 Tahun 2020 berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan

menjadi sebesar 22 % (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

Dasar hukum dari ketentuan wajib pajak badan ini telah diatur kembali dalam Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan peraturan terbaru dan telah berlaku sejak 1 Januari 2022 lalu.

Perubahan Aturan PPH Berdasarkan UU HPP diantaranya:

- a. **Pajak atas Natura:** Pembahasan PPh atas natura atau fasilitas dari pemberi kerja, meliputi makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan (seragam, alat keselamatan kerja, dan lainnya), natura yang bersumber dari APN/APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.
- b. **PPh Pengusaha Perorangan (UMKM):** Perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp 500.000.000.
- c. **PPh Badan:** Perubahan tarif tahun 2022 dari 20 % kembali menjadi 22 %.
- d. **PPh Orang Pribadi:** Perubahan lapisan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

2. Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan setiap penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Yang dimaksud dengan subjek pajak adalah seseorang yang sudah memperoleh penghasilan. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 penghasilan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri orang pribadi.

Cara menghitung PPh pasal 21 sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) serta dasar tarif Penghasilan Tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku. Cara dalam menghitung PPh pasal 21 yang paling umum ada 3 cara yaitu:

- a. **Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode Gaji Bersih dengan pajak Ditanggung Perusahaan (Net)**, metode cara ini menghitung PPh pasal 21 dengan diterapkan untuk karyawan atau penerima penghasilan yang mendapat gaji bersih atau penghasilan bersih yang ditanggung perusahaan.
- b. **Metode 2 yaitu Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak (Gross-Up)**, cara menghitung PPh pasal 21 dengan metode ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang memperoleh tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu dengan menambahkan nilai pajak yaitu sebesar pajak yang dipotong.
- c. **Dan Metode yang ke tiga adalah Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak (Gross)**, cara menghitung PPh pasal 21 dengan diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh pasal 21 terutangnya sendiri. Maka untuk metode ini berarti gaji pegawai belum dipotong PPh pasal 21.

Perubahan Regulasi PPh pasal 21 terbaru

Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan WP Orang Priadi. Tarif pemotongan penghasilan pasal 21 ada dua yaitu:

- a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
Skema tarif progresif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh ini untuk menghitung PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir.
- b. Tarif Efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh pasal 21.
Skema tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung penghasilan pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan dan harian.

Dengan adanya skema tarif efektif PPh 21 TER ini, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 jadi lebih simple. Skema TER juga tidak mengubah perhitungan PPh pasal 21 dalam setahun karena masih berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh. Skema perhitungan PPh 21 TER sesuai PP 58/2023 terdiri dari dua kategori tarif efektif yaitu: A. Tarif efektif bulanan (sesuai PTKP).

- c. Tarif efektif harian.

3. Pajak penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah sebuah jenis pajak yang dipungut dari penghasilan seseorang dengan berdasarkan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, bonus dan penghargaan tertentu. Pajak ini yang memotong penghasilan adalah pihak yang

memberi penghasilan dan wajib melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pelayanan pajak setempat, selaku kewajiban dari pihak pemberi penghasilan.

Tarif Pajak Penghasilan pasal 23 akan ditentukan berdasarkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), atau bisa juga ditentukan dari jumlah bruto suatu penghasilan, Ada 2 jenis tarif yang akan dipungut dari suatu transaksi penghasilan, yaitu tarif 15% dan tarif 2 %. Besaran dari tarif tersebut akan bergantung pada objek PPh pasal 23.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut antara lain:

- a. Tarif 15 % dari Nominal Penghasilan Bruto:
 - 1) Dividen, kecuali bila penghasilan dividen tersebut merupakan pembagian kepada orang pribadi secara final, pembagian bunga dan royalti.
 - 2) Hadiah dan penghargaan selain yang sudah terpotong oleh PPh pasal 21
- b. Tarif 2 % dari Nominal Penghasilan Bruto:
 - 1) Penghasilan dari sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan penggunaan harta.
 - 2) Imbalan jasa, seperti jasa Teknik, manajemen, konstruksi.
 - 3) Jasa lain yang ada pada PMK No 141/PMK.03/2015.
- c. Wajib Pajak tanpa NPWP dengan tarif lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23.

4. PPh Pasal 4 ayat 2 Sewa dan lainnya

Kewajiban pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 sewa bangunan atau lainnya cukup kompleks. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah

pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya. PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

Tarif Pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada WP badan dan WP OP telah diatur pemerintah yaitu:

- a. Bunga deposito / Tabungan, diskonto SBI dan jasa giro sebesar 20 %. Termaktub dalam pasal 4 (2) a UU PPh jo PP 131 Tahun 2000 jo KMK 51/2001.
- b. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dan kepada anggota koperasi orang pribadi (kecuali bunga dibawah Rp 240.000 tidak dikenakan pajak), Pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 %.
- c. Bunga obligasi (surat utang negara) dan SUN leih dari 12 bulan. Ketentuan tarif ini sesuai pasal 4 (2) UU PPh jo PP No 16 tahun 2009.
- d. Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebesar 10 %.
- e. Hadiah undian, tarif pajak sebesar 25 %, seperti diatur dalam PP No 132 Tahun 2000.

5. PPh Pasal 22

PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap

menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut.

Pemungut PPh pasal 22 bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang.
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2018). Akuntansi Perpajakan Edisi 3 (E. S. Suharsi (ed.)). Salemba Empat.
- Amanda, F., & Febrianti, M. (2015). Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, Dan Basis Akrual Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 7(1), 70–86. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v7i1.83>
- Asmedi, S., & Wulandari, R. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Beban Pajak Tangguhan Dan Tax Planning Terhadap Manajemen Laba. *Perwira Journal of Economics & Business*, 1(2), 8–17. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v1i2.32>
- Denismawati Halawa, (2023). Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan Dan Perubahan tarif Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2021. *Jurnal Akuntansi, BBisnis dan Ekonomi Indonesia* Vol. 2 No 1, 2023 hal. 81-90. <https://unpam.ac.id/jabel> Jurusan Akuntansi Universitas Pamulang. ISSN 2829-9043 (media online).
- Gunadi, Akuntansi Pajak, Grasindo, 2009, ISBN: 9790255683, 9789790255685.
- Paraturan Menti Keuangan RI No. 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajibb Pajak Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pemberi atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.*
- Ramandhanty, R., Prasetyo, B. H., & Budianti, W. (2021). Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, Dan Akrual Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(2), 215–224.
- Waluyo, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, 2014, ISBN: 9789790615144.

Biodata Penulis

Widiyanti Kurnianingsih, S.E., M.Akt., Ak., CA., CRA



Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan juga termasuk ilmu Manajemen dan Akuntansi dimulai pada tahun 2020. Pengalaman praktisi, penulis bekerja $\pm$ 28 tahun di Universitas Amikom Yogyakarta sampai sekarang dengan jabatan terakhir sebagai

Direktur Perencanaan Keuangan. Penulis memiliki kepakaran dibidang Manajemen (Manajemen Keuangan, Akutansi Keuangan, dan Akuntansi Bisnis). Penulis mencoba menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: yantibau@amikom.ac.id

BAB 11

AKUNTANSI UNTUK INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

Yopie Chandra, S.E., M.Akt.
Universitas Buddhi Dharma

Definisi Instrumen Derivatif

Menurut (Kolb 2003), **Derivatif** merupakan suatu kontrak yang sebagian besar nilainya berasal dari aset, kurs acuan, atau indeks sebagai acuan awal (*underlying*). Subyek sebagai induk acuan atau pokok yang mendasari (*underlying*) adalah aset, kurs referensi, atau sebagai dasar penetapan nilai utamanya, termasuk derivatif komoditas dan derivatif keuangan.

(Kieso 2011) mendefinisikan **Derivatif** adalah instrumen keuangan yang nilainya tergantung atau berasal dari nilai-nilai variabel dari kontrak lain, atau lebih tepatnya dari mana kontrak derivatif itu berasal (*underlying*). Dikemukakan bahwa variabel yang sering menjadi subjek yang mendasari derivatif adalah harga set yang diperdagangkan. Derivatif dapat bergantung pada hampir semua jenis variabel. (Hull 2008b)

Karakteristik Instrumen Keuangan Derivatif

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia 2009) mendefinisikan derivatif adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Nilainya berubah akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (*underlying*), antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau variabel lainnya. Untuk variabel non keuangan variabelnya tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak.

Misalnya, nilai opsi panggilan meningkat saat nilai saham suatu perusahaan meningkat, Dalam hal ini, yang mendasarinya adalah harga saham. Untuk sampai pada ketentuan pembayaran, gandakan perubahan harga saham dengan jumlah saham (jumlah nasional).

2. Tidak memerlukan investasi awal neto, atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar.

Misalnya perusahaan membayar premi kecil untuk membeli opsi panggilan yang mana jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari pada jika membeli saham sebagai investasi langsung.

3. Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan, instrumen ini menyaratkan atau mengizinkan penyelesaian neto.

Misalnya perusahaan dapat meraup untung dari opsi beli tanpa mengambil kepemilikan saham. Fitur penyelesaian bersih ini mengurangi transaksi biaya yang terkait dengan derivatif.

Kontrak derivatif membantu memperlancar fluktuasi yang disebabkan oleh berbagai jenis risiko. Perusahaan yang ingin

memastikan terhadap jenis risiko bisnis tertentu sering menggunakan derivatif kontrak untuk mencapai tujuan ini.

Fungsi Instrumen Derivatif

1. Sebagai model investasi umumnya adalah investasi jangka pendek
2. Sebagai cara lindung nilai dalam menghilangkan risiko.
3. Sebagai informasi harga yaitu mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu di kemudian hari.

Fungsi spekulatif

1. Membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yaitu produsen akan mendapat gambaran permintaan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang terhadap produk yang dihasilkan.
2. Untuk mencegah gejolak harga pasar yang ekstrim terhadap underlying asset, yaitu dengan perdagangan berjangka, maka pasar akan bereaksi yang positif terhadap permintaan dan penawaran.

Manfaat Derivatif

1. Untuk Meminimalisir tingkat risiko keuangan dan untuk melindungi nilai komoditas.
2. Sebagai instrumen investasi berbentuk kontrak perdagangan, sehingga risiko yang terkandung didalamnya pasti tinggi. Namun, dengan instrumen ini, risiko kerugian akan diiringi dengan keuntungan yang juga besar.
3. Membantu mengurangi biaya transaksi pasar.

Tipe trader Derivatif Market

1. **Hedger** adalah trader yang melakukan kontrak derivatif untuk kepentingan manajemen risiko dengan tujuan lindung nilai.
2. **Speculator** adalah trader yang melakukan kontrak derivatif untuk kepentingan mencari profit. Trader di pasar modal didominasi oleh trader tipe ini.
3. **Arbitrageur** merupakan trader yang secara terus-menerus melakukan transaksi di dua pasar derivative atau lebih demi mendapatkan keuntungan dari selisih antara nilai derivatif dan nilai pasar masing-masing.

Tabel 11.1

Perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dengan derivatif.

Karakteristik	Instrumen keuangan Tradisional (Sekuritas Perdagangan)	Instrumen Keuangan Derivatif (Opsi Beli)
Provisi Pembayaran	Harga saham dikalikan jumlah saham	Perubahan harga saham (yang menjadi dasar) dikalikan jumlah saham (jumlah nasional)
Investasi awal	Investor membayar biaya penuh	Investor awal jauh lebih kecil dari biaya penuh
Penyelesaian	Menyerahkan saham untuk menerima uang kas	Menerima ekuivalen kas berdasarkan perubahan harga saham dikalikan jumlah saham

Prinsip Dasar dalam Akuntansi Derivatif

IASB telah mengatur pedoman akuntansi untuk instrumen derivatif, yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aktiva dan juga kewajiban.

2. Derivatif harus dilaporkan pada nilai wajar.
3. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dalam derivatif harus segera diakui dalam laba.
4. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi *hedging* dilaporkan dengan cara yang berbeda tergantung pada jenis *hedging*.

Pengakuan dan Pengukuran Instrument Derivatif

Seluruh derivatif, tidak tergantung pada nature atau kegunaannya, dicatat pada fair value pada neraca.

Akuntansi dari derivatif dilakukan pada kedua transaksi (bila sesuai) dengan *marking-to market*.

Ini berarti jika derivatif adalah hedge yang efektif, pengaruh dari perubahan fair value akan saling meniadakan.

1. Sebuah derivatif adalah instrumen finansial yang (1) perlu sedikit atau tanpa *initial investment*, (2) berubah dalam nilai sesuai dengan nilai instrumen indeks lain (yang disebut *underlying*) dan (3) diselesaikan dimasa mendatang.
 - a. Contoh derivatif adalah *option, futures, forward contract* dan *swap*. Derivatif diakui di laporan keuangan pada *fair value through profit and loss method* (FVTPL)
 - b. Derivatif diukur langsung menurut *fair valuenya* dengan *gain* dan *loss* dicatat di laba rugi periode tersebut.
2. Sebuah instrumen *hedging* adalah jenis derivatif yang dikelompokkan menjadi *fair value hedge, cash flow hedge* atau *hedge* atas *net investment* untuk operasi di luar negeri.

- a. Hedge accounting membolehkan memilih perlakuan untuk meng-*offset profit* dan *loss* atas item-item yang di-*hedge*.
- b. Jika perusahaan memilih menggunakan *hedge accounting*, perlakuan akuntansi akan berbeda untuk tiap jenis *hedge*:
- c. *Fair value hedge* dicatat dengan mengakui *gain* dan *loss* di laba rugi periode yang bersangkutan.
- d. *Cash flow hedge* dan *hedge* atas *net investment* dicatat dengan melaporkan *gain* dan *loss* di *other comprehensive income* (OCI) untuk periode yang bersangkutan.

Jenis-jenis Sekuritas Derivatif

Kontrak *Forward*

Menurut (Brigham dan Houston 2012) *forward contract* adalah perjanjian dimana salah satu pihak setuju untuk membeli sebuah komoditas pada suatu harga tertentu dimasa depan dan pihak lain setuju untuk melakukan penjualan tersebut. Menurut (Siahaan 2008) mendefinisikan *forward contract* adalah perjanjian antara dua pihak, dimana satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah asset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas asset pada tanggal penyerahan.

Kontrak *forward* memiliki beberapa kelemahan yang disebabkan karena kontrak *forward* merupakan hasil negosiasi langsung antara pihak pembeli dengan penjual *forward*. Negosiasi tersebut mengakibatkan variasi yang cukup tinggi yang selanjutnya membuat kontrak *forward* tidak terstandarisasi. Produk yang tidak terstandarisasi cenderung lebih sulit diperdagangkan. Karena

kurang likuid, maka produk tersebut cenderung mempunyai biaya transaksi yang tinggi.

Nilai wajar kontrak *forword* diestimasi dengan Rumus berikut ini:

$$\text{Jumlah nominal} \times \frac{(\text{kurs } forword \text{ saat ini} - \text{Kurs } forword \text{ menurut kontrak})}{(1 + r)^t}$$

Keterangan:

1. Kurs *forword* saat ini; Kurs *forword* pada tanggal pengukuran nilai wajar untuk periode *forword* dari tanggal pengukuran sampai dengan tanggal serah terima.
2. Kurs *forword* menurut kontrak: Kurs *forword* yang ditetapkan pada saat kontrak dimulai.
3. r: Tarif atau suku bunga diskonto
4. t: Periode hingga kontrak berakhir

Pada tanggal 1 Agustus 2019, PT Kanto Susanto mengikat kontrak serah dengan PT Megah Jaya (perusahaan pialang valuta asing) untuk pembelian USD 1,000,000 yang akan diserahterimakan pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan tarif suku bunga diskonto sebesar 5%.

Tabel adalah nilai kurs untuk masing-masing periode:

Tabel 11.2. Nilai Kurs

Periode	Kurs IDR/USD di pasar spot	Kurs IDR/USD untuk penyerahan 31 Oktober 2019
1 Agustus 2019	13,035	13,200
31 Agustus 2019	13,090	13,310
30 September 2019	13,200	13,255
31 Oktober 2019	13,365	13,365

Nilai wajar kontrak *forword* pada tanggal 1 Agustus 2019

$$\text{Nilai wajar} = \text{USD } 1,000,000 \times \frac{(\text{Rp.13,200} - \text{Rp.13,200})}{(1 + \frac{5\%}{12})^3} = 0$$

Karena nilai wajar yang diperoleh adalah Rp.0 maka tidak ada ayat jurnal yang diperlukan.

Nilai wajar kontrak *forward* pada tanggal 31 Agustus 2019

$$\text{Nilai wajar} = \text{USD } 1,000,000 \times \frac{(\text{Rp.13,200} - \text{Rp.13,200})}{\left(1 + \frac{5\%}{12}\right)^2} = \text{Rp.109,089,031}$$

Maka PT Wahid Husen mencatat nilai wajar kontrak ***forward*** sebagai berikut:

31 Agustus 2019	Kontrak Forward	109,089,031	
	Keuntungan (Kerugian tidak terealisasi)		109,089,031
31 Agustus 2019	Kontrak Forward	109,089,031	
	Keuntungan (Kerugian tidak terealisasi)		109,089,031



Pada saat melanjutkan ke periode selanjutnya, dilakukan jurnal penutup untuk akun keuntungan (kerugian) tidak terealisasi pada

Dengan ayat jurnal penutup di atas, neraca saldo setelah penutupan akan mencakup jumlah debit aset keuangan kontrak *Forward* sebesar Rp. 109,089,031 dan akun keuntungan (kerugian) tidak terealisasi akan bersaldo nol.

Nilai wajar kontrak *forward* pada tanggal 30 September 2019

$$\text{Nilai wajar} = \text{USD } 1,000,000 \times \frac{(\text{Rp.13,200} - \text{Rp.13,200})}{\left(1 + \frac{5\%}{12}\right)^1} = \text{Rp.54,771,784}$$

Keuntungan yang timbul pada 30 September 2019 adalah Rp.54,771,784 sedangkan keuntungan yang telah diakui pada periode sebelumnya adalah Rp.109,089,031. Maka PT Wahid Husen harus mengdebit akun keuntungan (kerugian) tidak terealisasi sebesar Rp.109,089,031 – Rp.54,771,784 = Rp.54,317,247, Selain itu, dengan adanya jurnal diatas. Kontrak *Forward* dalam neraca sebesar Rp. 54,771,784.



30 September 2019	Keuntungan (Kerugian) tidak terealisasi	54,317,247	
	Kontrak <i>forward</i>		54,317,247
30 September 2019	Ikhisar Laba Rugi	54,317,247	
	Keuntungan (Kerugian) tidak terealisasi		54,317,247



Pada saat melanjutkan ke periode selanjutnya dilakukan jurnal penutup untuk akun keuntungan (kerugian) tidak terealisasi pada ikhtisar laba rugi.

Nilai wajar kontrak forward pada tanggal 31 Oktober 2019

$$\text{Nilai wajar} = \text{USD } 1,000,000 \times \frac{(\text{Rp.13,200} - \text{Rp.13,200})}{\left(1 + \frac{5\%}{12}\right)^{10}} = \text{Rp.165,000,000}$$

Maka PT Wahid Husen mencatat nilai wajar kontrak *forward* sebagai berikut:

Keuntungan yang timbul pada 31 Oktober 2019 adalah Rp.165,000,000 sedangkan keuntungan yang telah diakui selama periode sebelumnya adalah Rp.54,771,784. Maka PT Wahid Husen harus mengakui Keuntungan sebesar Rp.165,000,000 – Rp.54,771,784 = Rp.110,228,216. Selain itu, dengan adanya jurnal di atas. Kontrak *Forward* dalam neraca sebesar Rp.165,000,000.

31 Oktober 2019	Kontrak Forward	110,228,216	
	Keuntungan (Kerugian) tidak terealisasi		110,228,216

Jurnal saat serah terima kontrak *forward* adalah:

31 Oktober 2019	Kas	165,000,000	
	Kontrak <i>Forward</i>		165,000,000

Jurnal penutup pada periode Oktober 2019 adalah:

31 Oktober 2019	Keuntungan (Kerugian) tidak terealisasi	110,228,216	
	Ikhtisar Laba Rugi		110,228,216

Kontrak *Future*

Menurut (Hull 2008:1) kontrak *Future* adalah suatu perjanjian atau kesepakatan untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga tertentu atau pada waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan definisi (Eiteman 2010). Kontrak *Future* merupakan salah satu alternatif kontrak *forward* dan memerlukan penyerahan mata uang asing dalam jumlah standar di masa depan pada waktu, tempat, dan harga yang telah ditentukan.

Tabel 11.3.
Perbandingan Kontrak *Future* dan Kontrak *Forward*

<i>Forward</i>	<i>Futures</i>
Kontrak privat antara dua pihak	Diperdagangkan dilantai bursa
Tidak terstandardisasi	Terstandardisasi
a. Biasanya menggunakan satu hari penyerahan yang spesifik	a. <i>Range of delivery dates</i>
b. Penyesuaian (<i>settlement</i>) pada akhir kontrak	b. Penyesuaian secara harian (<i>daily settlement</i>)
c. <i>Delivery</i> atau <i>final cash settlement</i>	c. Kontrak biasanya ditutup sebelum jatuh tempo
d. <i>Credit risk</i>	d. Tidak ada <i>credit risk</i>

Sumber: Hull (2008:39)

Seorang investor membeli 1 kontrak *future* euro pada pagi hari dengan harga 200 yen/euro. Besar kontrak adalah 1.000 euro dan jatuh tempo kontrak tersebut adalah 2 hari mendatang. Kurs atau harga *future* yen/euro untuk 2 hari ke depan adalah sebagai berikut:

Hari ke-	Kurs <i>future</i>
0 (penutupan)	(¥250)/€
1	(¥160)/€
2	(¥100)/€

Hari ke	Kurs Future (yen/euro)	Hasil Perhitungan	Saldo (yen)
awal	200	Deposit awal	100,000
0 akhir	250	$(250 - 200) \times \text{€ } 1,000 = \text{¥ } 50$	150,000
1	160	$(160 - 250) \times \text{€ } 1,000 = (\text{¥ } 90)$	60,000
		Deposit disebabkan margin call $= \text{¥ } 100,000 - \text{¥ } 60,000 = \text{¥ } 40,000$	100,000
2	100	$(100 - 160) \times \text{€ } 1,000 = (\text{¥ } 60,000)$ Kontrak ditutup investor menyerahkan $100 \times \text{€ } 1,000 = \text{¥ } 100,000$ Dan menerima € 1,000 Total Kerugian (Keuntungan) $= \text{¥ } 50,000 + (\text{¥ } 90,000) + (\text{¥ } 60,000) = (\text{¥ } 100,000)$	40,000

Misal deposit adalah 100,000 yen, saldo minimal adalah 100,000 yen (besarnya deposit dan saldo minimal ditentukan oleh bursa). Deposit diberikan pada waktu investor membeli kontrak

Margin call adalah kondisi dimana saldo minimal dari kontrak tidak terpenuhi, sehingga investor akan dipanggil oleh bursa dan diharuskan menutupi kekurangannya tersebut.

Kontrak *future* aluminium memberi Allied Can Co. hak dan kewajiban untuk membeli 1,000 metrik ton aluminium seharga \$1,550 per ton. Harga kontrak ini berlaku sampai kontrak tersebut berakhir pada bulan Januari 2019. Yang menjadi *underlying* derivatif adalah harga aluminium. Jika harga aluminium naik di atas \$1,550, maka nilai kontrak *future* untuk Allied akan naik karena Allied dapat membeli aluminium pada harga yang lebih rendah yaitu sebesar \$1,550 per ton.

Dengan mengasumsikan bahwa *future* kontrak dilakukan pada tanggal 1 September 2018 dan harga yang harus dibayar saat ini untuk persediaan yang akan diserahkan pada bulan Januari (yaitu harga *spot*) adalah sama dengan harga kontrak, maka kontrak *future* tersebut tidak mempunyai nilai. Karena itu, tidak ada ayat jurnal yang diperlukan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, harga untuk penyerahan aluminium pada bulan Januari telah meningkat menjadi \$1,575 per metrik ton. Allied akan membuat ayat jurnal berikut guna mencatat kenaikan nilai kontrak *future* tersebut:

31 Desember 2018	Kontrak <i>Future</i>	25,000	
	Keuntungan (Kerugian) tidak terealisasi (\$1,575-\$1,550)x 1,000 ton		25,000

Pada bulan Januari 2019, Allied membeli 1,000 metrik ton aluminium seharga \$1,575 dan membuat ayat berikut:

31 Januari 2019	Persediaan Aluminium	1,575,000	
	Kas \$1,575 x 1,000 ton		1,575,000

Pada saat yang sama, Allied melakukan penyelesaian akhir atas kontrak *future* dan membuat ayat jurnal berikut:

31 Januari 2019	Kas	25,000	
	Kontrak <i>future</i> (\$1,575 x 1,000 ton) (\$1,550 x 1,000 ton)		25,000

Melalui penggunaan derivatif kontrak *future*, Allied akan mampu membuat biaya persediaanya menjadi tetap. Penyelesaian kontrak *future* senilai \$25,000 akan mengoffset, jumlah yang dibayarkan untuk membeli persediaan pada harga pasar yang berlaku sebesar \$1,575,000, sehingga arus kas keluar bersih adalah \$1,550 per metrik ton, sebagaimana yang diinginkan.

Kontrak Opsi

Kontrak Opsi adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pemiliknya, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga tertentu selama periode waktu tertentu (A. Ross, Stephen 2016:363). Ada dua macam dalam kontrak opsi yaitu opsi *call* yang memberikan hak kepada pembelinya untuk membeli aset dengan harga tetap selama periode waktu tertentu dan opsi jual (*put option*) yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual aset tersebut dengan harga tebus yang sifatnya tetap (A. Ross, Stephen 2016:378). Premi opsi merupakan harga yang diminta pihak penerbit opsi kepada investor. Premi opsi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Premi Opsi = Nilai Instrinsik + Nilai Waktu

Keterangan:

1. Nilai instrinsik: Selisih antara harga pasar dengan harga eksekusi pada tanggal tertentu.
2. Nilai Waktu: Selisih antara premium dengan nilai instrinsik. Semakin dekat opsi ke tanggal penyelesaiannya, nilai waktu juga umumnya semakin kecil.

Pada tanggal 5 Juli 2019 PT Jonathan membeli kontrak opsi jual saham biasa PT Eliza dari PT Petra Securities (perusahaan pialang saham). Kontrak opsi tersebut memberikan hak kepada PT Jonathan (investor)

untuk menjual 2,000 saham biasa PT Eliza kepada PT Petra Securities (penerbit opsi) dengan harga Rp.70,000 per saham sampai dengan tanggal 31 Januari 2020. Sebaliknya PT Petro Securities berkewajiban membeli saham PT Eliza dengan jumlah dan harga tersebut ketika PT Jonathan mengeksekusi opsi jual saham yang dipegangnya.

Harga saham biasa PT Eliza mendasari kontrak opsi jual antara PT Jonathan dengan PT Petra Securites. Jika PT Jonathan selaku investor bermaksud untuk berspekulasi (bertaruh) dengan kontrak opsi jual itu, harga saham biasa PT Eliza menjadi objek taruhan. Jika di bursa efek harga pasar saham biasa PY Eliza turun (lebih rendah dari Rp.70,000), maka PT Jonathan kan membeli 2,000 lembar dari bursa efek dan menjualnya kembali kepada PT Petra Securities dengan harga Rp.70,000.

Oleh karena itulah, untuk terlibat dalam kontrak opsi jual itu PT Jonathan mengeluarkan kas Rp.2,400,000, jumlah yang dibayarkan tersebut disebut premi opsi. Pencatatan untuk transaksi tersebut adalah:

05 Juli 2019	Opsi Jual Saham	2,400,000	
	Kas		2,400.000

Dengan terlibat dalam opsi jual saham, PT Jonathan sebenarnya berharap harga pasar saham PT Eliza akan turun. Jika pada tanggal eksekusi opsi harga saham PT Eliza turun, misalnya menjadi Rp. 50,000 per saham, PT Jonathan akan mengeksekusi opsi jual saham yang dimilikinya, dengan cara membeli 2,000 saham PT Eliza dengan harga Rp. 50,000 per saham dari bursa efek dan menjualnya kembali kepada PT Petra Securities dengan harga Rp.70,000 per saham.

Harga pasar saham PT Eliza dan nilai waktu opsi jual saham yang dipegang PT Jonathan pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2019, dan 31 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Harga Pasar per Saham PT Eliza (Rp.)	Nilai Waktu Opsi Jual (Rp)
30 September 2019	77,000	1,250,000
31 Desember 2019	75,000	500,000
31 Januari 2020	78,000	

Nilai instrinsik opsi jual saham pada tanggal 30 September 2019

Pada tanggal 30 September 2019, harga pasar PT Eliza adalah Rp.77,000 lebih tinggi dari pada harga eksekusi yaitu Rp 70,000 per saham.

Bagi pemegangnya, opsi jual merupakan hak dan bukan kewajiban untuk menjual saham dengan harga yang ditetapkan menurut kontrak. Jika harga jual menurut opsi lebih rendah, pemegangnya tidak akan mengeksekusi opsi, sehingga nilai instrinsik tidak mungkin negatif.

Pemegang opsi hanya kerugian yang diakibatkan oleh penurunan nilai waktu yaitu $\text{Rp.1,250,000} - \text{Rp.2,400,000} = (\text{Rp.1,150,000})$. PT Jonathan melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

30 September 2019	Keuntungan (Kerugian) tidak terealisasi	1,150,000	
	Opsi Jual		1,150,000

Nilai instrinsik opsi jual saham pada tanggal 31 Desember 2019

Harga pasar PT Eliza pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp.75,000 per saham, masih lebih tinggi daripada harga eksekusi opsi

jual saham yaitu Rp.70,000, sehingga nilai instrinsik opsi jual saham juga masih nol.

Nilai waktu turun sebesar Rp.750,000, dari semula Rp.1,250,000 menjadi Rp.500,000. PT Jonathan mencatat jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Keuntungan(Kerugian) tidak terealisasi	750,000	
	Opsi Jual		750,000

Nilai instrinsik opsi jual saham pada tanggal 31 Januari 2020

Pada tanggal 31 Januari 2020, kontrak opsi jual saham itu berakhir tanpa eksekusi (hangus), karena pada tanggal tersebut harga pasar saham yang mendasarinya (Rp.78,000) lebih tinggi daripada harga eksekusi. Pada tanggal tersebut, nilai waktu opsi jual saham adalah nol. PT Jonathan mencatat jurnal tersebut sebagai berikut:

Tanggal	Keuntungan(Kerugian) tidak terealisasi	500,000	
	Opsi jual		500,000

Ketika jurnal itu dibukukan aset Opsi jual bersaldo nol (Rp.2,400,000 – Rp.1,150,000 – Rp750,000 – Rp.500,000). Dan secara keseluruhan, kontrak opsi tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT Jonathan sebesar Ro.2,400,000 yaitu sebesar premium saham yang dibayarkan pada saat mengikat kontrak.

Kontrak Swap

Swap adalah transaksi diantara dua pihak dimana pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua, dan pihak kedua berjanji untuk melakukan pembayaran simultan kepada pihak pertama.

Menurut (Mudrajad 2001) kontrak *swap* dibuat untuk melindungi diri dari risiko perubahan tingkat bunga. *Swap* memberikan kepastian tentang tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh pihak-pihak yang telah membuat kesepakatan. (Bodie, Zvi., Alex Kane 2009) mendefinisikan kontrak *swap* yang menghendaki pertukaran serangkaian arus kas, dapat dipandang sebagai portofolio dari kontrak-kontrak *forward*.

Jenis *Swap* yang paling umum adalah *Swap* suku bunga dimana satu pihak melakukan pembayaran berdasarkan suku bunga yang tetap atau mengambang, dan pihak kedua melakukan hal yang berlawanan. Transaksi *swap* merupakan salah satu dari transaksi derivatif yang digunakan untuk meminimumkan resiko terhadap depresiasi mata uang.

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan menggunakan swap:

Menentukan *spot rate*

premi

- Kurs
- Depresiasi
- Tenor atau jangka waktu pinjaman (pokok dan Bunga).

Penentuan beban

- Besar Premi %
- Tenor
- Jumlah kewajiban

PT Tiyo mempunyai kredit atau pinjaman sebesar \$100,000 dengan bunga 6% per tahun dan tenor 1 tahun. Diketahui kurs rupiah sebesar Rp.1,000 per dolar dan depresiasi 5% per tahun. Selain itu ada kewajiban premi 10% dengan tenor 3 bulan.

Menentukan *spot rate* (kurs, depresiasi, tenor)

01 Januari		1,000.
01 April	$1,000 + (5\% (3/12 \times 1,000))$	1,025.5
01 Juli	$1,025.5 + (5\% (3/12 \times 1,012.5))$	1,025.16
01 Oktober	$1,025.16 + (5\% (3/12 \times 1,025.16))$	1,037.97
31 Desember	$1,037.97 + (5\% (3/12 \times 1,037.97))$	1,050.94

Menentukan beban premi (besar premi %, tenor, kewajiban pinjaman)

Premi I	$10\% \times 3/12 \times (6\% \times 100,000) \times 1,000$	2,650,000.00
Premi II	$10\% \times 3/12 \times (6\% \times 100,000) \times 1,012.50$	2,683,125.00
Premi III	$10\% \times 3/12 \times (6\% \times 100,000) \times 1,025.16$	2,716,674.00
Premi IV	$10\% \times 3/12 \times (6\% \times 100,000) \times 1,037.97$	2,750,620.50
Jumlah Premi		10,800,419.50

Membayar pengembalian pinjaman dan premi

Pokok Pinjaman ($\$ 100,000 \times 1,000$)	= Rp.100,000,000.00
Bunga	= <u>Rp. 10,800,419.50</u>
Total	= Rp.110,800,419.50

Jika tidak menggunakan *swap*

$(\$ 100,000 + (6\% \times \$ 100,000)) \times \text{Rp.}1,050,94$	= Rp.111,399.640,00
Menggunakan <i>swap</i>	= <u>Rp.110,800,419.50</u>
Selisih	= Rp. 599,220.50

Dari perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Tiyok lebih diuntungkan apabila menggunakan swap. Dimana ada selisih Rp. 599,220.50,-

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ross, Stephen, dkk. 2016:363 *Pengantar Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- A. Ross, Stephen, dkk. 2016:378. *Pengantar Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bodie, Zvi., Alex Kane, Alan J. Marcus. 2009. *Investment*. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Brigham dan Houston. 2012. *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kesepuluh. Salemba Empat. Jakarta.
- Eiteman, D.K. dkk. 2010. *Manajemen keuangan multinasional*. Edisi Keduabelas. Jakarta: Erlangga.
- Hull, Jhon C. 2008:1. *Fundamentals Of Future And Options Markets*. Sixth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hull, Jhon C. 2008:39. *Fundamentals of Future and Options Markets*. Sixth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan-PSAK 55 (Revisi 2006). Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, Weygandt dan Warfield. 2011. *Intermediate Accounting*. Edisi IFRS. Jakarta: Salemba Empat.
- Kolb, Robert W. and James A. Overdahl. 2003. *Financial Derivatives*. 3th edition. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Mudrajad, Kuncoro. 2001. *Manajemen Keuangan Internasional*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Siahaan, H.P. & Haymans Manurung. 2008. *Aktiva Derivatif: Pasar Uang, Pasar Modal, Pasar Komoditi, dan Index*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Biodata Penulis

Yopie Chandra, S.E., M.Akt



Ketertarikan penulis pada bidang Akuntansi dimulai sejak di SMEA pada tahun 1980. Pendidikan penulis diawali dengan pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri 17 Jakarta, jurusan Akuntansi pada tahun 1980 dapat diselesaikan pada tahun 1983. Kemudian dilanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI)

Indoneisa pada program DIII Akuntansi tahun 1984 dan diselesaikan pada tahun 1987. Kemudian berlanjut pada program Sarjana SI Akuntansi di STEI Indonesia tahun 1994 dapat diselesaikan pada tahun 1997. Pendidikan Magister penulis adalah Pasca Sarjana Akuntansi dari Universitas Budi Luhur Jakarta, pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2013. Sebagai seorang praktisi, penulis bekerja selama kurang lebih 30 tahun di berbagai perusahaan swasta, terakhir menjabat sebagai Manajer Akuntansi dan Pajak di PT Takdir Jaya Abadi. Namun saat ini saya memilih untuk fokus pada pekerjaan saya sebagai dosen dan aktif mengajar di Universitas Buddhi Dharma. Penulis mempunyai keahlian di bidang Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Perpajakan. Selain menjadi peneliti, penulis juga mulai menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: yopie_chandra1965@yahoo.co.id

BAB 12

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Yola Andesta Valenty, S.E., M.Ak.

Universitas Amikom Yogyakarta

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan mencakup tiga karakteristik yaitu aspek likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. Terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan yaitu (Wibowo dan Arif, 2003):

1. *Intracompany Basis*

Membandingkan unsur dalam laporan keuangan perusahaan dalam tahun yang sama atau hubungan diantara unsur laporan keuangan satu tahun atau lebih.

2. *Industry Average*

Membandingkan suatu unsur dalam laporan keuangan dengan rata-rata industri yang telah dipublikasikan oleh penyusun peringkat.

3. *Intercompany Basis*

Membandingkan sebuah unsur laporan keuangan dengan unsur lain dari satu atau lebih perusahaan pesaing.

Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Putra *et al.* (2021), analisis laporan keuangan di suatu entitas bertujuan untuk:

1. Mengetahui perubahan posisi keuangan entitas pada periode tertentu.

2. Menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan.
3. Mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki entitas.
4. Mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan.
5. Membantu manajemen mengambil keputusan penting.
6. Sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada suatu entitas.
7. Mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu laporan keuangan.

Analisis Rasio Keuangan

Terdapat beberapa metode analisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode yang paling populer digunakan. Berikut merupakan beberapa rasio keuangan yang umum digunakan:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Buntu, 2023). Berikut merupakan beberapa jenis rasio likuiditas:

a. Rasio Lancar (*Current Rasio*)

Rasio lancar merupakan rasio yang membandingkan aset lancar dengan liabilitas lancar. Rumus dari rasio lancar yaitu:

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan utang jangka pendek menggunakan aset lancar tanpa memasukkan nilai

persediaan (Sulistiowati dan Suklimah, 2023). Rumus dari rasio cepat yaitu:

$$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan bentuk penyempurnaan dari rasio cepat yang dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana finansial perusahaan yang terdiri dari kas serta setara kas yang ada (Putri dan Ramadhan, 2023). Rumus dari rasio kas yaitu:

$$\frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang sesuai pada waktunya (Buntu, 2023). Berikut merupakan beberapa jenis rasio solvabilitas:

a. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

DAR merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung rasio total utang terhadap total aset (Sulistiowati dan Suklimah, 2023). Rumus dari DAR yaitu:

$$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai rasio total utang terhadap total ekuitas (Sulistiowati dan Suklimah, 2023). Rumus dari DER yaitu:

$$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya (Kasmir, 2010). Beberapa jenis dari rasio aktivitas yaitu:

a. Rasio Perputaran Piutang

Menurut Tyas *et al.* (2023) rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumus dari rasio ini yaitu:

$$\frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang}}$$

b. Rasio Perputaran Persediaan

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode (Kasmir, 2010). Rumus dari rasio perputaran persediaan adalah:

$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

c. Rasio Perputaran Aset Tetap

Rasio perputaran aset tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode (Kasmir, 2010). Rumus dari perputaran aset tetap adalah:

$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset Tetap}} \times 100\%$$

d. Rasio Perputaran Total Aset

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran aset yang dimiliki perusahaan dan mengukur

berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aset (Tyas *et al.*, 2023). Rumus dari rasio perputaran total aset adalah:

$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4. Rasio Profitabilitas

Menurut Buntu (2023), rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan sebagainya. Beberapa jenis dari rasio profitabilitas yaitu:

a. *Net Profit Margin*

Net profit margin merupakan rasio yang membandingkan pendapatan operasional dengan pendapatan penjualan (Putri dan Ramadhan, 2023). Rumus dari *net profit margin* adalah:

$$\frac{\text{Laba setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Return on Equity (ROE)*

ROE merupakan rasio yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham (Buntu, 2023).

Rumus dari ROE yaitu:

$$\frac{\text{Laba setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

c. *Return of Investment (ROI)*

ROI merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset (Buntu, 2023). Rumus dari ROI yaitu:

$$\text{Net Profit Margin} \times \text{Perputaran Total Aset}$$

Contoh Kasus

Berikut merupakan contoh laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari PT Baby Bus.

PT Baby Bus
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2023

Aset Lancar

Kas	2.000.000
Giro	450.000
Surat-surat Berharga	200.000
Piutang	750.000
Persediaan	1.000.000
Total Aset Lancar	4.400.000

Aset Tetap

Tanah	2.000.000
Mesin	500.000
Gedung	700.000
Total Aset Tetap	3.200.000
Total Aset	7.600.000

Utang Lancar

Utang Bank	1.000.000
Utang Dagang	1.000.000
Utang Lancar Lainnya	500.000
Total Utang Lancar	2.500.000

Utang Jangka Panjang

Utang Bank	2.000.000
Utang Obligasi	1.000.000
Total Utang Jangka Panjang	3.000.000

Total Liabilitas

5.500.000

Ekuitas

Modal Setor	2.000.000
Laba Ditahan	100.000
Total Ekuitas	2.100.000

Total Liabilitas dan Ekuitas

7.600.000

PT Baby Bus
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2023

Total Penjualan	9.500.000
Harga Pokok Penjualan	2.750.000
Laba Kotor	6.750.000
Beban Operasional	
Beban Umum dan Administrasi	200.000
Beban Penjualan	300.000
Beban Lain-lain	350.000
Total Beban Operasional	850.000
Pendapatan Bersih Operasional	5.900.000
Pendapatan lainnya	700.000
Laba sebelum Bunga dan Pajak	6.600.000
Beban Bunga	
Bunga Bank	150.000
Bunga Obligasi	350.000
Total Beban Bunga	500.000
Laba sebelum Pajak	6.100.000
Pajak 20%	1.220.000
Laba setelah Bunga dan Pajak	4.880.000

1. Rasio Likuiditas

a. Rasio Lancar

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{4.400.000}{2.500.000}$$

$$\text{Rasio Lancar} = 1,76 \text{ kali}$$

Rasio lancar pada PT Baby Bus adalah 1,76 kali dimana setiap 1 rupiah utang lancar yang dimiliki oleh PT Baby Bus dijamin dengan 1,76 rupiah aset lancar.

b. Rasio Rasio Cepat

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{4.400.000 - 1.000.000}{2.500.000}$$

$$\text{Rasio Cepat} = 1,36 \text{ kali}$$

Rasio cepat pada PT Baby Bus adalah 1,36 kali dimana setiap 1 rupiah utang lancar yang dimiliki oleh PT Baby Bus dijamin dengan 1,36 rupiah aset lancar kecuali persediaan. Rasio ini digunakan karena jika perusahaan menjual persediaan yang dimiliki dengan harga normal relatif lebih sulit (Kasmir, 2010).

c. Rasio Kas

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Giro}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$\text{Rasio Kas} = \frac{2.000.000 + 450.000}{2.500.000}$$

$$\text{Rasio Kas} = 0,98 \times 100\% = 98\%$$

Rasio kas yang dimiliki sebuah perusahaan tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Jika terlalu tinggi maka ada kas mengendap yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan. Namun jika terlalu rendah, hal ini menandakan bahwa perusahaan harus menjual aset lain untuk melunasi utang lancar yang dimiliki.

2. Rasio Solvabilitas
a. Debt to Asset Ratio (DAR)

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{DAR} = \frac{5.500.000}{7.600.000}$$

$$\text{DAR} = 72,36\% \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } 72\%.$$

DAR pada PT Baby Bus adalah 72%, artinya setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan maka Rp 72 dibiayai oleh utang dan Rp 28 diperoleh dari pemegang saham.

b. ***Debt to Equity Ratio (DER)***

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

$$DER = \frac{5.500.000}{2.100.000}$$

$$DER = 2,61 \text{ kali}$$

DER pada PT Baby Bus adalah 2,6 kali yang menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp 261 untuk setiap Rp 100 yang disediakan pemegang saham.

3. **Rasio Aktivitas**

a. **Rasio Perputaran Piutang**

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang}}$$

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = \frac{9.500.000}{750.000}$$

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = 12,6 \text{ kali}$$

Perputaran piutang pada PT Baby Bus adalah 12,6 kali. Semakin tinggi rasio perputaran piutang maka perusahaan dianggap berhasil melakukan penagihan piutang.

b. **Rasio Perputaran Persediaan**

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = \frac{9.500.000}{1.000.000}$$

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = 9,5 \text{ kali}$$

Perputaran persediaan pada PT Baby Bus adalah 9,5 kali yang artinya 9,5 kali persediaan barang dagangan diganti selama 1 tahun.

c. **Rasio Perputaran Aset Tetap**

$$\text{Rasio Perputaran Aset Tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset Tetap}}$$

$$\text{Rasio Perputaran Aset Tetap} = \frac{9.500.000}{3.200.000}$$

$$\text{Rasio Perputaran Aset Tetap} = 2,96 \text{ kali}$$

Perputaran aset tetap pada PT Baby Bus adalah 2,96 kali yang menunjukkan bahwa setiap Rp 1 aset tetap dapat menghasilkan Rp 2,96 penjualan.

d. **Rasio Perputaran Total Aset**

$$\text{Rasio Perputaran Total Aset} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{Rasio Perputaran Total Aset} = \frac{9.500.000}{7.600.000}$$

$$\text{Rasio Perputaran Total Aset} = 1,25 \text{ kali}$$

Perputaran total aset pada PT Baby Bus adalah 1,25 kali yang menunjukkan bahwa setiap Rp 1 total aset dapat menghasilkan Rp 1,25 penjualan.

4. Rasio Profitabilitas

a. **Net Profit Margin**

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{4.880.000}{9.500.000}$$

$$\text{Net Profit Margin} = 0,5 = 50\%.$$

Net profit margin dari PT Baby Bus adalah 50% yang menunjukkan margin laba pada tahun 2023 adalah 50%.

b. **Return on Equity (ROE)**

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

$$\text{ROE} = \frac{4.880.000}{2.100.000}$$

$$\text{ROE} = 2,3 \text{ kali}$$

c. ***Return of Investment (ROI)***

$\text{ROI} = \text{Net Profit Margin} \times \text{Perputaran Total Aset}$

$\text{ROI} = 50\% \times 1,25$

$\text{ROI} = 0,62 = 62\%$

DAFTAR PUSTAKA

- Buntu, B. (2023). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Profitabilitas Pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.142>
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana.
- Putra, I. G. S., Affandi, H. A. A., Purnamasari, L., & Sunarsi, D. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Cipta Media Nusantara (CMN).
- Putri, L. A., & Ramadhan, M. I. (2023). Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham. *Owner*, 7(2), 1113–1123. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1344>
- Sulistiowati, D. A., & Suklimah, R. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2019-2022. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(4), 823–832. <https://doi.org/10.53625/jirk.v3i4.6543>
- Tyas, K. Z., Dewanty, A. R., Sechan, C., & Mukharomah, I. N. (2023). Analisis Rasio Aktivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Adaro Minerals Indonesia Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *PJEB: Perwira Journal of Economic & Business*, 3(1), 55–64. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v3i01>
- Wibowo, & Arif, A. (2003). *Akuntansi Keuangan Dasar 2* (3rd ed.). Grasindo.

Biodata Penulis**Yola Andesta Valenty, S.E., M.Ak.**

Penulis lahir di Lampung Tengah, 4 November 1993. Penulis merupakan lulusan prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia tahun 2016. Sebelum melanjutkan pendidikan S2, penulis mengikuti pelatihan perpajakan (Brevet A & B). Setelah itu penulis lulus dari prodi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia tahun 2019. Hanya berselang tiga bulan dari kelulusan pendidikan S2, penulis menjadi dosen tetap di Universitas AMIKOM Yogyakarta prodi Akuntansi hingga saat ini. Kegiatan utama penulis saat ini selain mengajar juga melakukan penelitian dan pengabdian secara individu maupun berkolaborasi dengan dosen lain. Penulis saat ini sedang memulai aktif menulis buku sehingga buku yang ditulis dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Email Penulis: yolaandesta@amikom.ac.id

AKUNTANSI INTERMEDIATE

1. PENGANTAR AKUNTANSI INTERMEDIATE

Asrini A. Saeni, S.E., CFP, M.Sc.

2. ASET LANCAR DAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Fahrul Imam Santoso, M.Ak., Ak., CA.

3. PENDAPATAN, PENERIMAAN YANG BELUM DITERIMA, DAN PENERIMAAN DI MUKA

Regina Beatrix Takakobi, S.E., M.A.

4. ASET TETAP DAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Nur Jannah Abdi Aziz, S.E., M.Ak.

5. LIABILITAS DAN KEWAJIBAN YANG TIDAK LANCAR

Harfiahani Indah Rakhma Ningtyas, S.ST., M.SA.

6. EKUITAS PEMEGANG SAHAM

Dr. Angela Merici Minggu, S.E., M.Si.

7. ARUS KAS

Gebriany Pirade Wenur, S.E., M.S.A.

8. PENDAPATAN

Dr. Dewi Sarifah Tullah, M.SI., AK., CA.

9. AKUNTANSI UNTUK LEASING

Alfriadi Dwi Atmoko, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA

10. AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN

Widiyanti Kurnianingsih, S.E., M.Akt., Ak., CA., CRA

11. AKUNTANSI UNTUK INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

Yopie Chandra, S.E., M.Akt.

12. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Yola Andesta Valenty, S.E., M.Ak.

Editor:

Dr. Miko Andi Wardana, S.T., M.Si.

Untuk akses,
INFES MEDIA STORE,
Scan QR CODE



CV. Intelektual Manifes Media
Jalan Raya Puri Gading
Kabupaten Badung, Bali

